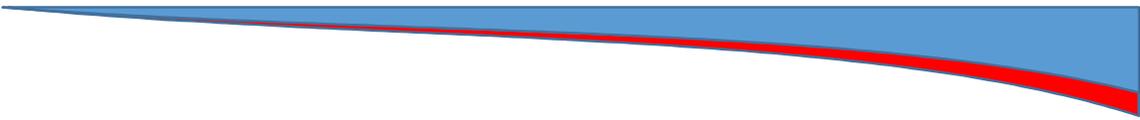


# DATA TERPILAH **GENDER** KABUPATEN **GARUT** TAHUN **2021**



KERJASAMA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GARUT  
DENGAN  
UNIVERSITAS GARUT



## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah atas izin dan pertolongan-Nya, Penyusunan Buku Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2021 ini dapat diselesaikan. Buku ini tersaji atas kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut.

Buku Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2021 ini merupakan salah satu upaya untuk menyajikan data berdasarkan jenis kelamin berupa data kuantitatif atau data kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pengelolaan data terpilah menurut jenis kelamin ini sangat diperlukan untuk berbagai keperluan, utamanya untuk melaksanakan strategi Pengarus utamaan Gender (PUG) kedalam keseluruhan proses pembangunan.

Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, politik dan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kekerasan. Hasil Analisa Data Terpilah dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan dan implementasi kebijakan, perencanaan & penganggaran serta monitoring dan evaluasi yang responsif gender, termasuk program/ kegiatan pemberdayaan perempuan

Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran Penyusunan Buku Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2021, semoga buku ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Garut, 2021

Tim Penyusun

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
(DPPKBPPPA) KABUPATEN GARUT

**SAMBUTAN**



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, Alhamdulillah Penyusunan Buku Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Penyediaan dan pengelolaan data terpilah menurut jenis kelamin ini menjadi suatu keniscayaan, khususnya terkait dengan INPRES No.9 Tahun 2000 tentang keharusan melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) diseluruh bidang pembangunan termasuk dalam pengembangan data dan informasi, baik tingkat nasional maupun daerah.

Sebagai wujud komitmen terhadap Penyelenggaraan Data Gender, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kabupaten Garut melakukan suatu upaya pengelolaan data yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender.

Buku Data Terpilah Gender merupakan sumber informasi yang lebih akurat untuk mendukung perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pemerintah. Dengan ketersediaan data terpilah ini pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan dan program dengan mengidentifikasi perbedaan keadaan kelompok laki-laki dan perempuan sehingga terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.

Penyusunan Buku Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2021 disusun atas kerjasama antara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Garut dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut, untuk itu ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang terlibat dalam Penyusunan Buku ini, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan Buku Data Terpilah Gender yang akandatang.

Semoga segala upaya yang kita lakukan dalam meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data gender mendapat ridho Allah SWT.

Garut, April 2021

**Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten  
Garut**

TTD

**Drs. Yayan Waryana, M.Si.**  
**NIP. 119661231 199302 1 002**



**TIM PENYUSUN DATA TERPILAH GENDER KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021**

Pengarah : Bupati Kabupaten Garut  
Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Garut

PenanggungJawab : Iryani, S.Sos,MM

Editor : Resin Reli Amrilah, S.IP  
Rd. Ade Purnawan, Drs., Msi

Tim Penyusun  
Ketua : Dr. Hj. Ikeu Kania, Dra., M.Si  
WakilKetua : Dr. Aceng Ulumudin, M.Si  
Nurbudiwati, Dra., M.Si

PengumpulData : Nita Rika Lestari, S.IP  
Santi Susanti, S.IP., MSi

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>SAMBUTAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Tujuan Penyusunan Data Terpilah Gender.....	3
1.4. Metode Pengumpulan Data.....	4
1.5. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II    KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN IPM, IPG, IDG DAN           ISU GENDER DI KABUPATEN GARUT .....</b>	<b>5</b>
2.1. Kebijakan Pemberdayaan Perempuan .....	5
2.2. Pengarusutamaan Gender (PUG).....	7
2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	11
2.4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) .....	13
2.5. Isu Gender di Kabupaten Garut.....	17
<b>BAB III    GAMBARAN UMUM KABUPATEN GARUT.....</b>	<b>26</b>
3.1. Kondisi Geografis .....	26
3.2. Kondisi Demografis .....	27

3.3. Kondisi Pemerintahan.....	28
3.4. Kondisi Ketenagakerjaan .....	29
3.5. Kondisi Pendidikan .....	30
3.6. Kemiskinan.....	32
<b>BAB IV PROFIL GENDER BIDANG KESEHATAN .....</b>	<b>33</b>
4.1. Angka Harapan Hidup .....	33
4.2. Status Kesehatan Penduduk.....	35
4.2.1 Akses Ke Pelayanan Kesehatan.....	35
4.2.2 Tenaga Kesehatan.....	37
4.2.3 Penyakit yang Diderita Masyarakat.....	38
4.2.4 Kelahiran yang Ditolong Non Tenaga Medis .....	40
4.3. Keluarga Berencana .....	41
<b>BAB V PROFIL GENDER BIDANG PENDIDIKAN .....</b>	<b>45</b>
5.1. Pendidikan Penduduk yang Ditamatkan di Kabupaten Garut .....	46
5.2. Rata-rata Lama Sekolah .....	57
<b>BAB VI PROFIL GENDER BIDANG KETENAGAKERJAAN .....</b>	<b>61</b>
6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	61
6.2. Pengangguran .....	65
6.2.1 Pengangguran Terbuka.....	66
6.2.2 Pengangguran Terdidik.....	68
6.3. Pekerjaan Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Pekerjaan .	70
6.3.1 Pekerjaan Menurut Lapangan Pekerjaan.....	70
6.3.2 Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan	
Utama .....	72

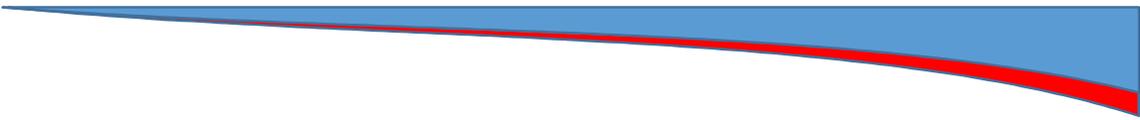
6.4. Pekerjaan Menurut Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan .....	73
6.4.1 Pekerja Menurut Status Modal, Kategori Perusahaan dan Jenis Kelamin .....	73
6.4.2 Pekerja Menurut Status Modal, Pendidikan dan Jenis Kelamin ...	75
<b>BAB VII PROFIL GENDER BIDANG POLITIK, PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN .....</b>	<b>77</b>
7.1. Partisipasi di Bidang Politik .....	78
7.1.1 Anggota DPRD Kabupaten Garut.....	78
7.1.2 Partisipasi di Instansi Pemerintahan .....	80
7.2. Organisasi Kemasyarakatan .....	88
<b>BAB VIII PROFIL GENDER BIDANG SOSIAL BUDAYA .....</b>	<b>91</b>
8.1. Penduduk Lanjut Usia (Lansia) .....	91
8.2. Penyandang Disabilitas.....	93
<b>BAB IX KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN .....</b>	<b>96</b>
9.1. Kekerasan Terhadap Perempuan .....	96
9.2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	97
9.3. Gambaran Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2018.....	98
<b>BAB X PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

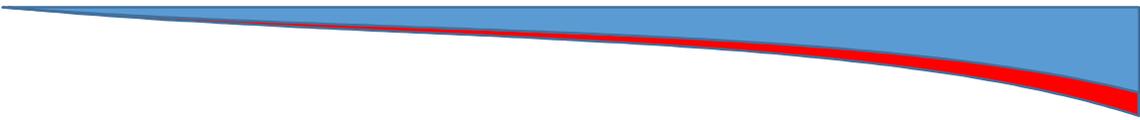
Tabel 2.1	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	6
Tabel 2.2	Prasyarat Pengarusutamaan Gender .....	9
Tabel 2.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 12 .....	12
Tabel 2.4.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) .....	14
Tabel 2.5.	Komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Angka Harapan Hidup (AHH).....	14
Tabel 2.6.	Komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Harapan Lama Sekolah (EYS).....	15
Tabel 2.7.	Komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Rata-rata Lama Sekolah (MYS).....	15
Tabel 2.8.	Komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Pengeluaran	15
Tabel 2.9.	Komponen Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) Menurut Keterlibatan Perempuan di Parlemen .....	16
Tabel 2.10.	Komponen Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) Menurut Tenaga Profesional .....	16
Tabel 2.11.	Komponen Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) Menurut Sumbangan Pendapatan Perempuan .....	16
Tabel 2.12	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .....	21
Tabel 4.1	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut, 2018 .....	35

Tabel 4.2	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut, 2020 .....	37
Tabel 4.3	Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria di Kabupaten Garut, 2020 .....	39
Tabel 4.4	Jumlah Pasangan Usia Subur di Kabupaten Garut, 2020 .....	41
Tabel 4.5	Jumlah Peserta KB Aktif di Kabupaten Garut, 2020 .....	43
Tabel 5.1	Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Sekolah Dasar yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020....	46
Tabel 5.2	Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020	48
Tabel 5.3	Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020.....	49
Tabel 5.4	Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Diploma yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020 .....	50
Tabel 5.5	Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Strata 1 (S-1) yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020 .....	52
Tabel 5.6	Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Strata 2 (S-2) yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020 .....	54
Tabel 5.7	Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Strata 3 (S-3) yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020...	56
Tabel 5.8	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah Kabupaten Garut Tahun 2020 .....	58
Tabel 5.9	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2020 .....	59
Tabel 6.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Status Wilayah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020 .....	61
Tabel 6.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut .....	63

Tabel 6.3.	Jumlah Pengangguran Menurut Kelompok umur 15 Tahun Ke Atas dan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2020 .....	65
Tabel 6.4	TingkatPengangguranTerbuka(TPT)Menurutumur15TahunKeAtas dan Lulusan Terakhir Pendidikan di Kabupaten Garut.....	66
Tabel 6.5	Tingkat Pengangguran Terdidik Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2019 .....	69
Tabel 6.6	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut.....	70
Tabel 6.7	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2019.....	72
Tabel 6.9	Penduduk yang Bekerja Menurut Status Modal (Swasta, Asing dan Daerah dan Join Venture) dan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut .....	75
Tabel 7.1	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	78
Tabel 7.2	Jumlah Pegawai di Pemerintahan Kabupaten Garut Menurut Jenis Kelamin di Lingkungan Dinas/Badan/Lembaga Tahun 2020.....	80
Tabel 7.3	Jumlah Pegawai Kecamatan termasuk Jumlah Perangkat Desa dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2019.....	82
Tabel 7.4	Jumlah Pegawai Kecamatan termasuk Perangkat Desa di Kabupaten Garut Menurut Tingkat Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin Tahun 2020 .....	85
Tabel 7.5	Lembaga Organisasi Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020.....	88
Tabel 8.1	Persentase Penduduk Lansia dan Pralansia terhadapTotal Pendudukdi Kabupaten Garut Menurut Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin Tahun 2019 .....	91
Tabel 8.2	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas terhadap Total Penduduk di Kabupaten Garut Menurut Kelompok Umur, Klasifikasi Wilayah dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	93



Tabel 9.1	Rekapitulasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Tahun 2014s/d 2020 .....	97
-----------	--	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Garut (Tahun) Selama Kurun Waktu 2012 – 2017 .....	34
Gambar 4.2	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut, 2020 .....	36
Gambar 4.3	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut, 2020 .....	38
Gambar 4.4	Proses Kelahiran Yang Ditolong Oleh Non Medis .....	40
Gambar 4.5	Grafik Peserta KB Aktif di Kabupaten Garut 2020 .....	42
Gambar 4.6	Peserta KB Aktif di Kabupaten Garut, 2020 .....	44
Gambar 5.1	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan Sekolah Dasar yang Ditamatkan di Kabupaten Garut Tahun 2020 .....	47
Gambar 5.2	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Ditamatkan di Kabupaten Garut Tahun 2020 .....	49
Gambar 5.3	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/Sedarajat) yang Ditamatkan di Kabupaten Garut Tahun 2020 .....	51
Gambar 5.4	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan Diploma yang Ditamatkan di Kabupaten Garut Tahun 2020 .....	52
Gambar 5.5	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) yang Ditamatkan di Kabupaten Garut Tahun 2020 .....	54

Gambar5.6	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan Strata 2 (S-2) yang Ditamatkan di Kabupaten Garut Tahun 2020 .....	55
Gambar5.7	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan Strata 3 (S-3) yang Ditamatkan di Kabupaten Garut Tahun 2019 .....	57
Gambar5.8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2019 .....	60
Gambar 6.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut .....	64
Gambar6.3	Pengangguran Menurut Kelompok umur 15 Tahun Ke Atas dan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2018 .....	66
Gambar6.4	Penduduk yang bekerja Menurut umur 15 Tahun Ke Atas dan Lulusan Terakhir Pendidikan di Kabupaten Garut Tahun 2019 .....	67
Gambar6.5	Pengangguran Menurut Kelompok umur 15 Tahun Ke Atas dan Berdasarkan Lulusan Pendidikan di Kabupaten Garut, 2019 .....	68
Gambar6.6	Tingkat Pengangguran Terdidik Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2019 .....	69
Gambar6.7	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut .....	71
Gambar6.8	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan menurut Jenis Kelamin Perempuan di Kabupaten Garut .....	71
Gambar6.9	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2019 .....	73
Gambar 6.10	Perusahaan Berdasarkan Status Modal, Kategori Perusahaan dan Jumlah Pekerja berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2019 .....	75
Gambar6.11	Penduduk yang Bekerja Menurut Status Modal (Swasta, Asing dan Daerah dan Joint Venture) dan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut 2019 .....	76
Gambar7.1	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Tahun 2019 .....	79



Gambar 7.2	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	79
Gambar 7.3	Jumlah Pegawai di Pemerintahan Kabupaten Garut Menurut Jenis Kelamin di Lingkungan Dinas/Badan/Lembaga Tahun 2020 .....	82
Gambar 7.4	Jumlah Pegawai Kecamatan termasuk Jumlah Perangkat Desa dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020 .....	85
Gambar 8.1	Persentase Penduduk Lansia dan Pralansia terhadap Total Penduduk di Kabupaten Garut Menurut Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	92
Gambar 9.1	Rekapitulasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Tahun 2014 s/d 2018.....	98

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan inti dari pembangunan nasional di Indonesia, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan. Dalam proses perkembangannya hingga saat ini peran serta perempuan baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat hasil pembangunan masih belum menciptakan kedamaian serta keharmonisan berkeluarga dan bermasyarakat sehingga melahirkan ketidakadilan gender.



Ketidakadilan gender dalam berbagai dimensi kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, padahal bila dilihat dari konteks kehidupan bermasyarakat, perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk diperlakukan secara adil dalam berbagai peran disegala bidang kehidupan. Dalam berbagai kesempatan kerap kali perempuan selalu dijadikan objek eksploitasi, serta adanya upaya marginalisasi perempuan sehingga melahirkan relasi yang timpang dan sering kali mengakibatkan terjadinya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki serta terjadinya hambatan bagi kemajuan perempuan.

Permasalahan yang dialami perempuan pada masa lalu maupun masa kini, tentu saja tidak luput dari perhatian komunitas negara-negara di dunia. Terbukti pada 18 Desember 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengadopsi *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) atau Konvensi Perempuan atau yang sekarang sering disebut sebagai Konvensi CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*). Konvensi Perempuan merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak-hak perempuan yang paling komprehensif. Selanjutnya Hak Asasi Perempuan yang merupakan Hak Asasi Manusia kembali dideklarasikan dalam Konferensi Dunia ke-IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995.

Hasil konferensi yang dilaksanakan di Beijing tahun 1995 tersebut mengangkat 12 bidang yang menjadi keprihatinan negara-negara di dunia yang mencakup: (1) Perempuan dan Kemiskinan; (2) Pendidikan dan Pelatihan bagi Perempuan; (3) Perempuan dan Kesehatan; (4) Kekerasan terhadap Perempuan; (5) Perempuan dan Konflik Bersenjata; (6) Perempuan dan Ekonomi; (7) Perempuan dan Kekuasaan serta Pengambilan Keputusan; (8)

Mekanisme Kelembagaan untuk Kemajuan Perempuan; (9) Hak Asasi Perempuan; (10) Perempuan dan Media; (11) Perempuan dan Lingkungan Hidup; (12) Anak Perempuan.

Pada September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB telah menyetujui Deklarasi Millennium Development Goals (MDGs) dengan menetapkan target keberhasilannya pada tahun 2015. Ada delapan komitmen kunci yang ditetapkan dan disetujui dalam MDGs, komitmen tersebut diterjemahkan menjadi beberapa tujuan dan salah satunya adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pencapaian sasaran MDGs menjadi salah satu prioritas utama bangsa Indonesia. Pencapaian tujuan dan target tersebut bukanlah semata-mata tugas pemerintah tetapi merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Sehingga pencapaian tujuan dan target MDGs harus menjadi pembahasan seluruh masyarakat.

Lahirnya Instruksi Presiden/INPRES No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman PUG di Daerah dan KepmendagriNo. 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman PUG di Daerah bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dalam dan penguasaan terhadap proses pembangunan. Instruksi Presiden ini mengharuskan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah, untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program.

Pengarusutamaan gender ditujukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan serta menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat. Oleh karena itu perlu dibentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, yaitu program yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan laki-laki dan perempuan dengan ketersediaan Data Terpilah sehingga intervensi yang dilakukan agar tepat sasaran.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut berkerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut, menyusun Data Terpilah sebagaimana diamanatkan dalam INPRES No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang merupakan salah satu prasyarat yang harus ada diantara 7 prasyarat antara lain: 1) dukungan politik, 2) kebijakan, 3) kelembagaan, 4) sumber daya, 5) data terpilah, 6) alat analisis gender, dan 7) dukungan masyarakat sipil. Data terpilah disusun berdasarkan jenis kelamin (*sex-disaggregated*) yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif yang dikumpulkan dan di persentasikan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

## 1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bab IV Urusan Pemerintahan Pasal 9 Ayat(3);
- 2) Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Nasional;
- 3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Kekerasan

### 1.3. Tujuan Penyusunan Data Terpilah Gender

Penyusunan data terpilah gender menurut jenis kelamin dan usia menjadi suatu yang harus dilakukan, khususnya terkait dengan INPRES No.9/2000 tentang keharusan melaksanakan strategi pengarusutamaan gender (PUG) diseluruh bidang pembangunan termasuk dalam pengembangan data dan informasi, baik tingkat nasional maupun daerah. Hal ini selaras dengan salah satu hasil kesepakatan Konferensi Perempuan Sedunia ke-4 di Beijing yang mendesak layanan statistik ditingkat nasional, regional maupun internasional untuk mengumpulkan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia, serta menghasilkan statistik gender yang diperlukan.

Data terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender. Pemilahan menurut jenis kelamin diberbagai bidang dapat menunjukkan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender.

Data terpilah sangat bermanfaat untuk menganalisis gender dalam Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang ditunjukkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan penyusunan reformulasi kebijakan agar responsif gender dengan menggunakan alat analisis antara lain *Gender Analysis Pathway* (GAP). Dengan demikian maka diharapkan kebijakan yang dihasilkan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah baik dipusat maupun daerah responsif gender dan akan membuahkan manfaat yang adil dan hasil yang setara bagi seluruh masyarakat.

Penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin sangat diperlukan untuk berbagai keperluan, utamanya untuk melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) kedalam keseluruhan proses pembangunan. Pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan terintegrasi ke dalam seluruh proses pembangunan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah ditingkat pusat dan daerah termasuk Kabupaten Garut.

Tujuan penyusunan data terpilah gender di Kabupaten Garut untuk memberikan informasi awal sebagai pembuka wawasan dan juga sebagai salah satu indikator dalam melihat tingkat partisipasi gender, sehingga menjadi faktor yang sangat penting dalam pengarusutamaan gender. Disamping itu data terpilah ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kondisi perempuan dan laki-laki pada bidang-bidang utama, seperti kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, politik dan pemerintahan, pertanian, perlindungan perempuan dan anak serta keluarga berencana.

Data Terpilah Gender Kabupaten Garut ini disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- 1) Tersedianya data dasar terpilah berdasarkan jenis kelamin yang menggambarkan pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dan sebaran penduduk;
- 2) Tersedianya data terpilah gender di bidang pendidikan, ketenaga kerjaan, politik dan pemerintahan, pertanian, perlindungan perempuan dan anak serta keluarga berencana.
- 3) Tersedianya hasil analisis tentang capaian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Garut. Hal ini dilihat berdasarkan indikator pemberdayaan gender,

meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki di sektor publik, meliputi bidang pemerintahan, posisi di parlemen, dan dalam distribusi pendapatan.

- 4) Tersedianya data yang dapat digunakan dalam melakukan analisis gender melalui Gender Analisis Pathway (GAP) yang diperlukan untuk penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang berbasis kinerja.

#### 1.4. Metode Pengumpulan Data dan Analisa

Penyusunan data terpilah gender ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan informasi dari berbagai sumber melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Studi literatur dari dokumen-dokumen yang terkait;
- 2) Pengumpulan data umum dari BPS, data sektoral dari Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (BPPKBPPPA), serta data yang dikumpulkan melalui pengisian formulir dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diseluruh wilayah Kabupaten Garut serta data dari organisasi lainnya yang terkait seperti BUMN, BUMD dan sektor Swasta.;
- 3) Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang difokuskan pada bidang utama, seperti kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, politik dan pemerintahan, pertanian, perlindungan perempuan dan anak serta keluarga berencana. FGD ini dilakukan untuk validasi data yang telah terkumpul, menggali isu gender sektoral yang terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender

Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif serta deskriptif kualitatif. Analisa data juga dilakukan dengan membandingkan data wilayah dan jenis kelamin untuk dapat melihat dengan lebih jelas kondisi laki-laki dan perempuan untuk tiap jenis data. Hasil analisa data tersebut selanjutnya disusun menjadi kesimpulan dan rekomendasi bagi kebijakan/program yang lebih responsif gender.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Data Terpilah Gender Kabupaten Garut tahun 2019 terdiri dari 10 Bab sebagai berikut:

- |          |  |
|----------|--|
| Bab I    | Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, landasan hukum, tujuan penyusunan data terpilah gender, serta metode pengumpulan data dan analisa |
| Bab II   | Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Isu Gender di Kabupaten Garut   |
| Bab III  | Gambaran Umum Kabupaten Garut meliputi kondisi geografis, demografis, sosial, ekonomi, indeks pembangunan manusia dan ketimpangan gender   |
| Bab IV   | Profil Gender Bidang Kesehatan   |
| Bab V    | Profil Gender Bidang Pendidikan  |
| Bab VI   | Profil Gender Bidang Ketenagakerjaan   |
| Bab VII  | Profil Gender Bidang Politik, Pemerintahan dan Organisasi Kemasyarakatan   |
| Bab VIII | Profil Gender Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya   |
| Bab IX   | Kekerasan terhadap Perempuan   |
| Bab X    | Penutup  |

## BAB II

### KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, IPM, IPG, IDG DAN ISU GENDER DI KABUPATEN GARUT

#### 2.1. Kebijakan Pemberdayaan Perempuan

**D**alam proses pembangunan nasional, manusia sebagai sumberdaya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk memperkuat daya saing bangsa pembangunan nasional lebih mengedepankan kepada pembangunan kualitas hidup manusia disemua bidang agar memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan globalisasi serta mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.



Perempuan sebagai aset bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan. Pemberdayaan perempuan menjadi hal yang wajib dilakukan untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan diberbagai bidang kehidupan sehingga status, posisi dan kondisi perempuan dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. Melalui pemberdayaan maka diharapkan perempuan dapat meningkatkan akses, kontrol dan partisipasinya dalam proses sosial, ekonomi, politik dan hal lain yang bermanfaat sehingga dapat dinikmati oleh perempuan.

Pemberdayaan perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab IV tentang Urusan Pemerintahan menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan. Urusan Pemerintah Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) diantaranya meliputi : pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (poinb). Oleh karena itu pemerintah wajib mengurus soal pemberdayaan perempuan agar perempuan memiliki akses dalam pembangunan.

Pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota ini tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang tersebut. Dan untuk lebih jelasnya dikemukakan dalam table dalam tabel 2.1 di bawah ini:

**Tabel2.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota</li> <li>b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukun, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota</li> <li>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota</li> </ul>
2.	Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota</li> <li>b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota</li> <li>c. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota</li> </ul>
3.	Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota</li> <li>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota</li> <li>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota</li> </ul>
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten/kota
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota</li> </ul>

		b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota
<b>6.</b>	Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan bagian yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota

Sumber: Lampiran UU No 23 Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dikemukakan bahwa urusan pemerintahan daerah dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran serta menjamin perlindungan hak perempuan dan anak.

Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

- 1) Belum optimalnya kualitas hidup dan peran perempuan;
- 2) Adanya kesenjangan gender dalam hal aksesibilitas, manfaat, kontrol dan partisipasi pembangunan, terutama dalam bidang politik dan ekonomi;
- 3) Tingginya tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
- 4) Belum efektifnya kelembagaan, pelayanan, jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan anak (PUHA);
- 5) Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kebijakan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut diantaranya yaitu mewujudkan kebijakan responsif gender dalam berbagai bidang pembangunan, peningkatan pemahaman pengarusutamaan gender pada semua unit kerja/instansi, pengembangan model pembangunan berperspektif gender di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan partisipasi masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi perempuan dalam pengarusutamaan gender.

## 2.2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional menginstruksikan kepada semua lembaga pemerintah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-

masing. Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan di Daerah menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) di daerah adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam kegiatan pembangunan di daerah.

Instruksi Presiden dan Permendagri ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Semangat Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah menciptakan relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan serta untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dalam dan penguasaan terhadap proses pembangunan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara seimbang mulai dari tahap penegakan hak-hak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan, pengakuan dan penghargaan yang sama di masyarakat. Dengan demikian maka Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender, sesuai dengan Instruksi Presiden.

Intruksi presiden ini memunculkan momentum bagi kemajuan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender, yang belakangan ini diperluas hingga mencakup Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Ada pergeseran norma dan nilai sosial-budaya untuk lebih melindungi hak-hak perempuan dan laki-laki seperti yang tercermin dalam beberapa kebijakan dan program pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sehingga kepentingan perempuan dan laki-laki dapat diakomodir dan dapat menikmati hasil pembangunan secara berimbang.

Tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana yang tercantum dalam INPRES No 9 Tahun 2000 adalah memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi sebagai dampak dari bias gender, memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi dan kontrol yang sama terhadap pembangunan, dan meningkatkan sensitivitas gender dan memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses, berpartisipasi dalam serta memperoleh manfaat yang sama dalam pembangunan. Selain itu Pengarusutamaan Gender (PUG) ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan meratabagi seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan melakukan Pengarusutamaan Gender (PUG), maka dapat diidentifikasi kesenjangan gender, yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) hadir untuk mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) juga ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan. Hal ini menjadi lebih penting karena dilaksanakannya otonomi daerah, maka tantangan dan peluang untuk mewujudkan kesetaraan gender menjadi semakin besar.

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya Pengarusutamaan Gender (PUG) mensyaratkan dipenuhinya tujuh prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat. Secara lengkap, dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:

**Tabel2.2 Prasyarat PengarusutamaanGender**

No	Prasyarat PUG	Keterangan
-1	-2	-3
1.	Komitmen	Adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam rencana strategi (Renstra)
2.	Kebijakan	Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan yang tertuang dalam kebijakan, strategi, program, panduan, juklak/juknis dll.
3.	Kelembagaan	Adanya struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, focal point, forum, dan tim.
4.	Sumberdaya (SDM dan SumberDana)	Adanya sumber daya yang memadai, yaitu: - Sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisisgender. - Sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG danARG.
5.	Data Terpilah	Adanya sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin
6.	Alat Analisis	Adanya alat analisis, untuk kegiatan perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
7.	Partisipasi masyarakat	Adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG

Ketujuh prasyarat sebagaimana yang tercantum dalam tabel di atas pada pelaksanaannya saling berhubungan atau dengan kata lain tidak berdiri sendiri. Komitmen menjadi prasyarat utama yang kemudian dituangkan dalam kebijakan-kebijakan dan program agar mudah dilaksanakan. Dalam melaksanakan kebijakan diperlukan kelembagaan yang berfungsi untuk mengatur, menggerakkan dan mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Pelaksanaan PUG membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari sisi pemahaman konsep gender, keterampilan dalam melakukan analisis, maupun sensitifitas gender. Pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) juga harus didukung dengan sumber dana yang memadai, baik untuk kelembagaan PUG maupun untuk merespon kesenjangan gender. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah gender. Sebagai penerima manfaat dari kebijakan maka peran atau keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam prasyarat PUG.

Untuk mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai Strategi Nasional dan petunjuk pelaksanaannya yang ditandatangani oleh Menteri Bappenas ; Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tim Penggerak PPRG Nasional (Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender/Stranas PPRG, 2013). Stranas tersebut mewajibkan kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan persepektif gender dalam perencanaan dan penganggaran. Integrasi ini dilakukan dengan analisis gender dan menuangkannya dalam *Gender Budget Statement*(GBS).

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di era otonomi daerah, mengakibatkan tantangan yang cukup besar dari individu maupun lembaga baik secara internal maupun eksternal. Rendahnya pemahaman gender, terbatasnya data gender serta masih banyaknya peraturan yang bias gender menimbulkan kesenjangan yang makin jelas. Kesenjangan antara situasi faktual ketidakserataan dan ketidakadilan gender dengan berbagai kebijakan dan pelaksanaannya menunjukkan bahwa representasi kebijakan gender masih rendah. Oleh karena itu tantangan saat ini adalah untuk memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan memperbaiki kerangka perundang-undangan melalui kebijakan dan program, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam berbagai kehidupan.

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada pelaksanaannya yang masih rendah, hal ini ditunjukkan oleh masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan gender. Hal ini diperparah dengan persoalan lain seperti adanya belenggu patriarkhi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat yang menempatkan laki-laki kedudukannya lebih tinggi dari perempuan sehingga sulit bagaimana membebaskan perempuan dari konstruksi nilai patriarkhi.

Meskipun dalam perkembangannya belum signifikan, kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) terus didukung melalui beberapa kebijakan seperti:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan No 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang memasukan gender dalam anggaran atau Anggaran Resposif Gender (ARG).
- 2) Peraturan Menteri Keuangan No 119/PMK.02//2009 tentang *Gender Budget Statement* (GBS) sebagai komitmen dalam upaya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Secara umum penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di dalam proses perencanaan dan anggaran (Santoso, 2014:61-62) adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan responsive gender merupakan suatu proses perencanaan untuk menjawab isu-isu gender atau permasalahan gender dengan memasukan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program.
- 2) Penganggaran responsif gender meliputi : (1) Dalam proses perencanaan anggaran pada setiap lingkup pemerintah perlu keterlibatan (partisipasi) perempuan dan laki-laki secara aktif dan bersama-sama menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan; (2) Penggunaan anggaran mengarah pada pembiayaan program/kegiatan pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan; (3) Dapat membiayai kebutuhan-kebutuhan praktis gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki.

Kurangnya pemahaman tentang gender yang dibuktikan dengan adanya kesenjangan, diskriminasi, marjinalisasi dan yang lainnya. Rendahnya kepentingan yang berkaitan dengan gender ditunjukkan oleh para pemimpin daerah tidak memasukan gender sebagai kepedulian mereka. Ketidak lengkapan dukungan lembaga bagi pelaksanaan kebijakan gender menjadi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Masalah pada pemahaman tentang gender, memperlihatkan adanya kerancuan bahwa gender diartikan sebagai perempuan, sehingga hanya memperhatikan perempuan saja. Kemudian tidak semua lembaga yang berkaitan mampu memahami dan menerapkan maksud dan tujuan dari Pengarusutamaan Gender (PUG). Kondisi ini mengakibatkan semakin kuatnya isu-isu

gender yang ditemukan dan menjadi perhatian penting bagi para pengambil kebijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan khususnya di Kabupaten Garut.

### 2.3 Indeks Pembangunan Manusia(IPM)

Pembangunan manusia, menurut UNDP (*United Nation Development Program*), adalah proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choice of people*). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting dan saling berkaitan yaitu: panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan standar hidup yang layak. Penduduk



yang sehat bukan saja akan menunjang keberhasilan program pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk, demikian pula sebaliknya, kondisi penduduk yang berpendidikan dan mampu berdaya beli atau memiliki pendapatan maka akan berpengaruh pada tingkat kesehatan. Oleh karena itu, pilihan hidup sehat, berilmu pengetahuan, memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar hidup layak merupakan pilihan mendasar yang diinginkan oleh manusia.

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, berpendidikan dan menjalankan kehidupanyang produktif. Keberhasilan pembangunan dapat diukur dengan beberapa parameter dan paling populer saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh UNDP yang merupakan salah satu lembaga dari Perserikatan Bangsa- Bangsa pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya:

- 1) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusatperhatian.
- 2) Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- 3) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- 4) Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- 5) Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dari di suatu wilayah dari 3 (tiga) dimensi yaitu: (1) *a long and healthy life* (umur panjang dan hidup sehat); 2) *knowledge* (pengetahuan); dan 3) *a decent standard of living*

(standar hidup layak). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Sejak tahun 2010 UNDP merubah metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan komponen IPM yang digunakan Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran per kapita. Dalam metode yang lama beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. PDB per kapita sudah tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah Negara termasuk Negara maju, Negara berkembang, atau Negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Manusia, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu:

- 1)  $IPM < 50$  (rendah)
- 2)  $50 \leq IPM < 80$  (sedang/menengah)
- 3)  $IPM \geq 80$  (tinggi)

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,39. Angka ini meningkat sebesar 0,58 poin atau tumbuh sebesar 0,82 persen dibandingkan tahun 2017. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Garut, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini:

**Tabel 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020**

Komponen IPM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup (AHH)	70.34	70.39	70.43	70.47	70.49	70.69	70.76	70.84	71.03	71.22	71.39
Harapan Lama Sekolah (HLS)	10.36	10.52	10.85	11.71	11.62	11.65	11.69	11.73	11.80	11.82	11.94
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6.68	6.71	6.75	6.80	6.83	6.84	6.88	7.28	7.50	7.51	7,49
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (PPP)	6149.57	6195.46	6233.12	6354.52	6372.25	6875	7079	7270	7 579	8099	9400
Indeks Pembangunan Manusia	60.23	60.55	61.04	61.67	62.23	63.21	63.64	64.52	65.42	66,22	66.12
Pertumbuhan IPM	-	0.54	0.81	1.03	0.92	1.57	0.68	1.36	1.38	-	

Sumber: BPS Kabupaten Garut Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dikemukakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Garut dari tahun ke tahun mengalami kemajuan. Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Garut mencapai 65,42. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 1,38 persen dibandingkan tahun 2017. Hal ini menunjukkan dimensi kesehatan yang ditentukan oleh Angka harapan Hidup (AHH), dimensi pendidikan yang ditentukan oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk di Kabupaten Garut yang mengalami kenaikan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa derajat kesehatan, pendidikan dan pendapatan penduduk Kabupaten Garut mengalami perubahan kearah yang lebih baik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana yang dikemukakan di atas menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hanya sayangnya kualitas yang diukur melalui Indeks IPM masih belum cukup efektif memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian kapabilitas dasar dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Fenomena kesenjangan ini secara statistik dapat ditunjukkan oleh pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang nilainya lebih kecil dari pencapaian IPM, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/dinkota.

## **2.4 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Sejak penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami perubahan metode. Perubahan ini berdampak pada perubahan penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio IPM Perempuan dan IPM laki-laki. Penghitungan IPM terpisahkan gender ini membuat analisis kualitas pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan dapat dilakukan secara parsial. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dilakukan untuk melihat bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Sasaran pembangunan perspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah. Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki.

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan. Dewasa ini di Indonesia masih terdapat kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Secara nasional, pembangunan perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Dari tahun 2010, pembangunan laki-laki sudah berstatus "tinggi" dengan IPM di atas 70 sedangkan pembangunan perempuan masih dikisaran angka 60-an dan berstatus "sedang". Hal inilah yang menyebabkan IPG Indonesia masih berada dibawah 100 dalam kurun waktu 2010-2017. Meskipun demikian, peningkatan IPG merupakan suatu kemajuan dalam hal kesetaraan gender. Kemajuan ini disebabkan oleh komponen-komponen pembangunan perempuan terus tumbuh lebih cepat bahkan nilainya lebih tinggi dibanding laki-laki.

Komponen pembentuk IPG di bidang kesehatan, menunjukkan angka harapan hidup (AHH) perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Meskipun capaian perempuan dari sisi kesehatan dan pendidikan tidak terlalu tertinggal dari laki-laki, namun dari sisi ekonomi masih terjadi ketimpangan. Hal ini tercermin dari pendapatan perempuan yang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dengan menggunakan angka IPG, dapat diketahui perbedaan

pencapaian pembangunan manusia berbasis gender. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan gender.

Akses perempuan dalam bidang politik yang tercermin dari keterwakilan perempuan di parlemen menunjukkan nilai yang rendah. Sedangkan dalam dunia kerja, profesionalisme perempuan semakin mendekati laki-laki, terlihat dari semakin bertambahnya perempuan sebagai pejabat atau manajer dan tenaga profesional. Hal ini menggambarkan gap yang semakin kecil dengan laki-laki, namun demikian, jika dilihat dari upah pekerja masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan, yang tercermin dari kecilnya sumbangan pendapatan perempuan. Kondisi ini terjadi hampir disemua wilayah termasuk di Kabupaten Garut.

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sebagaimana yang terlihat dalam tabel 2.4 berikut di bawah ini:

**Tabel 2.4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Wilayah	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indonesia	90,34	91,03	90,82	90,96	90,99	91,07
	Jawa Barat	88,35	89,11	89,56	89,18	89,19	89,26
	Garut	81,25	81,33	-	81,96	82,42	82,54
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indonesia	70,68	70,83	71,39	71,74	72,10	75,24
	Jawa Barat	68,87	69,02	71,15	70,04	70,20	69,48
	Garut	63,33	63,21	-	65,63	64,67	68,23

Sumber: KPPA Tahun 2020

Dari tabel di atas bahwa Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Garut pada tahun 2014 sebesar 63,33 persen ada penurunan di tahun 2015 sebesar 0,12 Persen yaitu 63,21 dan pada tahun 2017 ada kenaikan sebesar 2,42 menjadi 65,63 persen.

Sedangkan untuk komponen Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.5. Komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Angka Harapan Hidup (AHH)**

Tahun	2015		2016		2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Indonesia	68,93	72,78	69,09	72,80	69,16	73,06	69,30	73,19	69,44	73,33
Jawa Barat	70,54	74,36	70,57	74,39	70,58	74,42	70,76	74,62	71,03	74,81
Garut	68,69	72,56	-	-	68,82	72,74	69,01	72,93	69,21	73,11

Sumber : KPPA Tahun 2020

Sedangkan untuk komponen Harapan Lama Sekolah (EYS) dijelaskan pada table 2.6 di bawah ini:

**Tabel2.6. Komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Harapan Lama Sekolah(EYS)**

Tahun	2015		2016		2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Indonesia	12,42	12,68	12,67	12,79	12,78	12,93	12,84	12,99	12,87	13,03
Jawa Barat	12,14	12,34	12,15	12,50	12,41	12,51	12,44	12,52	12,45	12,55
Garut	11,93	11,40	-	-	11,96	11,60	11,97	11,73	11,98	11,74

Sumber: KPPA Tahun 2020

Sedangkan untuk Rata-rata Lama Sekolah (MYS) di sajikan dalam tabel 2.7 dibawah ini:

**Tabel2.7. Komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Rata-rata Lama Sekolah (MYS)**

Tahun	2015		2016		2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Indonesia	8,35	7,35	8,41	7,50	8,56	7,65	8,62	7,72	8,81	7,89
Jawa Barat	8,36	7,35	8,37	7,52	8,59	7,69	8,60	7,71	8,83	7,90
Garut	7,25	6,32	-	-	7,63	6,83	8,94	8,28	9,21	8,35

Sumber: KPPA Tahun 2020

Dan untuk data pengeluaran kaitannya dengan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat di lihat pada tabel 2.8 di bawah ini:

**Tabel2.8. Komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Pengeluaran**

Tahun	2016		2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Indonesia	14,16	8,46	14,55	8,59	14,93	8,75	15,86	9,24
Jawa Barat	13,83	7,34	14,21	7,47	14,51	7,60	15,25	7,95
Garut	9,87	3,94	-	-	10,44	4,09	10,78	4,24

Sumber: KPPA Tahun 2019

Selanjutnya Komponen dalam Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel2.9. Komponen Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) Menurut Keterlibatan Perempuan diParlemen**

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
INDONESIA	17,32	17,32	17,32	19,48	19,48
JAWA BARAT	22,00	22,00	22,00	20,00	20,00
Garut	14,00	14,00	14,00	18,00	20,00

Sumber: KPPA Tahun 2019

Selanjutnya Komponen Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) Menurut Perempuan sebagai Tenaga Profesional dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.10. Komponen Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) Menurut Tenaga Profesional**

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
INDONESIA	45,61	46,03	47,59	46,31	47,02
JAWA BARAT	40,22		42,27	41,60	41,38
Garut	39,16	38,63	-	38,32	35,03

Sumber: KPPA Tahun2019

Dan Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) menurut Sumbangan Pendapatan Perempuan dapat di lihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel2.11. Komponen Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) Menurut Sumbangan PendapatanPerempuan**

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
INDONESIA	35,64	36,03	36,42	36,62	36,70
JAWA BARAT	28,41	29,03	29,07	29,45	29,51
Garut	30,59	30,96	-	31,40	31,43

Sumber: KPPA Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dikemukakan bahwa komponen dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Garut mengalami kenaikan walaupun tidak secara signifikan. Terpilihnya perempuan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Garut yang merupakan perempuan pertama yang memimpin parlemen merupakan bukti dari adanya kesetaraan dan keadilan gender. Disamping itu jumlah anggota legislatif perempuan dari hasil pemilu tahun 2019 sebanyak 9 orang membuktikan jumlahnya bertambah dari tahun tahun sebelumnya.

IDG terdiri dari tiga dimensi antara lain, keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi laki-laki dan perempuan, dan distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan. Dalamas pekpemberdayaan terutama keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, perempuan juga relatif tertinggal dibandingkan laki-laki. Ketertinggalan ini sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan apapun yang menyangkut kepentingan perempuan

baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kondisi ini mengakibatkan isu-isu gender masih menjadi "PR" bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

## 2.5 Isu Gender di Kabupaten Garut

Dahulu perempuan hanya dipandang sebagai makhluk yang hanya berurusan dengan pekerjaan rumah tangga. Padahal perempuan memiliki potensi yang sama baiknya dengan laki-laki, hanya perempuan kurang memiliki kesempatan karena terbentur oleh persoalan budaya serta stigma bahwa fungsi perempuan hanya terkait dengan fungsi-fungsi reproduksi. Sayangnya, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, swasta, dan organisasi social lainnya sangat kecil, mengingat masih terbatasnya perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan/managerial, administrasi, teknisi dan yang lainnya.

Identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki sebagaimana yang diuraikan di atas. Perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam



pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya pembangunan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis gender sebagai upaya untuk memberikan pemahaman tentang istilah atau konsep gender.

Istilah "gender" pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (Nugroho, 2008:2) untuk memisahkan pencirian manusia didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Ann Oakley (Nugroho, 2008:3) mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. Gender merupakan *behavior al differences* (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang.

Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan pada laki-laki. Menurut Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, mengemukakan konsep gender mengacu

pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat. Gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Gender dipahami sebagai perbedaan sifat, peran, fungsi, serta status antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh relasi sosial budaya dan struktur masyarakat yang lebih luas. Sedangkan perbedaan berdasarkan pada perbedaan biologis yang bersifat kodrati, universal, dan kekal yang disebut dengan jenis kelamin. Sebagai konstruksi sosial budaya, gender dapat berubah sesuai dengan tempat dan perkembangan zaman, serta berbeda antar kelompok masyarakat, kelompok umur, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan.

Pengertian gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin, masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan, hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi atau ketidakadilan terhadap perempuan sering terjadi jika dibandingkan dengan laki-laki.

Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari waktu ke waktu. Ada dua elemen gender yang bersifat universal (Gallery dalam Nugroho, 2008:6) yaitu: 1). Gender tidak identik dengan jenis kelamin; 2). Gender merupakan dasar dari pembagian kerjadi semua masyarakat. Dengan demikian maka gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu atau zaman, suku, ras, atau bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, ideologi negara, politik, hukum, dan ekonomi. Dengan demikian maka, gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat relatif.

Perbedaan istilah gender seringkali menyebabkan terjadinya ketidakadilan, misalnya seseorang tidak mendapatkan kesempatan memegang tanggung jawab tertentu karena berjenis kelamin perempuan/lakilaki, bukan karena kemampuan yang dimiliki. Atau seseorang diperlakukan rendah dan tidak mendapat fasilitas karena seseorang tersebut perempuan atau laki-laki. Seringkali dibutuhkan waktucukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial-ekonomi. Ketidakadilan atau kesenjangan gender ini terjadi di berbagai bidang pembangunan.

Ketidakadilan gender masih sering terjadi pada seluruh aspek kehidupan, kesenjangan gender dalam berbagai kesempatan dan kendali sumber daya, ekonomi dan partisipasi politik terjadi dimana-mana. Perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Oleh sebab itu kesetaraan gender merupakan persoalan pokok dalam tujuan pembangunan. Menurut Nugroho (2008:9), ketidakadilan gender dapat berupa: 1). Marginalisasi.

Proses marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di negara berkembang seperti pengusuran dari kampung halaman dan eksploitasi. Pemiskinan atas perempuan maupun laki-laki yang disebabkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender. Contohnya, banyak pekerja perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti internsifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki. Perempuan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan

keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki laki-laki. Selain itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umumnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki. Di Jawa misalnya, revolusi hijau memperkenalkan jenis padi unggul yang panennya menggunakan sabit. Pemupukan dan pengendalian hama dengan teknologi baru dilakukan oleh laki-laki, pekerjaan memotong padi dengan peralatan sabit dan mesin yang hanya membutuhkan tenaga dan keterampilan yang diasumsikan dimiliki oleh laki-laki, dan hal ini menyebabkan tergantikannya tenaga dan keterampilan perempuan dalam pertanian dengan alat panen ani-ani. Oleh karena itu tenaga perempuan diasumsikan lebih tepat digunakan untuk usaha konveksi dan peluang menjadi pembantu rumah tangga. 2).Sub-ordinasi.

Sub-ordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan sebagai sub-ordinasi dari kaum laki-laki. Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan. Sebagai contoh apabila seorang istri yang hendak mengikuti tugas belajar, atau hendak berpergian ke luar negeri harus mendapat izin suami, tetapi kalau suami yang akan pergi tidak perlu mendapat izin dari istri.



Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan bahwa permasalahan ketidakadilan gender, ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan antarlaki-laki dan perempuan di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia. Perbedaan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik secara langsung

maupun tidak langsung, dan dampak suatu peraturan perundang- undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan karena telah mengakar kuat dalam adat istiadat, norma, budaya maupun struktur masyarakat.

Agar perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki dapat terwujud, maka diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara psikis, politik dan sosial budaya yang dapat menghambat perempuan dan laki-laki untuk bias berperan dan menikmati hasil dari perannya tersebut. Kesetaraan gender adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan gender. Dengan demikian maka keadilan gender berarti suatu kondisi dimana tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antar laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kesetaraan gender dapat memperkuat kemampuan Negara untuk berkembang serta mengurangi kemiskinan. Kesetaraan Gender



(*Gender Equality*) adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati pembangunan. Mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari pembangunan dalam rangka menepis dan memecahkan isu gender selama ini.

Isu gender merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya. Perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada perempuan sebagai kelompok rentan dan “korban terbesar” akibat kekerasan juga masih relatif rendah.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa dampak dari pelaksanaan pembangunan belum mempertimbangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Diperlukan suatu system yang terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi isu gender seperti tersebut di atas. Kebijakan pengarusutamaan gender merupakan suatu keputusan dan aturan yang dibuat untuk mengatasi masalah ketidakadilan pada perempuan. Upaya pengarusutamaan gender baik di sektor pemerintah maupun non-pemerintah saat ini masih terfokus pada peningkatan partisipasi perempuan dan tidak terfokus secara luas pada persoalan hak asasi manusia, kemajuan dan pemberdayaan, dan disparitas peluang ekonomi antara perempuan dan laki-laki.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan control atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Kondisi ini dalam pencapaiannya masih belum optimal, hingga saat ini isu gender masih terjadi dimana-mana, hal ini dapat dilihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia termasuk di Kabupaten Garut.

Di Kabupaten Garut saat ini sudah ada kemajuan yang pesat dalam kesetaraan gender melalui pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender. Hal ini dapat dilihat dari kondisi kinerja pemerintahan Kabupaten Garut khususnya Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana yang tertera dalam table 2.9 berikut di bawah ini:

**Tabel 2.12 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>											
<b>LAYANAN UMUM WAJIB DASAR</b>											
2	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>										
<b>2.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>											
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49,34	49,34	50	50	50	50	50	50	Dinas P2KBP3A
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	14	14	14	14	14	14	14	14	Dinas P2KBP3A
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	37,33	39,53	41,73	43,93	46,13	48,33	50,53	50,53	Dinas P2KBP3A
4	Rasio KDRT	%	0,023	0,022	0,021	0,020	0,019	0,018	0,017	0,016	Dinas P2KBP3A
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	3,90	3,60	3,30	3,00	2,70	2,40	2,10	2,10	Dinas P2KBP3A
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	22,63	24,63	26,63	28,63	30,63	32,63	34,63	34,63	Dinas P2KBP3A
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P2KBP3A
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P2KBP3A

	PPT/PKT di Rumah Sakit										
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P2KBP3A
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P2KBP3A
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P2KBP3A
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P2KBP3A
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P2KBP3A
18	Rasio melek huruf perempuan terhadaplaki-laki padakelompok usia 15-24tahun	%	99,03	99,13	99,23	99,33	99,43	99,53	99,63	99,73	Dinas P2KBP3A
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	%	24,05	26,25	28,45	30,65	32,85	35,05	37,25	37,25	Dinas P2KBP3A
<b>2.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>											
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	Dinas P2KBP3A
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,36	2,35	2,34	2,33	2,32	2,31	2,30	2,30	Dinas P2KBP3A
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam	%	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas P2KBP3A

	Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB											
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas P2KBP3A
5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	Perda	-	-	-	-	-	-	1 Perda	1 Perda		Dinas P2KBP3A
6	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	Dinas/Badan/Kantor	-	-	8 Dinas	8 Dinas	8 Dinas	8 Dinas	8 Dinas	8 Dinas		Dinas P2KBP3A
7	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	3 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	6 Sekolah	6 Sekolah		Dinas P2KBP3A
8	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	2,85	2,83	2,81	2,77	2,73	2,69	2,65	2,65		Dinas P2KBP3A
9	Ratio Akseptor KB	%	72,86	70,44	68,02	68,72	69,42	70,12	70,82	70,82		Dinas P2KBP3A
10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	72,86	70,44	68,02	68,72	69,42	70,12	70,82	70,82		Dinas P2KBP3A
11	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR15-19)	Angka	49/1000	49/1000	49/1000	49/1000	48.87/1000	48.80/1000	48/1000	48/1000		Dinas P2KBP3A
27	Persentase Remaja yang	%	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas P2KBP3A

	Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)										
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga, Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	%	1,22	1,22	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,45	Dinas P2KBPP3A

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Garut 2020

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) diKabupaten pada saat ini sudah dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Intruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang pelaksanaanya dibawah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) dengan beberapa kebijakan dan program kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Kekerasan.

Kebijakan ini adalah salah satu bukti Pemerintah Daerah berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan dengan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan fasilitasi upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

- 2) Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS).

Program yang paling nampak nyata dalam membangun kesetaraan gender di Kabupaten Garut adalah Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Program ini dilaksanakan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera serta meningkatkan kedudukan, peran, kemampuan, ketahanan mental dan spiritual kaum perempuan melalui kegiatan lintas sektoral bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat pedesaan.



Bunda Literasi Kab. Garut Hj. Diah Kurniasari meraih Juara 2 Lomba Mendongeng pada Festival Literasi bersama Bunda Literasi Prov. Jawa Barat dan para bunda Literasi Kab/ Kota se-Jawa Barat di Gd. Sate Bandung, Sabtu (20/4/2019)

Tujuan dilaksanakan program terpadu Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yaitu: (1) meningkatkan keterampilan, kreatifitas dan kemandirian wanita dalam melihat peluang dan menyelesaikan masalah; (2) meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan; (3) Meningkatkan peran wanita untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera; dan (4) meningkatkan keadaan ekonomi dan kesejahteraan. Melalui Program Terpadu P2WKSS diharapkan ini dapat merubah sikap perempuan dalam meningkatkan kesehatan,

ekonomi, keluarga berencana, serta dapat menggali potensi yang ada kearah yang lebih baik serta dapat meningkatkan kualitas diri perempuan.

3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Sabilulungan yang berbasis kemitraan dengan Organisasi Perempuan di



Gedung Lasminigrat Jalan Ahmad Yani Kecamatan Garut Kota. Pembuatan Puspaga ini sebagai langkah preventif guna mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bukan hanya perselisihan antar suami dengan istri, tetapi juga yang berpotensi melibatkan anak sebagai korbannya. Puspaga merupakan inovasi yang bertekad meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak,

dimana sasarannya seluruh komponen masyarakat. Puspaga ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mengangkat keluarga sekaligus mengangkat kesetaraan gender. Kegiatan lainnya adalah fasilitasi Penyelenggaraan Terpadu Pengesahan Itsbat Nikah, Pencatatan Pernikahan dan Layanan Pembuatan Akta Kelahiran Anak.

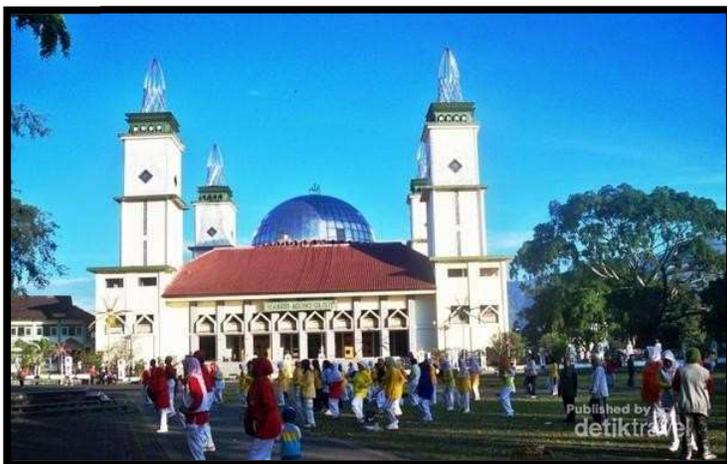
4) Penyelenggaraan Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita atau Sekoper Cinta, yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat bersama Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada Desember 2018 menjadi program pembangunan pemberdayaan perempuan berikutnya yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Garut. Sekoper Cinta hadir sebagai wadah perempuan bertukar pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas hidup. Sekoper Cinta juga sebagai upaya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki di semua bidang. Melalui program Sekoper Cinta ini, maka diharapkan isu-isu gender dapat teratasi.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM KABUPATEN GARUT

#### 3.1 Kondisi Geografis

**K**abupaten Garut secara geografis berdekatan dengan Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, merupakan daerah penyangg bagi pengembangan wilayah Bandung Raya. Oleh karena itu Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok kebutuhan warga Kota dan Kabupaten Bandung, sekaligus berperan di dalam mengendalikan keseimbangan lingkungan.



Kabupaten Garut yang mempunyai luas wilayah sekitar 3.065,19 Km<sup>2</sup>. secara geografis terletak diantara 6°57'34" – 7°44'57" Lintang Selatan dan 107°24'3" – 108°24'34" Bujur Timur dengan batas wilayah: sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang; sebelah Timur berbatasan

Dengan Kabupaten Tasikmalaya; sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Ibu kota Kabupaten Garut berada pada ketinggian 717 m di atas permukaan laut (DPL) dikelilingi oleh Gunung Karacak (1838 m), Gunung Cikuray (2821 m), Gunung Papandayan (2622m) dan Gunung Guntur (2249m). Karakteristik topografi Kabupaten Garut sebelah Utara terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan, sedangkan bagian Selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki tingkat kecuraman yang terjal dan di beberapa tempat labil.

Rangkaian pegunungan vulkanik yang mengelilingi dataran antar gunung, di Garut Utara umumnya memiliki lereng dengan kemiringan 30-45° disekitar puncak, 15-30° dibagian tengah dan 10-15° di bagian kaki lereng pegunungan. Lereng gunung tersebut umumnya ditutupi vegetasi cukup lebat karena sebagian diantaranya merupakan kawasan konservasi alam.

Pada wilayah Kabupaten Garut terdapat 34 aliran sungai ke utara, dan 19 aliran sungai ke Selatan. Berdasarkan interpretasi citra landsat Zona Bandung, nampak bahwa pola aliran sungai yang berkembang di wilayah dataran antar gunung Garut Utara menunjukkan karakter mendaun, dengan arah aliran utama berupa sungai Cimanuk menuju ke utara. Aliran Sungai Cimanuk dipasok oleh cabang-cabang anak sungai yang berasal dari lereng pegunungan yang mengelilinginya. Secara individual, cabang-cabang anak sungai tersebut merupakan sungai-sungai muda yang membentuk pola penyaliran sub-paralel, yang bertindak sebagai sub sistem dari DAS Cimanuk.

Berdasarkan letak geografi dan topografi wilayah, dari 424 desa, 19 desa di Kabupaten Garut merupakan desa pesisir, sedangkan 405 lainnya bukan desa pesisir yang meliputi 4 desa

Yang berada di lembah /DAS, 195 desa berada di lereng / punggung bukit dan 206 desa berada di wilayah dataran.

Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Garut dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (*humid tropical climate*) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen. Berdasarkan studi data sekunder, iklim dan cuaca di daerah Kabupaten Garut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu pola sirkulasi angin musiman (*monsoonal circulation pattern*), topografi regional yang bergunung-gunung dibagian tengah Jawa Barat; dan elevasi topografi di Bandung. Curah hujan rata-rata tahunan di sekitar Garut berkisar antara 2.589 mm dengan bulan basah 9 bulan dan bulan kering 3 bulan, sedangkan di sekeliling daerah pegunungan mencapai 3500-4000 mm. Variasi temperatur bulanan berkisar antara 24°C -27°C.

### 3.2 Kondisi Demografis

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.

Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya. Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden dan juga melalui esensus.

Pencatatan penduduk menggunakan konsep usual residence, yaitu konsep di mana penduduk biasa bertempat

tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus pada malam 'Hari Sensus'. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/ rumah apung, masyarakat



terpencil/ terasing, dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang bepergian ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya, tetapi dicacah di tempat tujuannya. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk.

Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 menggunakan data dasar penduduk hasil SP2010.

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu.

Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan Antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan. Komposisi penduduk adalah pola persebaran penduduk menurut karakteristiknya, contoh: penduduk menurut kelompok umur, penduduk menurut jenis kelamin Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadisuatu.

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal disuatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada. Rata-rata anggota rumah tangga adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga per rumahtangga.

Jumlah penduduk Kabupaten Garut tahun 2020, tercatat sebesar 2.585.607 jiwa yang terdiri dari 1.324.971 penduduk laki-laki dan 1.260.636 penduduk perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Garut selama 10 tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,95 persen per tahun. Di lain sisi, jumlah rumahtangga di Kabupaten Garut pada tahun 2017 mencapai 643.979 rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sekitar 4 jiwa.

Dengan wilayah seluas 3.065,19 Km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di Kabupaten Garut pada tahun 2019 telah mencapai 844 jiwa/Km<sup>2</sup>, atau mengalami peningkatan 6 jiwa/Km<sup>2</sup> dibandingkan tahun 2016. Tarogong Kidul merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yang mencapai 5.907,76 jiwa/Km<sup>2</sup>, disusul Kecamatan Garut Kota dengan kepadatan 4.604,22 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Sedangkan tingkat kepadatan terendah tercatat pada Kecamatan Pamulihan dengankepadatan yang hanya sebesar 140,38 jiwa/Km<sup>2</sup>. Dengan membandingkan hasil sensus penduduk sejak tahun 1961, walaupun jumlah penduduk Kabupaten Garut mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun trend laju pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan. Laju Pertumbuhan Penduduk(LPP) rata-rata pertahun di Kabupaten Garut pada periode 1961-1971 masih cukup tinggi, yakni sebesar 2,74 persen, mengalami penurunan pada dekade-dekade berikutnya sampai 1,59 persen pertahun pada dekade terakhir. Hal yang perlu menjadi catatan adalah selama 5 dekade jumlah penduduk Kabupaten Garut mengalami peningkatan lebih dari dua setengah kalilipat.

### **3.3 Kondisi Pemerintahan**

Kabupaten Garut dengan luas wilayah 306.519 Ha, secara administratif terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa yang terbagi kedalam 15.606 SLS terkecil (RT). Selain memiliki beban kerja yang cukup besar dengan luas wilayah, jumlah kecamatan dan desa

relatif tinggi, dari sisi kontrol pemerintahan, Kabupaten Garut memiliki rentang kendali yang relatif tinggi, dimana jarak terjauh dari pusat pemerintahan berada di kecamatan paling selatan, Talegong, dengan jarak tempuh sebesar 146 Km dan waktu tempuh kurang lebih 5 jam. Sedangkan Malangbong yang merupakan kecamatan paling utara memiliki jarak dan waktu tempuh masing-masing sebesar 46 Km dan 1,5 jam.

Dari sisi ketersediaan perangkat daerah, jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut pada tahun 2019 ada sebanyak 16.312 orang, meliputi 8.264 laki-laki dan 8.048 perempuan, yang tersebar di 34 unit kerja dan 42 kecamatan. Dengan demikian rasio ketersediaan PNS per 1000 penduduk, yang merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan publik, adalah sebesar 6 PNS per 1000 penduduk. PNS menurut golongan terbanyak ada pada golongan IV yakni sebanyak 7.708 orang dan terkecil golongan I sebanyak 122 orang. Selanjutnya, hal yang juga berkontribusi terhadap kualitas pelayanan adalah sebaran PNS menurut tingkat pendidikan. Kualitas SDM pelayanan publik di lingkungan Pemda Kabupaten Garut dapat dikatakan cukup baik, ini tampak dari sebagian besar PNS telah lulus pendidikan tinggi (D1 ke atas), yakni dengan porsi sebesar 82,99persen.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut pada tahun 2019 menyerap anggaran sebesar Rp 4.372,22 miliar seperti tampak pada realisasi APBD kabupaten tersebut. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, belanja dan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Garut mengalami peningkatan sebesar 18,44 persen.

Secara umum, dana untuk belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Garut bersumber dari pendapatan daerah yang masih sebagian besar disumbang oleh dana perimbangan yang mencapai Rp 2.659,11 miliar, atau 60,11 persen dari total pendapatan daerah tahun 2019. Sedangkan PAD Kabupaten Garut hanya menyumbang sebesar 15,67 persen, atau sebesar Rp 693,41 miliar. Walaupun demikian jika dibanding tahun sebelumnya, PAD Kabupaten Garut mengalami peningkatan, yakni 79,49 persen.

Peta perpolitikan Kabupaten Garut, hasil Pemilu 2014, terjadi perubahan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Pada periode 2014 - 2019, parlemen (DPRD) di Kabupaten Garut didominasi oleh partai Golkar diikuti oleh PDI-P dan PPP, selanjutnya diikuti oleh empat partai dengan perolehan kursi yang sama masing-masing 5 kursi, yaitu PKB, Demokrat, PAN dan Hanura. Sedangkan untuk PKS dan Gerindra 4 kursi, dan partai Nasdem 2 kursi. Jumlah anggota DPRD yang berasal dari fraksi Golkar sebanyak 8 orang dan PDIP, PPP masing-masing sebanyak 6 orang.

### **3.4 Kondisi Ketenagakerjaan**

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).

Situasi ketenagakerjaan di Kabupaten Garut pada tahun 2019 ditandai dengan meningkatnya angkatan kerja baru, sehingga pada tahun ini total angkatan kerja mencapai 1.801.509 jiwa, atau 62,92 persen dari total penduduk usia kerja yang mencapai 1.133.248

jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Garut mengalami peningkatan selama periode 2008-2017, yakni sebesar 3,12 persen.

Dari sisi pasar tenaga kerja, terjadi peningkatan yang bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang cukup signifikan di tahun 2017, yakni dari 10,98 persen menjadi 7,86 persen. Walaupun terlihat masih cukup tinggi, namun jika dibandingkan dengan angka provinsi, TPT Kabupaten Garut relatif rendah, dimana TPT Jawa Barat pada tahun yang sama mencapai 8,72 persen.

Selanjutnya jika ditinjau dari lapangan usaha, untuk tahun 2017 sektor perdagangan sangat mendominasi bursa tenaga kerja, terjadi sedikit peningkatan jika dibandingkan tahun 2015. Di tahun 2017 sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 28,26 persen, hal ini terjadi karena kemarau yang cukup panjang yang terjadi dari bulan Mei 2017, sedangkan tiga sektor penting lainnya, yakni sektor industri; sektor jasa-jasa dan sektor lainnya berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja masing-masing sebesar 16,72 ; 12,12 dan 15,68 persen. Yang menjadi catatan di tahun 2017 terhadap tahun sebelumnya adalah, terjadinya peningkatan serapan tenaga kerja hampir pada semua sektor, kenaikan tertinggi di sektor Lainnya yaitu sebesar 4,11 persen, kecuali sektor jasa-jasa terjadi penurunan kontribusi.

Angka pengangguran yang tinggi terutama dialami kaum muda yang baru menyelesaikan pendidikan lanjutan, yang kebanyakan berasal dari masyarakat kota kelas menengah. Aspirasi akan pekerjaan "kantoran" disektor modern dianggap sebagai sebab utama pengangguran yang dialami kelompok ini dan berhubungan dengan lambatnya pertumbuhan lapangan pekerjaan baru yang dapat memenuhi harapan mereka.

Disisilain, pada tahun 2016, pencari kerja yang baru mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut tercatat 27.147 orang yang meliputi 11.428 laki-laki dan 16.286 perempuan. Hal ini menunjukkan banyak kaum muda yang baru lulus menyelesaikan pendidikan baik itu tingkat dasar, menengah dan pendidikan tinggi masih mencari pekerjaan yang di idam-idamkan.

Menarik untuk disimak berdasarkan data di atas ternyata kaum perempuan lebih banyak yang mendaftar di banding kaum laki-laki. Data tersebut menunjukkan, kaum perempuan sekarang lebih berminat untuk bekerja di sektor formal dan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga saja.

### 3.5 Kondisi Pendidikan

Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah atau belum pernah aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal. Termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.

Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan formal dan nonformal (Paket A, B, atau C), baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi.



Bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah. Tidak bersekolah lagi adalah mereka yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal dan nonformal (Paket A, B, atau C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif mengikuti pendidikan.

Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian akhir dan lulus dianggap tamat sekolah.

Dapat membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis kata-kata/ kalimat sederhana dengan suatu aksara tertentu.

Jalur Pendidikan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri atas:

- 1) Pendidikan formal;
- 2) Pendidikan nonformal; dan
- 3) Pendidikan informal yang ketiganya dapat saling melengkapi dan memperkaya

Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

- 1) Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- 2) Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- 3) Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

Kabupaten Garut merupakan daerah yang memiliki dimensi pengetahuan relatif besar jika dibanding beberapa Kabupaten di Propinsi Jawa Barat yakni diatas Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Subang, Cirebon, Indramayu. Sampai dengan tahun 2017, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun keatas di Kabupaten Garut mencapai 7,28 tahun atau setara dengan kelas VII.

Sementara anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 11,73 tahun atau hampir setara dengan lulusan SMA. Derajat pendidikan disuatu kabupaten sangat tergantung dari tingkat kecukupan dan keterjangkauan fasilitas dan tenaga pendidik di kabupaten bersangkutan. Tingkat kecukupan fasilitas dan tenaga pendidik berhubungan dengan rasio-rasio jumlah murid terhadap fasilitas dan tenaga pendidik. Sedangkan tingkat keterjangkauan berhubungan dengan penyebaran fasilitas dan tenaga pendidikan tersebut.

Jumlah sekolah pada jenjang SD/MI mengalami penurunan dari 1.827 unit menjadi 1.819 unit tenaga pengajar turun dari 16.514 menjadi 16.203 orang. Demikian pula dengan jumlah sekolah pada jenjang SLTP mengalami turun dari 640 unit menjadi 616 unit. Rasio Murid terhadap Guru pada tahun 2017 terbesar adalah pada jenjang SD/MI yaitu 19,61, sedangkan terkecil pada jenjang SMU/MA yaitu 14,35.

Pengaruh langsung dari kenaikan tingkat kecukupan fasilitas dan tenaga pengajar adalah pada peningkatan angka partisipasi sekolah (APS) di masyarakat. Kendati demikian, APS tidak mutlak hanya dipengaruhi hal di atas, namun juga oleh tingkat responsibilitas masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas tersebut. Tingkat respon masyarakat sangat dipengaruhi oleh daya beli dan kultur di masyarakat. Beberapa program telah digulirkan oleh Pemerintah agar dapat mendongkrak derajat pendidikannya seperti Program Keluarga Harapan. Pada periode 2015-2017 tampak partisipasi sekolah pada penduduk umur SD mengalami peningkatan. APS penduduk usia SD (7-12 tahun) mengalami peningkatan dari 98,78 persen menjadi 99,6 persen. Demikian pula dengan APS penduduk usia SLTP (13-15 tahun) meningkat dari 87,05 menjadi 93,3 persen.

Gambaran tersebut merupakan indikasi keberhasilan Program Wajib Belajar 9 tahun yang digulirkan oleh Pemerintah. APS pada penduduk usia SLTA (16-18 tahun) tampak mengalami peningkatan pada periode yang sama, yakni dari 51,71 tahun 2015 menjadi 64,1 persen di tahun 2017.

### 3.6 Kemiskinan

Salah satu faktor yang secara makro sangat berpengaruh terhadap kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan di wilayah bersangkutan. Semakin tinggi tingkat kemiskinan akan berpengaruh pada rendahnya daya beli masyarakat yang tentunya akan menyebabkan rendahnya respon masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan maupun pendidikan yang ada di wilayah tersebut.

Tekanan inflasi yang dipicu oleh kenaikan BBM yang sangat tinggi di akhir tahun 2005 tampak berdampak sangat signifikan terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut. Pada tahun 2006 persentase Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 19,10 persen, atau meningkat sekitar 2 persen dibandingkan tahun



sebelumnya. Kendati demikian, sejalan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan oleh Pemerintah, persentase penduduk miskin di Kabupaten Garut kembali mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya.

Sampai dengan tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut tercatat sebesar 291,2 jiwa, atau dengan persentase 11,27 persen. Angka kemiskinan tersebut masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Jawa Barat yang hanya sebesar 7,83 persen. Walaupun demikian, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut pada tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebesar 325,7 jiwa atau dengan persentase 12,81 persen.

## BAB IV

### PROFIL GENDER BIDANG KESEHATAN

S  
S

Sehat adalah suatu kondisi terbebasnya tubuh dari gangguan fisik maupun mental. Sehat juga diartikan sebagai keadaan di mana ketika seseorang diperiksa oleh ahlinya tidak mempunyai keluhan ataupun tidak terdapat tanda-tanda penyakit atau kelainan. Menurut *World Health Organization*, sehat adalah suatu keadaan yang lengkap meliputi kesejahteraan fisik, mental, sosial dan bukan hanya dalam arti bebas dari penyakit, cacat atau kelemahan. Sedangkan kesehatan menurut Undang-Undang No 36 Tahun

2009, adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Belum meratanya fasilitas dan tenaga kesehatan yang tersedia di setiap daerah di Kabupaten Garut merupakan permasalahan yang paling mendasar. Selain itu masih tingginya pembiayaan yang harus ditanggung oleh masyarakat dalam mengobati keluhan kesehatan tertentu juga menambah daftar permasalahan kesehatan. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut pemerintah



telah melakukan pembangunan di bidang kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan mulai dari merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009

Pengawasan dan evaluasi memerlukan data dan informasi yang akurat. Karena dari data dan informasi tersebut dapat dilihat apakah program pembangunan yang dilaksanakan telah bermanfaat bagi masyarakat atau belum dan apakah program yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan yang direncanakan. Data dan informasi tersebut biasanya berupa indikator-indikator yang berkaitan dengan kesehatan. Beberapa indikator yang dapat digunakan diantaranya: (1) angka harapan hidup; (2) status kesehatan penduduk yang diukur melalui akses ke pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyakit yang diderita oleh masyarakat dan kelahiran yang ditolong oleh nonmedis.

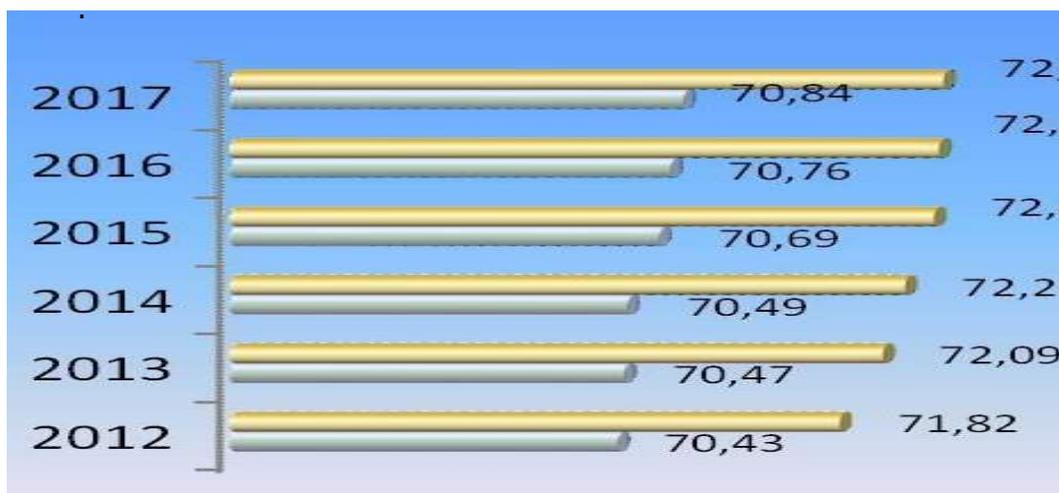
#### 4.1. Angka Harapan Hidup

Kualitas hidup manusia, salah satunya terlihat dari derajat kesehatannya. Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah dapat digambarkan oleh indikator angka harapan hidup (AHH) yang merupakan salah satu komponen IPM yang merupakan ukuran kualitas hidup penduduk secara makro. Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Garut selama kurun waktu 2012 - 2017 dengan menggunakan metode baru mengalami perkembangan cukup positif yang tampak dari peningkatan capaian AHH yang relatif konsisten.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten Garut, AHH Kabupaten Garut terlihat masih dibawah. Pada tahun 2017, AHH masyarakat di Kabupaten Garut mencapai 70,84 tahun, terput 1,63 tahun dibawah angka yang telah mencapai 72,47 tahun. Kondisi tersebut merupakan indikasi bahwa masih relatif rendahnya tingkat kesehatan di Kabupaten Garut secara makro.

Faktor yang langsung berdampak pada penurunan capaian AHH adalah masih banyaknya kasus-kasus Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Garut. Salah satu penyebab tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) yakni masih tingginya usia perkawinan pertama perempuan. Di Kabupaten Garut persentase perempuan menurut usia perkawinan pertama berumur kurang dari atau sama dengan 16 tahun masih mencapai angka 20,26 persen menurun di banding tahun sebelumnya bergeser ke usia di atasnya. Hal ini cukup meningkatnya usia perkawinan pertama yang menggambarkan pula dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup.

Faktor lain yang menyebabkan tingginya AKB adalah masih tingginya proses kelahiran bayi yang ditolong oleh tenaga non medis. Proses kelahiran yang ditolong oleh tenaga non medis selain beresiko pada kematian bayi, beresiko juga pada kematian ibu. Persentase proses kelahiran yang ditolong oleh tenaga non medis masih cukup tinggi dan perkembangannya berfluktuasi pada periode 2010-2017. Setelah mengalami penurunan di tahun 2014, pada tahun 2015 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 30,09 persen. Akan tetapi pada tahun 2016 naik kembali menjadi 32,39 persen. Pada tahun 2017 turun kembali menjadi 26,52 persen. Masih tingginya proses kelahiran yang ditolong oleh non medis salah satunya oleh tingkat pengetahuan ibu tentang kelahiran yang relatif rendah, khususnya bidang kesehatan, yang kemungkinan disebabkan karena banyaknya kasus-kasus perkawinan dini. Selain tingginya AKB dan AKI, resiko lainnya akibat rendahnya pengetahuan ibu adalah tingginya balita yang berstatus gizi kurang dan bahkan buruk. Berikut ini tersaji AHH di Kabupaten Garut



Sumber: BPS Kabupaten Garut dalam Angka Tahun 2020

**Gambar4.1. Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Garut (Tahun) Selama Kurun Waktu 2012 –2017**

Pada tahun 2012, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Garut sebesar 70,43 tahun. Pada tahun 2017 angkanya naik menjadi 70,84 tahun. Berarti AHH penduduk Kabupaten Garut rata-rata di usia 70 tahunan.

## 4.2 Status Kesehatan Penduduk

Seberapa baik status kesehatan penduduk dapat diukur melalui Akses Ke Pelayanan Kesehatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan senaran penyakit yang sering di derita oleh masyarakat di Kabupaten Garut.

### 4.2.1 Akses Ke Pelayanan Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, satu hal penting yang harus diupayakan oleh pemerintah adalah adanya kemudahan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang memadai oleh masyarakat. Kemudahan akses ke pelayanan kesehatan meliputi kemudahan dalam menjangkau fasilitas kesehatan, kesamaan mendapatkan pelayanan oleh petugas kesehatan tanpa membedakan status sosial, meratanya petugas kesehatan, baik itu dokter, bidan atau petugas medis lainnya sampai dengan wilayah yang terpencil, lalu adanya jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin, dan lain-lain.

Terjaminnya persediaan obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat juga merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Bahkan untuk masyarakat yang akan mengobati sendiri keluhan kesehatan yang dideritanya dapat dengan mudah mendapatkan obat yang diinginkan. Mengobati sendiri adalah upaya dari penduduk yang melakukan pengobatan dengan menentukan jenis obat sendiri. Jenis obat bukan hanya obat modern tetapi bisa juga menggunakan obat tradisional.

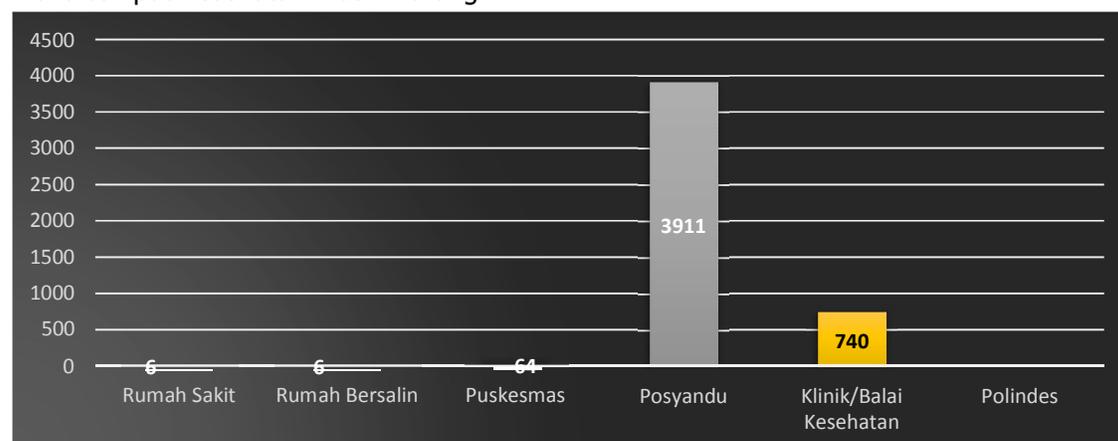
**Tabel 4.1 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut, 2020**

No.	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik/Balai Kesehatan	Polindes
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
1	Cisewu	-	-	1	64	8	5
2	Caringin	-	1	1	52	6	-
3	Talegong	-	-	1	44	5	1
4	Bungbulang	-	-	1	108	17	2
5	Mekarmukti	-	-	1	38	4	1
6	Pamulihan	-	-	2	37	10	1
7	Pakenjeng	-	-	2	96	20	-
8	Cikelet	-	-	2	74	20	-
9	Pameungpek	1	-	1	91	17	1
10	Cibalong	-	-	2	97	13	2
11	Cisompet	-	-	1	106	7	8
12	Peundeuy	-	-	1	59	6	-
13	Singajaya	-	-	1	64	10	4
14	Cihurip	-	-	1	28	4	-
15	Cikajang	-	-	1	103	23	2
16	Banjarwangi	-	-	1	81	5	4
17	Cilawu	-	-	2	162	31	2
18	Bayongbong	-	-	2	160	26	2
19	Cigedug	-	-	1	65	5	1
20	Cisurupan	-	-	2	102	36	8

No.	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik/Balai Kesehatan	Polindes
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
21	Sukaresmi	-	-	1	52	7	-
22	Samarang	-	-	1	129	22	6
23	Pasirwangi	-	-	2	105	6	2
24	Tarogong Kidul	2	-	3	168	60	1
25	Tarogong Kaler	-	-	3	142	35	-
26	Garut Kota	1	-	3	219	63	-
27	Karangpawitan	2	-	3	233	26	2
28	Wanaraja	1	-	1	70	16	1
29	Sucinaraja	-	-	2	62	11	-
30	Pangatikan	-	-	1	80	17	-
31	Sukawening	-	-	3	113	20	-
32	Karagtengah	-	-	1	50	3	-
33	Banyuresmi	-	-	3	138	21	1
34	Leles	-	-	2	87	26	4
35	Leuwigoong	-	-	2	79	7	2
36	Cibatu	-	-	1	138	21	4
37	Kersamanah	-	-	1	57	13	-
38	Cibiuk	-	-	1	56	6	-
39	Kadungora	-	-	2	133	25	-
40	Blubur Limbangan	-	-	1	147	21	-
41	Selaawi	-	-	1	67	12	-
42	Malangbong	1	-	2	148	29	2
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>1</b>	<b>67</b>	<b>4,140</b>	<b>740</b>	<b>69</b>

Sumber : BPS Kabupaten Garut dalam Angka Tahun 2021

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Garut cukup baik hal ini di buktikan dengan jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebanyak 67 unit artinya bahwa disetiap kecamatan sudah tersedia minimal satu Puskesmas disetiap kecamatan, sedangkan untuk ini kalau Balai Kesehatan sebanyak 740 unit dan disetiap kecamatan terdapat klinik / balai kesehatan. Artinya bahwa jangkauan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Garut sudah cukup baik, namun jika di bandingkan dengan jumlah penduduk dan wilayah Kabupaten Garut yang cukup luas maka tempat Kesehatan masih kurang.



**Gambar 4.2 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut, 2020**

#### 4.2.2 Tenaga Kesehatan

Sedangkan untuk jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Garut kami sajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut, 2020**

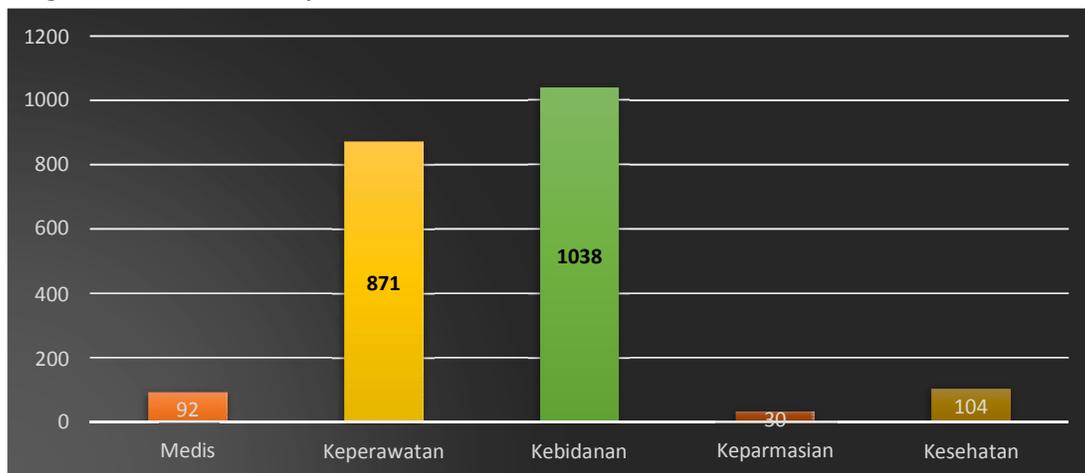
No	Kecamatan	Tenaga Medis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1	Cisewu	1	14	14	-	1
2	Caringin	1	6	18	1	1
3	Talegong	1	14	12	-	1
4	Bungbulang	2	22	23	-	2
5	Mekarmukti	-	16	12	1	3
6	Pamulihan	-	15	20	-	1
7	Pakenjeng	1	37	31	-	2
8	Cikelet	1	23	35	-	1
9	Pameungpeuk	2	32	25	1	1
10	Cibalong	1	23	28	-	1
11	Cisompet	1	13	17	1	3
12	Peundeuy	-	10	14	-	1
13	Singajaya	3	17	19	2	3
14	Cihurip	-	9	7	1	1
15	Cikajang	3	17	24	-	3
16	Banjarwangi	1	6	15	-	2
17	Cilawu	1	24	32	1	4
18	Bayongbong	3	32	45	1	4
19	Cigedug	1	9	16	-	4
20	Cisurupan	3	23	37	1	3
21	Sukaesmi	2	11	21	1	3
22	Samarang	2	20	34	-	2
23	Pasirwangi	-	24	26	1	3
24	Tarogong Kidul	7	32	31	1	4
25	Tarogong Kaler	8	40	42	1	4
26	Garut Kota	8	41	40	3	7
27	Karangpawitan	4	38	41	2	3
28	Wanaraja	4	14	14	-	1
29	Sucinaraja	2	10	19	1	2
30	Pangatian	2	10	19	-	1
31	Sukawening	2	34	36	-	4
32	Karantengah	-	7	12	-	2
33	Banyuresmi	2	31	39	-	5
34	Leles	4	27	30	1	4
35	Leuwigoong	1	25	29	1	2

No	Kecamatan	Tenaga Medis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
36	Cibatu	3	25	24	2	3
37	Kersamanah	1	17	18	-	2
38	Cibiuk	1	6	12	1	1
39	Kadungora	3	22	21	2	3
40	Blubur Limbangan	3	22	23	1	2
41	Selaawi	1	13	14	1	2
42	Malangbong	6	40	49	1	2
<b>JUMLAH</b>		<b>92</b>	<b>871</b>	<b>1,038</b>	<b>30</b>	<b>104</b>

Sumber: BPS Kabupaten Garut dalam Angka Tahun 2020

Dari tabel di atas bahwa Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Garut pada tahun 2018 sebanyak 2.135 orang yang terdiri dari Tenaga Medis 92 orang, Tenaga Keperawatan 871 orang, Tenaga Kebidanan 1038 orang, Tenaga Kefarmasian 30 orang dan Tenaga Kesehatan 104 orang.

Untuk lebih jelasnya kami sajikan pada gambar di bawah ini kaitannya dengan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Garut:



**Gambar 4.3 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut, 2020**

Dari gambar di atas bahwa adanya ketimpangan antara tenaga medis dengan tenaga kefarmasian yaitu hanya ada 30 orang.

#### 4.2.3 Penyakit yang di Derita oleh Masyarakat

Dalam hal ini kami sajikan beberapa kasus penyakit yang di derita oleh masyarakat di Kabupaten Garut pada tahun 2018, yang di sajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel4.3 Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria di Kabupaten Garut,2020**

No	Kecamatan	HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	TB	Malaria
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
1	Cisewu	2	-	1	364	21	-
2	Caringin	4	-	-	1842	16	1
3	Talegong	1	-	-	522	15	-
4	Bungbulang	4	-	-	710	8	-
5	Mekarmukti	3	1	-	709	10	-
6	Pamulihan	1	-	-	637	6	-
7	Pakenjeng	4	-	-	2213	14	-
8	Cikelet	2	-	-	807	15	-
9	Pameungpeuk	5	1	4	525	48	2
10	Cibalong	8	-	-	2156	28	5
11	Cisompet	3	-	2	2200	27	-
12	Peundeuy	1	-	1	640	21	-
13	Singajaya	1	-	-	692	6	-
14	Cihurip	2	-	2	809	8	-
15	Cikajang	9	-	4	776	25	1
16	Banjarwangi	1	-	-	914	15	-
17	Cilawu	18	-	10	3769	47	1
18	Bayongbong	13	-	11	4400	67	-
19	Cigedug	3	-	2	2000	26	-
20	Cisurupan	2	-	6	4504	28	-
21	Sukaresmi	1	-	2	933	15	-
22	Samarang	7	-	18	2749	42	-
23	Pasirwangi	1	-	3	4485	14	-
24	Tarogong Kidul	101	2	50	2999	54	-
25	Tarogong Kaler	49	2	51	3486	51	-
26	Garut Kota	172	1	90	4348	61	-
27	Karangpawitan	24	-	61	1585	41	-
28	Wanaraja	19	-	13	2034	28	-
29	Sucinaraja	1	-	3	1393	4	-
30	Pangatian	1	-	2	685	29	-
31	Sukawening	3	-	13	1930	43	-
32	Karantengah	2	-	1	785	8	-
33	Banyuresmi	11	-	20	2694	31	-
34	Leles	14	-	13	1339	28	-
35	Leuwigoong	4	-	4	2096	11	-
36	Cibatu	13	-	4	2141	47	-
37	Kersamanah	4	-	1	1729	20	-
38	Cibiuk	3	-	-	970	-	-
39	Kadungora	21	-	14	5739	131	-

No	Kecamatan	HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	TB	Malaria
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
40	Blubur Limbangan	6	-	-	1558	21	-
41	Selaawi	1	-	-	1000	23	-
42	Malangbong	5	-	-	2538	60	-
<b>JUMLAH</b>		<b>550</b>	<b>7</b>	<b>406</b>	<b>80,405</b>	<b>1,213</b>	<b>10</b>

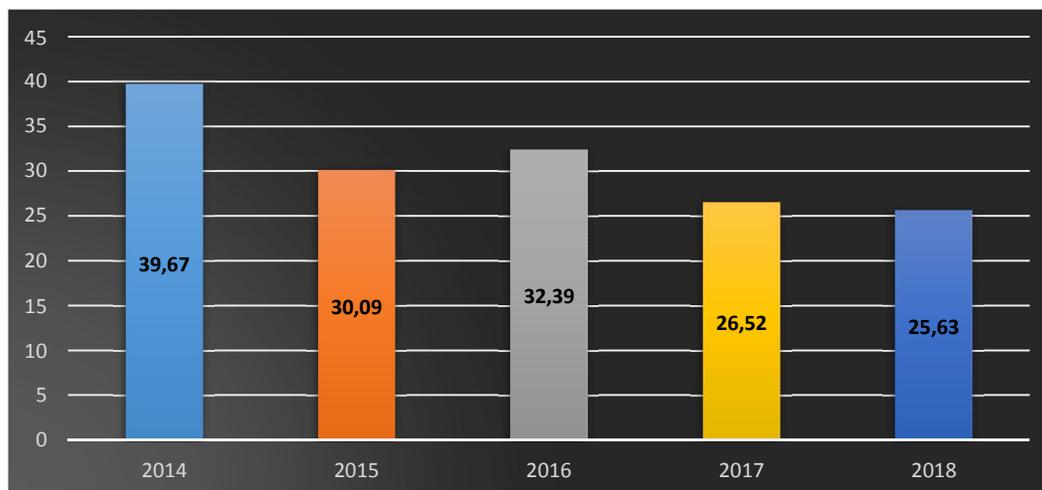
Sumber: BPS Kabupaten Garut dalam Angka Tahun 2020

Dari data di atas bahwa mayoritas penyakit yang di derita oleh masyarakat Garut adalah terjangkau wabah diare sebanyak 80.405 orang, terjangkau TB adalah 1.213 orang, terjangkau HIV/AIDS 550 orang, terjangkau DBD 406 orang, malaria 10 orang dan IMS adalah 7 orang.

#### 4.2.4 Kelahiran Yang Ditolong Oleh Tenaga NonMedis

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya AKB adalah masih tingginya proses kelahiran bayi yang ditolong oleh tenaga non medis. Proses kelahiran yang ditolong oleh tenaga non medis selain beresiko pada kematian bayi, beresiko juga pada kematian ibu. Persentase proses kelahiran yang ditolong oleh tenaga non medis masih cukup tinggi dan perkembangannya berfluktuasi pada periode 2014-2018. Setelah mengalami penurunan di tahun 2015, sebesar 30,09 persen. Akan tetapi pada tahun 2016 naik kembali menjadi 32,39 persen. Pada tahun 2017 turun kembali menjadi 26,52 persen dan pada tahun 2018 sebesar 25,63 persen.

Untuk lebih lanjutnya kami sajikan dalam gambar di bawah ini:



**Gambar 4.4 Proses Kelahiran Yang Ditolong Oleh Non Medis**

Masih tingginya proses kelahiran yang ditolong oleh non medis salah satunya dikontribusi oleh tingkat pengetahuan ibu yang relatif rendah, khususnya bidang kesehatan, yang kemungkinan disebabkan karena banyaknya kasus-kasus perkawinan dini. Selain tingginya AKB dan AKI, resiko lainnya akibat rendahnya pengetahuan ibu adalah tingginya balita yang berstatus gizi kurang dan buruk. Dari data di atas bahwa perlunya program KB

yang dilakukan oleh pemerintah agar Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Garut dapat teratasi.

### 4.3 Keluarga Berencana

Dilihat dari data bahwa Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif masih sangat banyak dan ini di khawatirkan tingkat Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Kematian Bayi (AKB) lebih meningkat untuk data pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif di Kabupaten Garut di sajikan dalam tabel di bawahini:



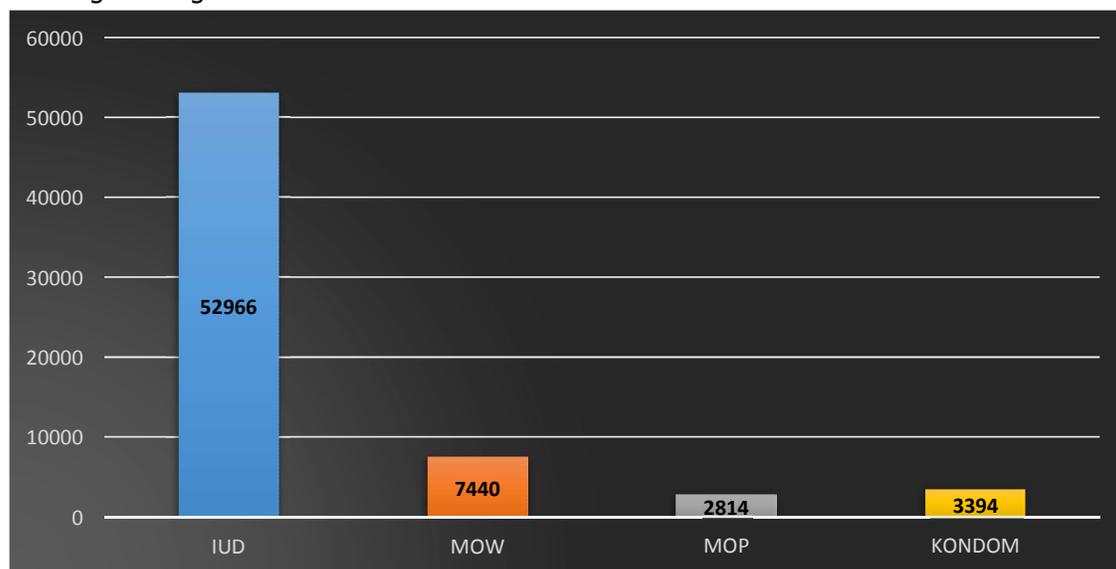
**Tabel 4.4 Jumlah Pasangan Usia Subur di Kabupaten Garut, 2020**

No	Kecamatan	Jumlah	Peserta KB Aktif			
			PUS	IUD	MOW	MOP
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1	Garut Kota	22,142	2,679	345	4	413
2	Karangpawitan	24,479	1,460	318	15	256
3	Wanaraja	8,925	498	55	1	283
4	Tarogong Kaler	17,888	2,173	224	7	438
5	Tarogong Kidul	20,864	2,341	320	6	836
6	Banyuresmi	18,872	1,939	214	16	2055
7	Samarang	16,071	1,300	221	10	530
8	Pasir Wangi	14,642	1,311	166	35	1483
9	Leles	15,799	899	185	4	1106
10	Kadungora	17,178	1,510	354	24	1697
11	Leuwigoong	7,971	451	89	5	253
12	Cibatu	12,990	1,176	214	8	1210
13	Kersamanah	7,372	860	56	6	1161
14	Malangbong	26,985	2,185	183	24	2075
15	Sukawening	9,216	1,057	156	8	626
16	Karang Tengah	5,500	125	43	1	383
17	Bayongbong	19,242	1,134	208	14	1563
18	Cigedug	9,485	467	135	41	1240
19	Cilawu	19,903	702	300	12	598
20	Cisurupan	22,388	1,459	344	26	2388
21	Sukaesmi	8,589	250	86	41	548
22	Cikajang	17,250	1,716	220	47	1763
23	Banjarwangi	11,402	224	80	13	396
24	Singajaya	9,003	237	15	5	529
25	Cihurip	4,797	180	16	5	419
26	Peundeuy	5,311	78	4	0	141

27	Pameungpeuk	11,003	966	27	4	1078
28	Cisompet	15,581	682	112	19	1433
29	Cibalong	12,738	218	11	29	506
30	Cikelet	9,098	183	25	11	1738
31	Bungbulang	12,793	250	43	64	566
32	Mekar Mukti	4,183	140	18	67	482
33	Pakenjeng	18,212	800	72	905	2346
34	Pamulihan	4,801	252	24	86	636
35	Cisewu	6,957	1,109	27	173	186
36	Caringin	6,880	402	34	190	547
37	Talegong	7,020	154	42	111	1033
38	Limbangan	14,306	1,769	235	21	820
39	Selaawi	8,624	555	242	7	593
40	Cibiuk	5,880	400	105	0	561
41	Pangatikan	7,582	369	92	5	192
42	Sucinaraja	5,394	278	36	2	259
<b>JUMLAH</b>		<b>525,316</b>	<b>36,938</b>	<b>5,696</b>	<b>2,072</b>	<b>37,366</b>

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Garut 2020

Dari data di atas bahwa Pasangan Usia Subur di Kabupaten Garut, pada tahun 2018 mencapai 528.105 jiwa, sehingga perkembangan penduduk di Kabupaten Garut sangat potensial, untuk mengantisipasi perkembangan jumlah penduduk, maka pemerintah menganjurkan untuk mengikuti program Keluarga Berencana, untuk lebih jelasnya di sajikan dalam gambar grafik di bawah ini:



**Gambar 4.5 Grafik Peserta KB Aktif di Kabupaten Garut 2020**

Dari gambar di atas bahwa rata-rata Peserta KB Aktif di Kabupaten Garut yang pasangan usia subur bahwa yang menggunakan IUD sebanyak 52.966 jiwa, yang menggunakan MOW adalah 7.440 jiwa, yang menggunakan MOP adalah 2.814 jiwa dan yang menggunakan kondom adalah 3.394 jiwa. Artinya bahwa Peserta KB Aktif di Kabupaten Garut sudah cukup baik.

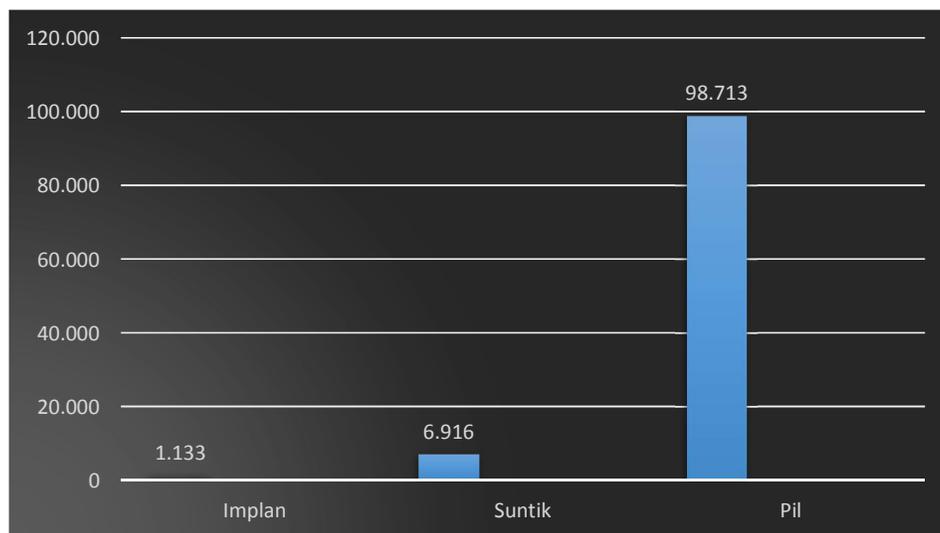
**Tabel 4.5 Jumlah Peserta KB Aktif di Kabupaten Garut, 2020**

No	Kecamatan	Peserta KB Aktif			Jumlah
		Implan	Suntikan	Pil	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Garut Kota	79	124	3,766	3,969
2	Karangpawitan	112	100	6,331	6,543
3	Wanaraja	19	82	2,314	2,415
4	Tarogong Kaler	127	45	4,778	4,950
5	Tarogong Kidul	56	250	3,227	3,533
6	Banyuresmi	36	491	3,270	3,797
7	Samarang	35	54	2,496	2,585
8	Pasir Wangi	0	0	1,758	1,758
9	Leles	4	311	2,298	2,613
10	Kadungora	35	0	4,515	4,550
11	Leuwigoong	7	46	986	1,039
12	Cibatu	4	365	1,431	1,800
13	Kersamanah	11	57	1,439	1,507
14	Malangbong	51	300	6,528	6,879
15	Sukawening	3	0	2,942	2,945
16	Karang Tengah	4	31	787	822
17	Bayongbong	55	486	3,558	4,099
18	Cigedug	35	416	1,770	2,221
19	Cilawu	23	0	8,626	8,649
20	Cisurupan	46	514	3,916	4,476
21	Sukaesmi	4	134	1,954	2,092
22	Cikajang	54	377	3,519	3,950
23	Banjarwangi	0	12	805	817
24	Singajaya	31	22	2,009	2,062
25	Cihurip	13	199	385	597
26	Peundeuy	5	9	164	178
27	Pameungpeuk	5	6	2,844	2,855
28	Cisompet	0	412	2,423	2,835
29	Cibalong	95	732	2,825	3,652
30	Cikelet	0	0	1,082	1,082
31	Bungbulang	31	148	1,286	1,465
32	Mekar Mukti	0	267	629	896
33	Pakenjeng	18	0	1,679	1,697
34	Pamulihan	44	365	536	945
35	Cisewu	14	98	866	978
36	Caringin	0	41	550	591
37	Talegong	0	75	511	586
38	Limbangan	41	28	3,253	3,322

No	Kecamatan	Peserta KB Aktif			Jumlah
		Implan	Suntikan	Pil	
39	Selaawi	9	51	695	755
40	Cibiuk	2	87	569	658
41	Pangatikan	19	60	1,851	1,930
42	Sucinaraja	6	121	1,542	1,669
<b>JUMLAH</b>		<b>1,133</b>	<b>6,916</b>	<b>98,713</b>	<b>106,762</b>

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Garut 2020

Dari data di atas bahwa peserta KB aktif di Kabupaten Garut terdiri dari Implan berjumlah 1.133 jiwa, yang menggunakan suntikan adalah 6.916, yang menggunakan PIL adalah 98.713 jiwa. Untuk lebih jelasnya di jelaskan dalam gambar grafik di bawah ini:



**Gambar 4.6 Peserta KB Aktif di Kabupaten Garut, 2020**

Dari gambar di atas bahwa jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Garut cukup baik sehingga pemerintah harus tetap meningkatkan karena di banding dengan jumlah penduduk yang sudah menikah dan penduduk usia subur di Kabupaten Garut cukup banyak.

## BAB V

### PROFIL GENDER BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan bangsa, sebab semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pendidikan merupakan proses melahirkan generasi penerus yang berkualitas oleh karena itu pemerintah mengamanatkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Oleh karena itu pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan pendidikan, yaitu dengan membuka kesempatan,

memberikan akses serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan.

Kesempatan memperoleh pendidikan yang sama bagi setiap warna negara diamanatkan juga dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam memperoleh pendidikan. Kesetaraan pendidikan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan dijelaskan dalam Undang-undang Kesetaraan Gender Nomor 1 Tahun 2017. Kesempatan memperoleh pendidikan harus diberikan pada seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, karena pembangunan yang berkualitas tidak membedakan laki-laki ataupun perempuan.



Permasalahan dari rendahnya angka

pendidikan di Kabupaten Garut berakibat pada kemiskinan, pengangguran, kejahatan, dan lain-lain. Permasalahan pendidikan bukan hanya dilatar belakang oleh masing-masing pribadi, namun penyediaan sarana dan prasarana yang ikut andil dalam keberhasilan bidang pendidikan di Kabupaten Garut.

Dalam bab ini mengkaji sejauh mana peran perempuan di Kabupaten Garut dalam mengakses bidang pendidikan, dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-rata lama sekolah, Angka Melek Huruf menurut kelompok umur serta akses terhadap informasi dan teknologi. Diharapkan dengan data dan informasi yang disajikan ini dapat diidentifikasi peran serta perempuan dalam bidang pendidikan dibandingkan laki-laki.

## 5.1. Pendidikan Penduduk yang Ditamatkan di Kabupaten Garut

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan ditandai dengan sertifikat/ijazah yang dimiliki. Data pendidikan ini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia bermanfaat dalam penentuan kebijakan terutama yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, kesehatan, program kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan lain-lain. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan.



**Tabel 5.1 Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Sekolah Dasar yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020**

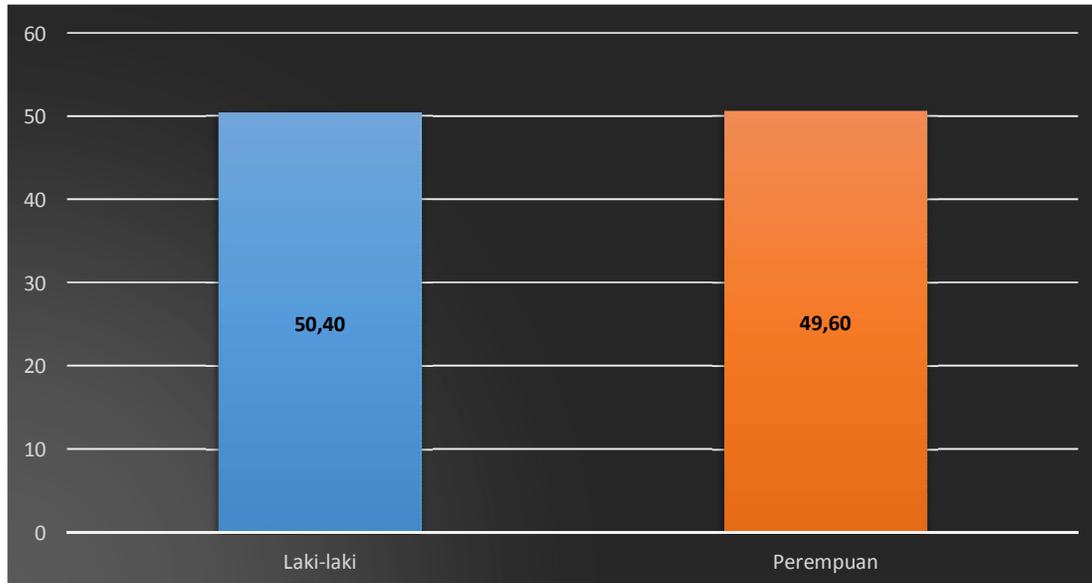
No.	KECAMATAN	L	P	Σ
1	Garut Kota	23.351	24.549	47.900
2	Karangpawitan	16.831	16.602	33.433
3	Wanaraja	6.254	6.731	12.985
4	Tarogong Kaler	11.034	10.726	21.760
5	Tarogong Kidul	5.733	6.913	12.646
6	Banyuresmi	11.291	10.737	22.028
7	Samarang	8.774	8.255	17.029
8	Pasir Wangi	6.804	6.848	13.652
9	Leles	12.342	9.286	21.628
10	Kadungora	11.210	10.917	22.127
11	Leuwigoong	5.074	4.680	9.754
12	Cibatu	4.053	3.744	7.797
13	Kersamanah	3.945	3.227	7.172
14	Malangbong	24.506	24.421	48.927
15	Sukawening	7.090	8.145	15.235
16	Karang Tengah	3.325	3.631	6.956
17	Bayongbong	13.829	13.044	26.873
18	Cigedug	1.829	2.038	3.867
19	Cilawu	12.188	10.737	22.925
20	Cisurupan	7.368	6.747	14.115
21	Sukaesmi	3.865	3.645	7.510
22	Cikajang	5.149	5.267	10.416
26	Peundeuy	4.005	4.358	8.363
27	Pameungpeuk	6.010	6.919	12.929
28	Cisompet	9.641	10.446	20.087
29	Cibalong	4.807	5.105	9.912

No.	KECAMATAN	L	P	Σ
30	Cikelet	7.567	8.368	15.935
31	Bungbulang	5.121	4.870	9.991
32	Mekar Mukti	604	522	1.126
33	Pakenjeng	5.887	6.747	12.634
34	Pamulihan	3.930	3.215	7.145
35	Cisewu	7.381	7.566	14.947
36	Caringin	3.264	3.643	6.907
37	Talegong	2.175	1.937	4.112
38	Limbangan	5.744	5.529	11.273
39	Selaawi	2.246	2.096	4.342
40	Cibiuk	7.559	6.225	13.784
41	Pangatikan	4.091	3.759	7.850
42	Sucinaraja	5.054	5.329	10.383
<b>J U M L A H</b>		<b>295.307</b>	<b>290.672</b>	<b>585.979</b>

Sumber: Hasil Survey Tim Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dikemukakan bahwa Pendidikan Sekolah Dasar Yang Ditamatkan lebih banyak perempuan daripada laki-laki, dimana jumlah perempuan sebanyak 295.307 orang atau (50,40 persen) dan laki-laki sebanyak 290.672 orang atau (49,60 persen). Hal ini menunjukkan bahwa pada jenjang tersebut perempuan lebih tinggi yang bersekolah dari pada laki-laki.

Untuk lebih jelasnya disajikan dalam gambar Grafik di bawah ini:



**Gambar5.1** Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan Sekolah Dasar yang Ditamatkan di Kabupaten Garut Tahun2020

Dari tabel dan Gambar 5.1 diatas menunjukkan tingkat pendidikan Sekolah Dasar lebih dominan adalah perempuan.

Sedangkan data pendidikan Sekolah Menengah Pertama disajikan dalam tabel 5.2 di bawah ini:

**Tabel 5.2 Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020**

No.	KECAMATAN	L	P	Σ
1	Garut Kota	13.481	13.207	26.688
2	Karangpawitan	10.078	9.205	19.283
3	Wanaraja	3.236	3.327	6.563
4	Tarogong Kaler	6.658	6.842	13.500
5	Tarogong Kidul	3.905	5.040	8.945
6	Banyuresmi	9.444	8.881	18.325
7	Samarang	5.866	6.356	12.222
8	Pasir Wangi	4.523	4.639	9.162
9	Leles	5.173	4.833	10.006
10	Kadungora	6.554	6.936	13.490
11	Leuwigoong	3.332	3.131	6.463
12	Cibatu	2.065	2.116	4.181
13	Kersamanah	3.171	2.594	5.765
14	Malangbong	14.253	14.801	29.054
15	Sukawening	4.703	4.584	9.287
16	Karang Tengah	1.403	1.371	2.774
17	Bayongbong	6.390	6.214	12.604
18	Cigedug	788	834	1.622
19	Cilawu	6.886	6.713	13.599
20	Cisurupan	3.086	3.069	6.155
21	Sukaesmi	2.811	3.028	5.839
22	Cikajang	7.771	7.886	15.657
26	Peundeuy	1.847	1.528	3.375
27	Pameungpeuk	3.326	3.479	6.805
28	Cisompet	4.026	3.565	7.591
29	Cibalong	3.299	3.008	6.307
30	Cikelet	4.243	3.538	7.781
31	Bungbulang	3.041	2.689	5.730
32	Mekar Mukti	227	365	592
33	Pakenjeng	3.638	3.069	6.707
34	Pamulihan	2.015	1.558	3.573
35	Cisewu	3.045	2.816	5.861
36	Caringin	1.622	1.176	2.798
37	Talegong	1.005	1.072	2.077
38	Limbangan	4.435	4.244	8.679
39	Selaawi	1.356	1.076	2.432
40	Cibiuk	40.625	3.781	44.406
41	Pangatikan	3.085	3.813	6.898
42	Sucinaraja	2.025	2.070	4.095
<b>J U M L A H</b>		<b>212.680</b>	<b>171.420</b>	<b>384.100</b>

Sumber: Hasil Survey Tim Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2020

Dari data diatas bahwa penduduk yang pendidikan sekolah menengah pertama adalah laki-laki 212.680 orang atau (55,37persen) dan perempuan adalah 171.420 orang atau (44,63 persen), artinya bahwa pendidikan Sekolah menengah pertama (SMP) gender di Kabupaten Garut lebih sedikit dari Laki-laki. Hal ini tidak sejalan dengan pendidikan penduduk dengan pada tingkat sekolah dasar yang lebih banyak adalah perempuan.

Untuk lebih jelasnya persentasi pendidikan penduduk di Kabupaten Garut pada tahun 2020 di sajikan pada gambar Grafik di bawah ini:



**Gambar 5.2 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Ditamatkan di Kabupaten Garut Tahun 2020**

Dari gambar Grafik di atas menunjukkan bahwa persentasi laki-laki lebih dominan dari pada perempuan.

Selanjutnya data pendidikan penduduk berdasarkan sekolah menengah atas disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 5.3 Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020**

No.	KECAMATAN	L	P	Σ
1	Garut Kota	19.318	18.068	37.386
2	Karangpawitan	1.175	10.834	12.009
3	Wanaraja	4.895	4.022	8.917
4	Tarogong Kaler	11.303	9.068	20.371
5	Tarogong Kidul	5.603	6.975	12.578
6	Banyuresmi	10.091	11.431	21.522
7	Samarang	5.019	4.279	9.298
8	Pasir Wangi	3.215	3.078	6.293
9	Leles	5.593	4.826	10.419
10	Kadungora	7.545	6.641	14.186
11	Leuwigoong	3.703	2.951	6.654
12	Cibatu	1.998	1.838	3.836
13	Kersamanah	1.737	1.422	3.159
14	Malangbong	9.647	9.524	19.171
15	Sukawening	5.625	4.399	10.024

No.	KECAMATAN	L	P	Σ
16	Karang Tengah	1.123	843	1.966
17	Bayongbong	4.887	68.640	73.527
18	Cigedug	460	448	908
19	Cilawu	6.993	6.999	13.992
20	Cisurupan	2.315	2.311	4.626
21	Sukaresmi	1.467	1.380	2.847
22	Cikajang	1.080	1.126	2.206
26	Peundeuy	1.249	854	2.103
27	Pameungpeuk	4.149	3.215	7.364
28	Cisompet	2.509	1.774	4.283
29	Cibalong	1.713	1.790	3.503
30	Cikelet	2.716	2.499	5.215
31	Bungbulang	1.499	1.312	2.811
32	Mekar Mukti	383	435	818
33	Pakenjeng	2.425	1.750	4.175
34	Pamulihan	1.338	1.022	2.360
35	Cisewu	1.961	1.460	3.421
36	Caringin	1.087	1.344	2.431
37	Talegong	618	656	1.274
38	Limbangan	5.406	4.528	9.934
39	Selaawi	582	721	1.303
40	Cibiuk	2.975	2.720	5.695
41	Pangatikan	2.437	2.479	4.916
42	Sucinaraja	2.023	1.634	3.657
<b>J U M L A H</b>		<b>151.934</b>	<b>213.337</b>	<b>365.271</b>

Sumber : Hasil Survey Tim Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2020

Dari data tabel di atas bahwa penduduk yang berpendidikan Sekolah Menengah atas (SMA/Sedarajat) bahwa jumlah laki-laki adalah 151.934 orang atau 41,59 persen dan perempuan adalah 213.337 orang atau 58,41 persen, untuk lebih jelasnya disajikan dalam gambar Grafik di bawah ini :



**Gambar 5.3** Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/Sedarajat) yang Ditamatkan di Kabupaten Garut Tahun 2020

Dari gambar diatas pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/Sedarajat) penduduk di Kabupaten Garut adalah laki-laki sebesar 55,89 Persen, sehingga hal ini perlunya pemerintah meningkatkan pendidikan bagi perempuan agar lebih, karena dengan tingginya pendidikan maka akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Untuk selanjutnya tingkat pendidikan penduduk dari diploma, untuk lebih jelasnya dijsajikan dalam dalam tabel di bawah ini:

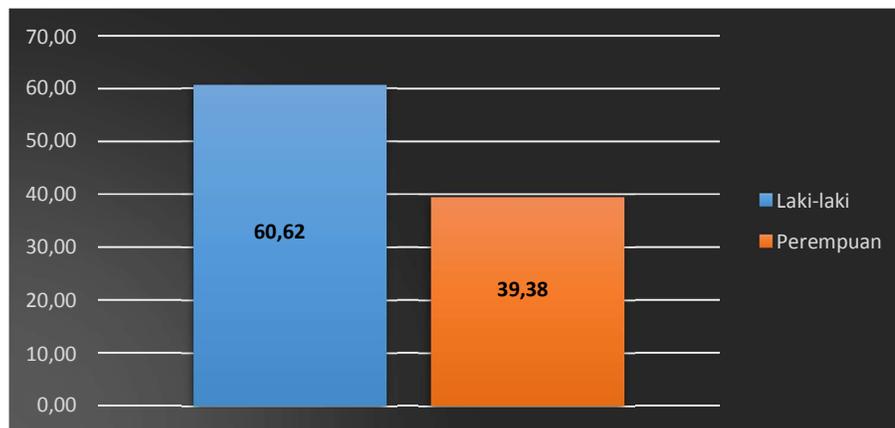
**Tabel 5.4 Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Diploma yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020**

No.	KECAMATAN	L	P	Σ
1	Garut Kota	1.632	1.643	3.275
2	Karangpawitan	2.406	745	3.151
3	Wanaraja	230	282	512
4	Tarogong Kaler	1.114	1.089	2.203
5	Tarogong Kidul	949	1.119	2.068
6	Banyuresmi	1.842	3.711	5.553
7	Samarang	436	433	869
8	Pasir Wangi	86	101	187
9	Leles	164	170	334
10	Kadungora	917	1.009	1.926
11	Leuwigoong	228	220	448
12	Cibatu	344	323	667
13	Kersamanah	117	78	195
14	Malangbong	336	345	681
15	Sukawening	241	299	540
16	Karang Tengah	57	43	100
17	Bayongbong	333	292	625
18	Cigedug	35	38	73
19	Cilawu	1.549	1.419	2.968
20	Cisurupan	635	272	907
21	Sukaesmi	58	48	106
22	Cikajang	102	111	213
26	Peundeuy	47	48	95
27	Pameungpeuk	193	206	399
28	Cisompet	128	111	239
29	Cibalong	69	66	135
30	Cikelet	118	116	234
31	Bungbulang	103	43	146
32	Mekar Mukti	6	10	16
33	Pakenjeng	134	84	218
34	Pamulihan	35	10	45
35	Cisewu	294	217	511
36	Caringin	43	41	84
37	Talegong	110	75	185

No.	KECAMATAN	L	P	Σ
38	Limbangan	432	362	794
39	Selaawi	18	19	37
40	Cibiuk	8.396	227	8.623
41	Pangatikan	405	251	656
42	Sucinaraja	71	102	173
<b>J U M L A H</b>		<b>24.625</b>	<b>15.996</b>	<b>40.621</b>

Sumber: Hasil Survey Tim Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2020

Dari data tabel di atas bahwa pendidikan penduduk dari tingkat pendidikan diploma didominasi oleh perempuan hal ini jumlah pendidikan diploma laki-laki adalah 24.625 orang atau 60,62 Persen sedangkan untuk pendidikan diploma perempuan adalah 15.996 orang atau 39,38 Persen, untuk lebih jelasnya di sajikan dalam gambar grafik di bawah ini:



**Gambar 5.4 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan Diploma yang Ditamatkan di Kabupaten Garut Tahun 2020**

Dari gambar di atas bahwa jenis pendidikan penduduk dari pendidikan diploma di Kabupaten Garut bahwa di dominasi oleh perempuan yaitu 38,40 persen perempuan yang berpendidikan Diploma.

Sedangkan untuk pendidikan tinggi atau sarjana strata1 (S-1) disajikan dalam tabel di bawah ini:

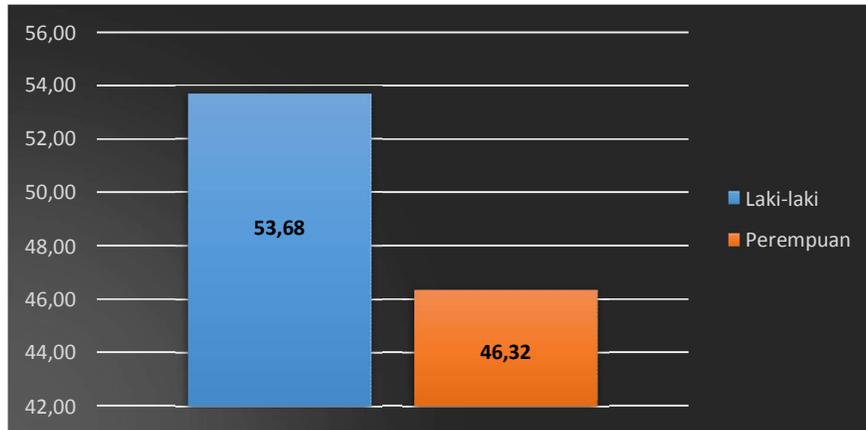
**Tabel 5.5 Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Strata 1 (S-1) yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020**

No.	KECAMATAN	L	P	Σ
1	Garut Kota	2.981	2.963	5.944
2	Karangpawitan	2.023	1.955	3.978
3	Wanaraja	588	544	1.132
4	Tarogong Kaler	1.519	1.437	2.956
5	Tarogong Kidul	797	971	1.768

No.	KECAMATAN	L	P	Σ
6	Banyuresmi	3.347	2.238	5.585
7	Samarang	575	457	1.032
8	Pasir Wangi	164	105	269
9	Leles	434	394	828
10	Kadungora	745	724	1.469
11	Leuwigoong	361	306	667
12	Cibatu	360	301	661
13	Kersamanah	352	236	588
14	Malangbong	564	488	1.052
15	Sukawening	665	610	1.275
16	Karang Tengah	126	107	233
17	Bayongbong	454	442	896
18	Cigedug	107	65	172
19	Cilawu	1.157	1.126	2.283
20	Cisurupan	993	682	1.675
21	Sukaesmi	147	128	275
22	Cikajang	151	159	310
26	Peundeuy	186	172	358
27	Pameungpeuk	537	504	1.041
28	Cisompet	300	297	597
29	Cibalong	139	104	243
30	Cikelet	420	374	794
31	Bungbulang	127	109	236
32	Mekar Mukti	78	84	162
33	Pakenjeng	766	654	1.420
34	Pamulihan	232	98	330
35	Cisewu	429	318	747
36	Caringin	449	220	669
37	Talegong	267	167	434
38	Limbangan	522	430	952
39	Selaawi	123	152	275
40	Cibiuk	224	28	252
41	Pangatikan	603	601	1.204
42	Sucinaraja	230	217	447
<b>J U M L A H</b>		<b>24.600</b>	<b>21.230</b>	<b>45.830</b>

Sumber: Hasil Survey Tim Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun2020

Dari data tabel di atas bahwa pendidikan tinggi yang di tamatkan oleh masyarakat di Kabupaten Garut adalah 41.788 orang, laki-lakinya adalah 24.600 orang atau 53,68 Persen dan pendidikan tinggi strata 1 (S-1) yang ditamatkan perempuan adalah sebanyak 21.230 orang atau 46,32nPersen. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam Gambar di bawahini:



**Gambar5.5 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) yang Ditamatkan di Kabupaten Garut Tahun2020**

Dari gambar di atas bahwa pendidikan tinggi Strata 1 (S-1) adalah didominasi oleh laki-laki yaitu 51,70 persen. Sehingga pemerintah Daerah Kabupaten Garut perlu mendorong kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke strata 1 sesuai dengan potensi yang ada.

Selanjutnya penduduk Kabupaten Garut yang berpendidikan tinggi strata 2 (S-2) disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel5.6Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Strata 2 (S-2) yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun2020**

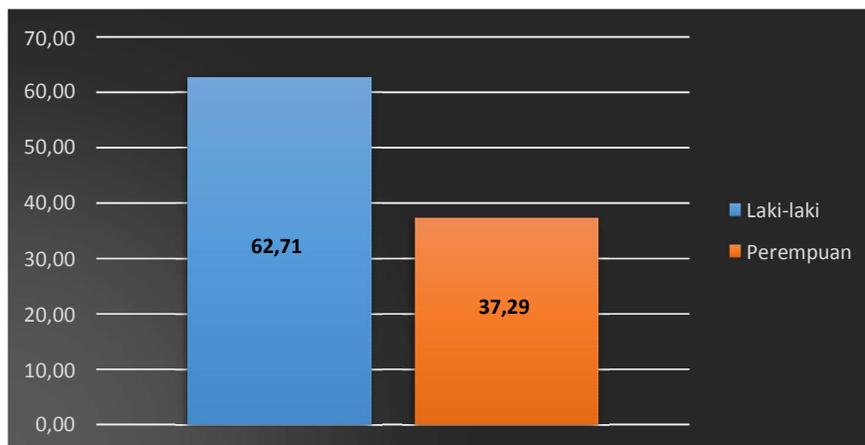
No.	KECAMATAN	L	P	Σ
1	Garut Kota	144	145	289
2	Karang Pawitan	103	69	172
3	Wanaraja	34	15	49
4	Tarogong Kaler	171	91	262
5	Tarogong Kidul	86	82	168
6	Banyuresmi	403	289	692
7	Samarang	43	20	63
8	Pasir Wangi	11	8	19
9	Leles	34	11	45
10	Kadungora	51	32	83
11	Leuwigoong	113	76	189
12	Cibatu	156	110	266
13	Kersamanah	102	44	146
14	Malangbong	280	124	404
15	Sukawening	40	7	47
16	Karang Tengah	5	5	10
17	Bayongbong	87	81	168
18	Cigedug	2	1	3
19	Cilawu	114	72	186

No.	KECAMATAN	L	P	Σ
20	Cisurupan	167	49	216
21	Sukaesmi	13	3	16
22	Cikajang	39	44	83
26	Peundeuy	17	2	19
27	Pameungpeuk	46	16	62
28	Cisompet	19	8	27
29	Cibalong	13	9	22
30	Cikelet	31	8	39
31	Bungbulang	39	12	51
32	Mekar Mukti	10	10	20
33	Pakenjeng	32	8	40
34	Pamulihan	5	-	5
35	Cisewu	36	11	47
36	Caringin	6	3	9
37	Talegong	27	13	40
38	Limbangan	27	11	38
39	Selaawi	3	1	4
40	Cibiuk	24	8	32
41	Pangatikan	56	56	112
42	Sucinaraja	15	6	21
<b>J U M L A H</b>		<b>2.629</b>	<b>1.563</b>	<b>4.192</b>

Sumber: Hasil Survey Tim Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2020

Dari tabel di atas bahwa masyarakat yang berpendidikan Strata 2 (S-2) di Kabupaten Garut adalah berjumlah 2.629 orang jumlah Strata 2 (S-2) penduduk laki-laki adalah 1.563 orang atau 62,71 persen dan perempuan yang berpendidikan Strata 2 (S-2) adalah 899 orang atau 37,29 persen.

Untuk lebih jelasnya disajikan dalam gambar grafik di bawah ini:



**Gambar 5.6** Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan Strata2 (S-2) yang Ditamatkan di Kabupaten Garut Tahun 2020

Dari gambar dan tabel di atas bahwa penduduk yang berpendidikan Strata 2 (S-2) di dominasi oleh laki-laki sebesar 69,88 persen.

Selanjutnya penduduk di Kabupaten Garut yang berpendidikan strata (S-3) disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 5.7 Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Strata 3 (S-3) yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020**

No.	KECAMATAN	L	P	Σ
1	Garut Kota	21	35	56
2	Karang Pawitan	38	32	70
3	Wanaraja	2	1	3
4	Tarogong Kaler	20	11	31
5	Tarogong Kidul	34	31	65
6	Banyuresmi	45	21	66
7	Samarang	6	0	6
8	Pasir Wangi	1	-	1
9	Leles	10	2	12
10	Kadungora	32	4	36
11	Leuwigoong	10	11	21
12	Cibatu	-	-	0
13	Kersamanah	38	10	48
14	Malangbong	2	1	3
15	Sukawening	1	0	1
16	Karang Tengah	1	1	2
17	Bayongbong	11	-	11
18	Cigedug	1	0	1
19	Cilawu	11	4	15
20	Cisurupan	56	17	73
21	Sukaesmi	2	0	2
22	Cikajang	2	3	5
26	Peundeuy	0	0	0
27	Pameungpeuk	-	-	0
28	Cisompet	3	0	3
29	Cibalong	-	-	0
30	Cikelet	1	-	1
31	Bungbulang	-	-	0
32	Mekar Mukti	-	-	0
33	Pakenjeng	6	3	9
34	Pamulihan	2	-	2
35	Cisewu	-	-	0
36	Caringin	-	-	0
37	Talegong	2	-	2
38	Limbangan	2	1	3
39	Selaawi	1	-	1

No.	KECAMATAN	L	P	Σ
40	Cibiuk	4	-	4
41	Pangatian	1	1	2
42	Sucinaraja	1	1	2
<b>J U M L A H</b>		<b>367</b>	<b>190</b>	<b>557</b>

Sumber: Hasil Survey Tim Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2019

Dari tabel di atas bahwa penduduk berjumlah 173 orang, laki-laki berjumlah 367 orang atau 65,89 persen, dan yang berpendidikan Strata 3 (S-3) dari perempuan hanya 190 orang atau 34,11 persen, artinya bahwa yang berpendidikan Strata 3 (S-3) di Kabupaten Garut didominasi oleh laki-laki.

Untuk lebih jelasnya disajikan dalam gambar di bawah ini:



**Gambar5.7 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan Strata 3 (S-3) yang Ditamatkan di Kabupaten Garut Tahun2019**

Dari gambar di atas bahwa pendidikan Strata 3 (S-3) yang ditamatkan adalah mayoritas laki-laki sebesar 69,39 Persen.

## 5.2 Rata-rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau *mean years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas individu tersebut. Akhirnya tingkat ekonomi pun bisa meningkat.

Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Garut 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.8 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah Kabupaten Garut Tahun 2020**

Jenis Kelamin dan	Kelompok Umur Sekolah	Partisipasi Sekolah		
		Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah
-1	-2	-3	-4	-5
Laki-Laki	7 s/d 12	0,6	99,2	0,2
	13 s/d 15	-	93,2	6,8
	16 s/d 18	-	65,7	34,3
	19 s/d 24	-	13	87
Perempuan	7 s/d 12	-	100	-
	13 s/d 15	-	93,4	6,6
	16 s/d 18	-	62,4	37,6
	19 s/d 24	-	10,2	89,8
Laki-Laki+Perempuan	7 s/d 12	0,3	99,6	0,1
	13 s/d 15	-	93,3	6,7
	16 s/d 18	-	64,1	35,9
	19 s/d 24	-	11,6	88,4

Sumber: BPS Kabupaten Garut dalam Angka Tahun 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk kelompok umur sekolah 7 s/d 12 yang tidak/belum pernah sekolah adalah (0,6) untuk yang masih sekolah (99,2) dan yang tidak sekolah adalah (0,2). Sedangkan rata-rata umur sekolah bagi perempuan untuk kelompok umur sekolah 7 s/d 12 yang tidak/belum pernah sekolah adalah (-) untuk yang masih sekolah (100) dan yang tidak sekolah adalah (-). Maka dapat diketahui untuk kelompok umur sekolah 7 s/d 12 yang lebih dominan dalam partisipasi sekolah adalah laki-laki.

Kemudian untuk kelompok umur sekolah 13 s/d 15 yang tidak/belum pernah sekolah adalah (-) untuk yang masih sekolah (93,2) dan yang tidak sekolah adalah (6,8). Sedangkan rata-rata umur sekolah bagi perempuan untuk kelompok umur sekolah 13 s/d 15 yang tidak/belum pernah sekolah adalah (-) untuk yang masih sekolah (93,4) dan yang tidak sekolah adalah (6,6). Maka dapat diketahui untuk kelompok umur sekolah 13 s/d 15 yang lebih dominan dalam partisipasi sekolah adalah perempuan.

Kemudian untuk kelompok umur sekolah 16 s/d 18 yang tidak/belum pernah sekolah adalah (-) untuk yang masih sekolah (65,7) dan yang tidak sekolah adalah (34,3). Sedangkan rata-rata umur sekolah bagi perempuan untuk kelompok umur sekolah 16 s/d 18 yang tidak/belum pernah sekolah adalah (-) untuk yang masih sekolah (62,4) dan yang tidak sekolah adalah (37,6). Maka dapat diketahui untuk kelompok umur sekolah 16 s/d 18 yang lebih dominan dalam partisipasi sekolah adalah laki-laki.

Kemudian untuk kelompok umur sekolah 19 s/d 24 yang tidak/belum pernah sekolah adalah (-) untuk yang masih sekolah (13) dan yang tidak sekolah adalah (87). Sedangkan rata-rata umur sekolah bagi perempuan untuk kelompok umur sekolah 19 s/d 24 yang tidak/belum pernah sekolah adalah (-) untuk yang masih sekolah (10,2) dan yang tidak sekolah adalah (89,8). Maka dapat diketahui untuk kelompok umur sekolah 19 s/d 24 yang lebih dominan dalam partisipasi sekolah adalah laki-laki.



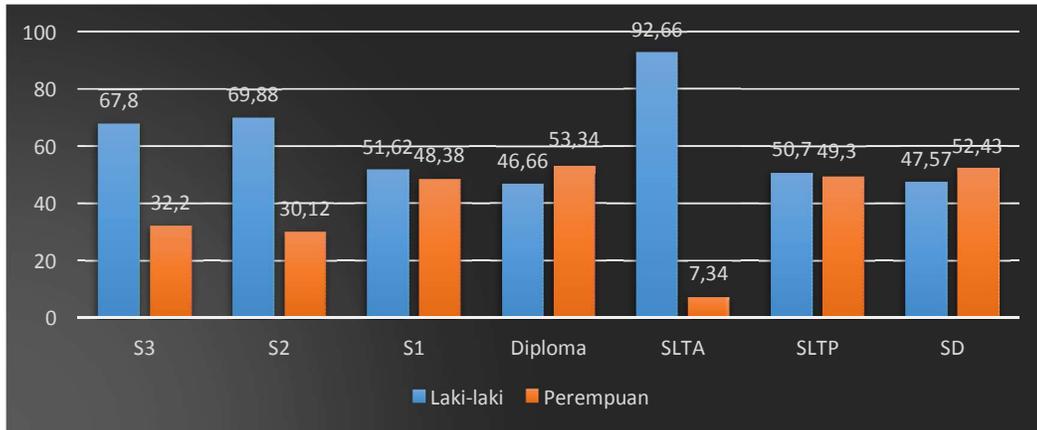
Kemudian tabel diatas juga menunjukkan bahwa angka yang paling tinggi dari partisipasi sekolah adalah kelompok umur sekolah 7 s/d 12 dengan angka partisipasi sekolah yang masih sekolah sebesar (99,6) sedangkan angka yang paling rendah berada pada kelompok umur sekolah 19 s/d 24 dengan angka partisipasi sekolah yang masih sekolah sebesar (11,6).

**Tabel 5.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2020**

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk Berijazah	Lama Pendidikan	Pengitungan
	L	P			
-1	-2	-3	-4	-5	-6
S3	120	53	173	21	3,633
S2	2,086	899	2,985	18	53,730
S1	26,003	24,297	50,300	16	804,800
Diploma	9,659	10,972	20,631	15	309,465
SLTA/Sederajat	196,589	15,514	351,729	12	4,220,748
SLTP/Sederajat	177,813	172,858	350,671	9	3,156,039
SD	376,551	414,953	804,546	6	4,827,276
<b>Jumlah</b>	<b>788,821</b>	<b>639,546</b>	<b>1,428,367</b>	<b>97</b>	<b>13,375,691</b>

Sumber: Hasil Survey Tim Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2020

Diketahui Jumlah Penduduk Kabupaten Garut tahun 2020 adalah tercatat sebesar 2.585.607 jiwa yang terdiri dari 1.324.971 penduduk laki-laki dan 1.260.636 penduduk perempuan. Sampai dengan tahun 2017, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Garut mencapai 7,28 Tahun atau setara dengan kelas VII. Sementara anak usia tujuh tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan selama 11,73 tahun lulus SMA. (*Statistik Daerah Kabupaten Garut 2020*).



**Gambar5.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan yang ditamatkan Tahun2020**

Dari data diatas dapat diketahui Rata-Rata lama sekolah Kabupaten Garut dengan rumus sebagai berikut:

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)  
 = (Jumlah Penduduk Berizajah X Lama Pendidikan)/Jumlah Penduduk  
 $RLS = 13375691/2588839$   
 = 5,17

Jadi angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Garut berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan adalah 5,17 artinya, penduduk Kabupaten Garut rata-rata hanya menyelesaikan SD kelas 5.



## BAB VI

### PROFIL GENDER BIDANG KETENAGAKERJAAN

**K**etenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Ketenagakerjaan dapat menggambarkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat, tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena tenaga kerja merupakan salah satu balas jasa faktor produksi. Di Indonesia, data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) adalah keterangan perorangan dari setiap anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun keatas. Meski demikian, informasi yang disajikan hanya mencakup penduduk yang berumur 15 tahun keatas.



#### 6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Besarnya partisipasi angkatan kerja digambarkan melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun keatas). Untuk melihat besar-kecilnya kontribusi, serta dinamika tenaga kerja dan pencari kerja dalam pasar kerja, para pembuat kebijakan dapat mencermati indikator ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

**Tabel 6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Status Wilayah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020**

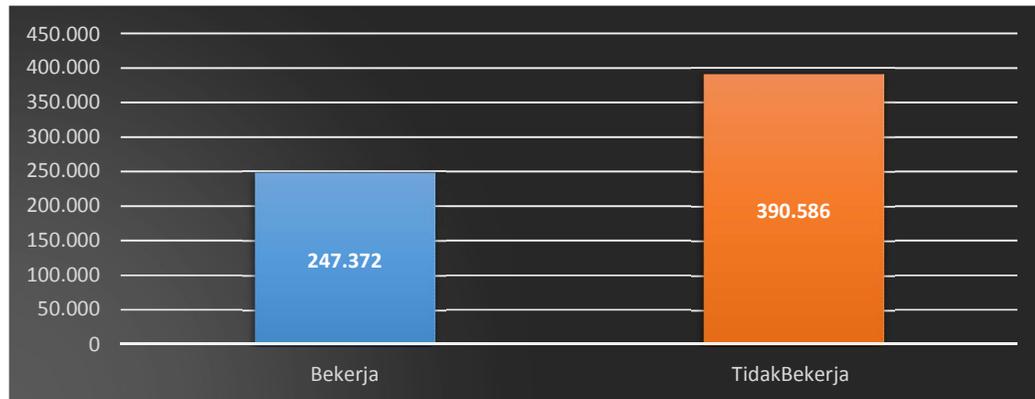
No.	KECAMATAN	Jumlah Angkatan Kerja 18-58 th			
		Bekerja		Tidak bekerja	
		L	P	L	P
1	Garut Kota	32,841	26,331	39,409	42,377
2	Karang Pawitan	12,302	12,626	10,364	15,953
3	Wanaraja	15,235	13,536	5,372	3,983
4	Tarogong Kaler	22,155	10,014	6,829	16,160

5	Tarogong Kidul	4,616	3,585	2,563	2,551
6	Banyuresmi	7,267	3,639	8,289	7,366
7	Samarang	15,235	13,536	5,372	3,983
8	Pasir Wangi	9,735	4,811	3,491	6,105
9	Leles	16,460	9,158	4,560	4,137
10	Kadungora	17,703	9,969	6,476	9,587
11	Leuwigoong	6,200	3,300	2,826	3,873
12	Cibatu	5,254	3,055	8,675	6,396
13	Kersamanah	6,244	3,868	1,802	1,585
14	Malangbong	44,220	42,390	1,901	1,732
15	Sukawening	10,534	8,650	1,687	3,374
16	Karang Tengah	6,200	3,300	2,826	3,873
17	Bayongbong	16,186	10,246	8,055	9,178
18	Cigedug	13,366	4,881	904	2,200
19	Cilawu	22,842	17,705	6,339	7,677
20	Cisurupan	19,047	6,866	43,484	28,990
21	Sukaesmi	10,534	8,650	1,687	3,374
22	Cikajang	29,153	13,013	18,117	33,645
23	Banjarwangi	23,786	5,678	1,168	38,168
24	Singajaya	321	602	403	529
25	C I H U R I P	2,166	1,612	748	1,842
26	Peundeuy	1,614	765	842	800
27	Pameungpeuk	-	5,207	-	6,629
28	Cisompet	3,810	1,417	433	275
29	Cibalong	9,172	6,921	2,192	3,354
30	Cikelet	10,405	5,217	3,028	5,939
31	Bungbulang	321	602	403	529
32	Mekar Mukti	1,614	765	842	800
33	Pakenjeng	2,432	1,096	4,334	5,432
34	Pamulihan	3,810	1,417	433	275
35	Cisewu	2,046	1,329	221	969
36	Caringin	2,599	2,335	2,548	1,977
37	Talegong	3,810	1,417	433	275
38	Limbangan	13,200	6,018	6,292	8,316
39	Selaawi	-	-	2,273	2,033
40	Cibiuk	8,011	4,622	4,065	5,653
41	Pangatikan	7,921	3,932	2,367	3,234

42	Sucinaraja	3,810	1,417	433	275
<b>J U M L A H</b>		<b>402,653</b>	<b>255,811</b>	<b>212,490</b>	<b>292,294</b>

Sumber : Hasil Survey Tim Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2020

Dari data di atas bahwa jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Garut cukup baik jumlah yang bekerja adalah 255.811 atau 38,78% dan perempuan yang belum bekerja 390.586 atau 61,22%, untuk lebih jelasnya disajikan dalam gambar grafik di bawah ini:



**Gambar 6.1 Grafik Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Garut 2020**

TPAK dan Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator utama ketenagakerjaan yang sering dipakai untuk melihat perkembangan di bidang ketenagakerjaan. TPAK perempuan yang bekerja lebih rendah dibandingkan TPAK yang bekerja. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, TPAK perempuan tidak pernah mencapai 50 persen. Sementara itu TPAK perempuan yang belum bekerja mencapai 68,22%. Ini menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam pangsa pasar kerja jauh lebih besar dibandingkan perempuan yang bekerja. Rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pasar kerja, tidak hanya karena peran ganda mereka dalam rumah tangga, tetapi juga berkaitan dengan norma yang terbangun di tengah masyarakat mengarahkan laki-laki memegang peranan kunci sebagai pencari nafkah utama rumah tangga.



Peningkatan TPAK perempuan erat hubungan dengan pencapaian tingkat pendidikan perempuan. Biasanya semakin banyak perempuan yang menamatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diikuti pula oleh meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Peningkatan tenaga kerja perempuan lebih mendominasi pada sektor yang secara tradisional banyak menampung tenaga kerja perempuan seperti perdagangan, pertanian dan industri. Masuknya perempuan pada pasar kerja didorong oleh kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga.

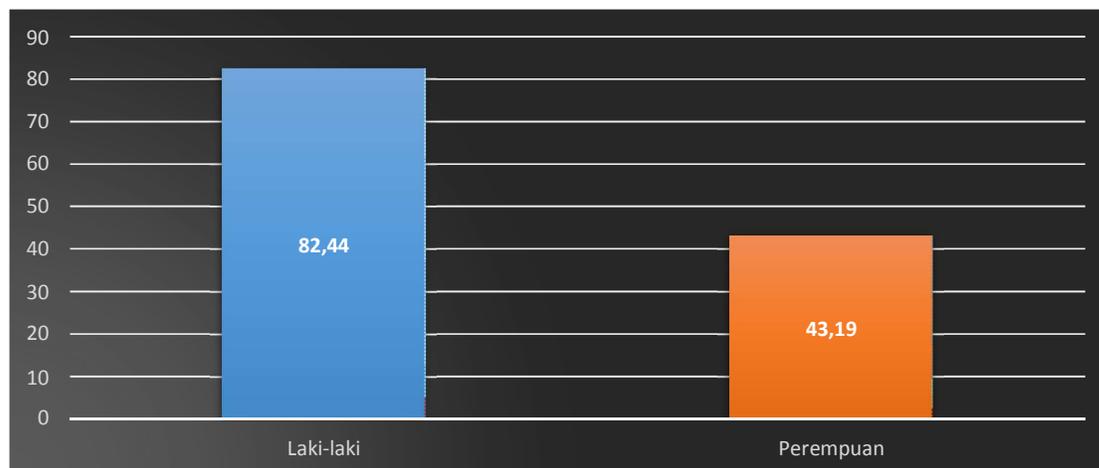
**Tabel 6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut**

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
-1	-2	-3	-4
Angkatan Kerja	758,300	397,880	1,156,180
<b>Bekerja</b>	683,959	368,614	1,052,573
<b>Pengangguran Terbuka</b>	74,341	29,266	103,607
Bukan Angkatan Kerja	190,110	545,769	735,879
<b>Sekolah</b>	70,518	72,630	143,148
<b>Mengurus Rumah Tangga</b>	27,680	441,933	469,613
<b>Lainnya</b>	91,912	31,206	123,118
<b>JUMLAH</b>	<b>948,410</b>	<b>943,649</b>	<b>1,892,059</b>

Sumber: BPS Kabupaten Garut dalam Angka Tahun 2021

Di lihat dari tabel diatas tingkat pekerja partisipasi penduduk masih banyak laki-laki yaitu 948.410 orang dan tingkat partisipasi kerja perempuan 943.649 orang. Begitu pula dilihat dari pengangguran wanita hanya 5,45 persen sedangkan laki-laki 9,12 persen. Berarti di Kabupaten Garut penduduk berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2019 lebih banyak laki-laki dari padaperempuan.

Untuk lebih jelasnya kaitannya dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2019 di sajikan dalam gambar Grafik di bawah ini:



**Gambar 6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut**

Di lihat dari Grafik di atas tingkat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut laki-laki adalah 82,55 % sedangkan perempuan hanya 43,19%

## 6.2 Pengangguran

Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja, mencari pekerjaan baik secara aktif maupun pasif.

Terjadinya pengangguran biasanya disebabkan oleh banyaknya penduduk yang mencari pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya.



Dampak sosial dan ekonomi yang bisa ditimbulkan oleh tingginya angka pengangguran tidak dapat dianggap enteng. Hal inilah yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Garut, bagaimana cara menanggulangi masalah pengangguran di Kabupaten Garut.

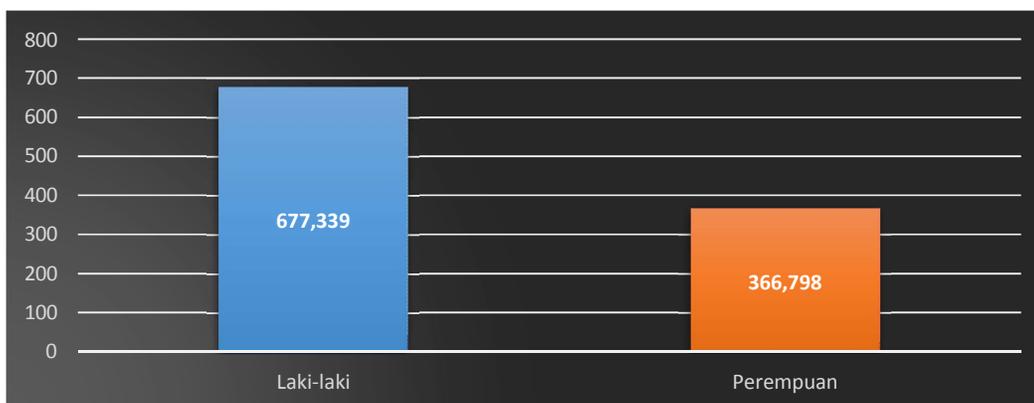
**Tabel 6.3. Jumlah Pengangguran Menurut Kelompok umur 15 Tahun Ke Atas dan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2019**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
-1	-2	-3	-4
15-19	34,209	16,736	50,945
20-24	58,045	25,875	83,920
25-29	52,016	27,173	79,189
30-34	65,188	48,448	113,636
35-39	115,224	60,261	175,485
40-44	84,523	48,410	132,933
45-49	67,722	33,606	101,328
50-54	66,830	33,614	100,444
55-59	55,911	35,533	91,444
60-64	35,009	18,959	53,968
65+	42,662	18,183	60,845
<b>JUMLAH</b>	<b>677,339</b>	<b>366,798</b>	<b>1,044,137</b>

Sumber: BPS Kabupaten Garut dalam Angka Tahun 2019

Tingginya jumlah pengangguran menurut kelompok umur 15 ke atas di Kabupaten Garut Tahun 2019 menunjukkan masih banyaknya pencari kerja yang tidak tertampung dalam kesempatan kerja yang ada, sehingga mereka terpaksa menganggur. Untuk itu, diperlukan penciptaan lapangan kerja yang cukup banyak agar dapat menampung tenaga kerja yang menganggur tersebut.

Untuk lebih jelasnya data kaitannya pengangguran di Kabupaten Garut data dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar6.3 Pengangguran Menurut Kelompok umur 15 Tahun Ke Atas dan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut,2018**

Dari gambar di atas bahwa angka pengangguran antara laki-laki dan perempuan sangat tinggi laki-laki yaitu 677,339 orang atau 64,87 persen sedangkan perempuan adalah 366,798 orang atau 35,13 persen.

### 6.2.1. PengangguranTerbuka

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka umumnya didefinisikan secara konvensional sebagai proporsi angkatan kerja yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Ukuran ini dapat digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja disebuah negara atau wilayah.

Pengangguran terbuka, pengangguran yang terjadi karena pertambahan lapangan kerja lebih rendah daripada pertambahan pencari kerja. Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

**Tabel 6.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut umur 15 Tahun Ke Atas dan Lulusan Terakhir Pendidikan di Kabupaten Garut**

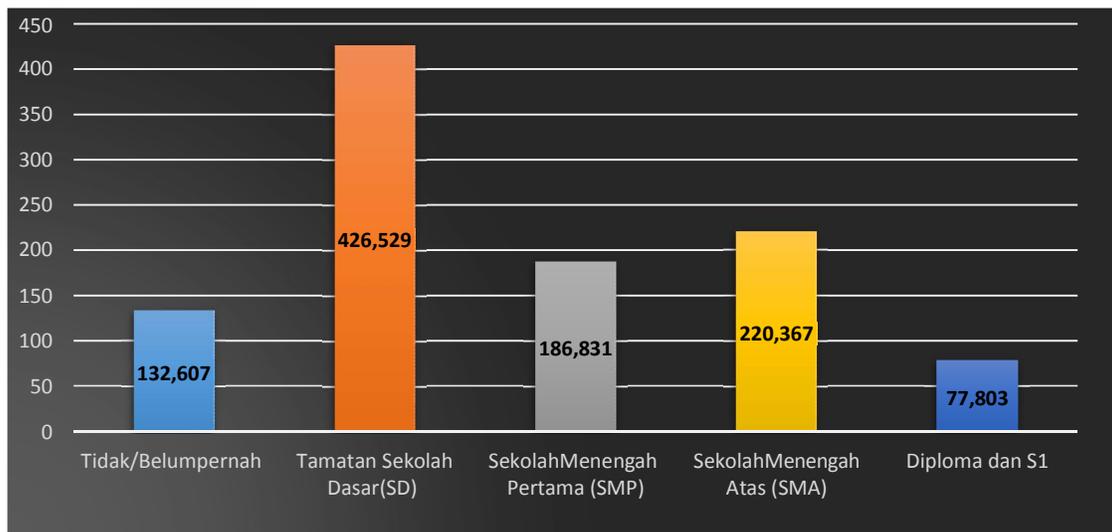
No	Lulusan Pendidikan Akhir	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
-1	-2	-3	-4	-5
1	Tidak/Belum pernah	132,607	-	132,607
2	Tamatan Sekolah Dasar (SD)	586,386	30,450	616,836
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	205,851	26,971	232,822
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	202,321	43,759	246,080
5	Diploma dan S1	58,015	2,427	60,442
<b>JUMLAH PENDUDUK</b>		<b>1,044,137</b>	<b>89,111</b>	<b>1,133,248</b>

Sumber : BPS Kabupaten Garut dalam Angka Tahun 2021

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Garut berdasarkan lulusan pendidikannya tahun 2019 berjumlah 89.111 orang. Sedangkan yang sudah bekerja sebanyak 1.044.137 orang, Dari jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Garut itu didominasi oleh mereka yang berlatar belakang pendidikan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), SMK sederajat yaitu mencapai 49.423 jiwa.

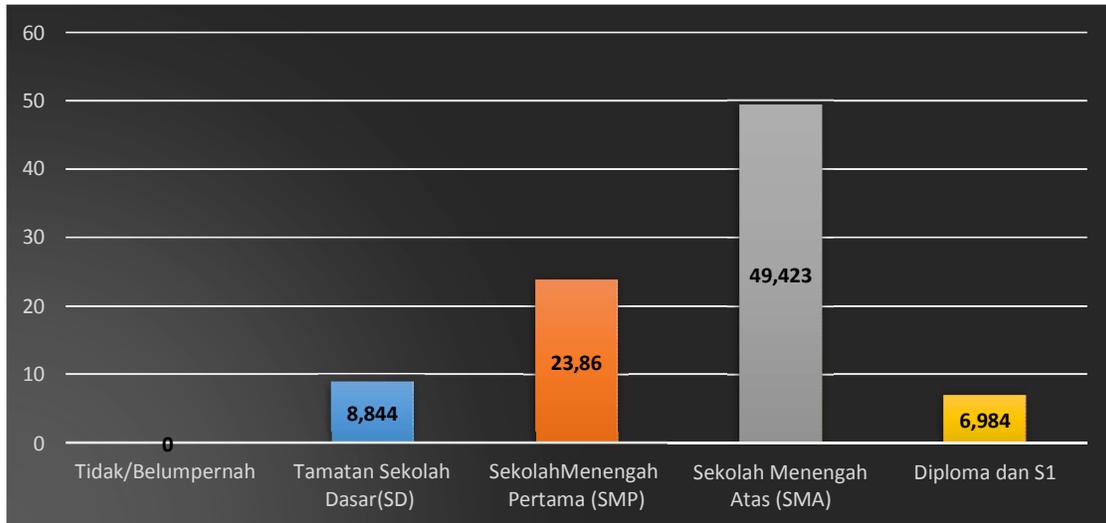


Untuk lebih jelasnya kaitannya data lulusan pendidikan terakhir yang bekerja disajikan dalam gambar di bawah ini:



**Gambar 6.4 Penduduk yang bekerja Menurut umur 15 Tahun Ke Atas dan Lulusan Terakhir Pendidikan di Kabupaten Garut Tahun 2019**

Dari data di atas kaitannya dengan penduduk yang belum bekerja dan pengangguran terbuka di sajikan dalam gambar di bawah ini :



**Gambar 6.5 Pengangguran Menurut Kelompok umur 15 Tahun Ke Atas dan Berdasarkan Lulusan Pendidikan di Kabupaten Garut, 2019**

Dari data di atas bahwa penduduk yang menganggur menurut kelompok umur 15 tahun ke atas berdasarkan Lulusan Pendidikan mayoritas adalah berpendidikan SMA / Sedarajat sebanyak 49,423 orang

### 6.2.2. Pengangguran Terdidik

Pengangguran terdidik merupakan kecurangan selarasan antara perencanaan pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja. Hal tersebut merupakan penyebab utama terjadinya jenis pengangguran ini. Faktanya lembaga pendidikan di Indonesia hanya menghasilkan pencari kerja, bukan pencipta kerja. Padahal, untuk menjadi seorang lulusan yang siap kerja, mereka perlu tambahan keterampilan di luar bidang akademik yang mereka kuasai.

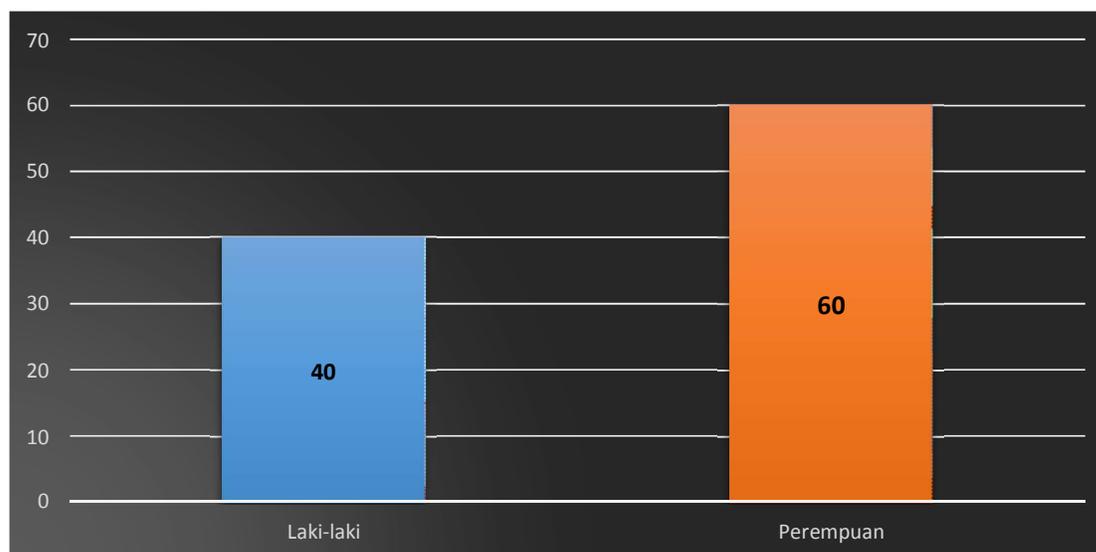
Tingkat pengangguran terdidik didefinisikan sebagai rasio jumlah pencari kerja berpendidikan tertentu (sebagai kelompok terdidik) terhadap jumlah angkatan kerja pada kelompok pendidikan tersebut. Tingkat pengangguran pada jenjang pendidikan SLTA dan SLTP masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan tidak seimbangnya antara lulusan SLTA dan SLTP dengan lowongan pekerjaan yang tersedia, sehingga menyebabkan membludaknya pengangguran terdidik di jenjang pendidikan ini. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Garut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan investasi dan menarik para investor untuk dapat menanamkan modalnya. Dengan adanya investasi tersebut diharapkan juga agar perusahaan-perusahaan di Kabupaten Garut untuk dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk.

**Tabel 6.5 Tingkat Pengangguran Terdidik Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2019**

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
-1	-2	-3	-4	-5
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	-	-	-
2	Tidak/Belum Tamat SD	-	-	-
3	Sekolah Dasar	448	733	1,221
4	Sekolah Menengah Pertama	2,715	4,072	6,787
5	Sekolah Menengah Atas	1,303	1,954	3,257
6	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	3,041	4,561	7,602
7	Diploma I/II/III/ Akademi	1,709	1,709	2,851
8	Universitas	2,172	3,257	5,429
<b>JUMLAH</b>		<b>11,428</b>	<b>16,286</b>	<b>27,147</b>
<b>Persentase</b>		<b>40%</b>	<b>60%</b>	

Sumber: BPS Kabupaten Garut dalam Angka Tahun 2018

Jika dilihat tingkat pengangguran terdidik menurut jenis kelamin, tingkat pengangguran terdidik laki-laki sebesar 40% persen sedangkan untuk perempuan mengalami kenaikan sebesar 60% persen. Dibandingkan tingkat pendidikan lainnya, pengangguran dari SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) 2019 tercatat 7,602 jiwa, selanjutnya pengangguran banyak dilami Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 6,787 jiwa dan universitas yaitu 5,429 jiwa. Sementara itu yang pengangguran SD menurun sebesar 1,221 jiwa. Hal ini menunjukkan banyak kaum muda yang baru lulus menyelesaikan pendidikan baik itu tingkat dasar, menengah dan pendidikan tinggi masih mencari pekerjaan yang diidam-idamkan.



**Gambar 6.6 Tingkat Pengangguran Terdidik Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2019**

Dari data di atas bahwa pengangguran Terdidik Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2019

### 6.3. Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Pekerjaan

#### 6.3.1 Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Proporsi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama merupakan angka yang menunjukkan distribusi/penyebaran penduduk bekerja di setiap lapangan pekerjaan. Menurut



Sensus Penduduk yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

Lapangan pekerjaan ini terbagi menjadi sembilan sektor Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri;

Listrik Gas dan Air; Konstruksi;

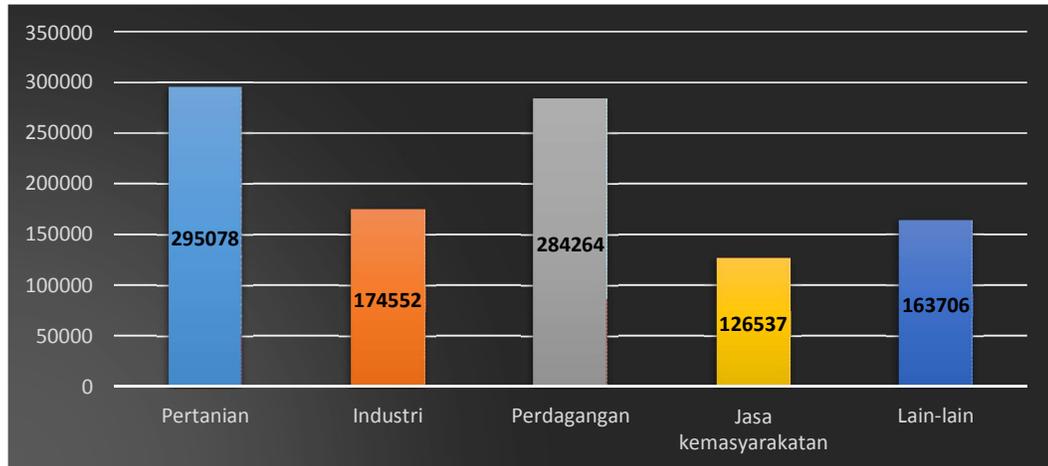
Perdagangan; Transportasi dan Komunikasi; Lembaga Keuangan; dan Jasa. Analisis yang dilakukan hanya akan memuat lima lapangan usaha terbesar yaitu; pertanian, industri, perdagangan dan jasa, sementara sisanya akan masuk pada sektor lainnya.

**Tabel 6.6 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut**

No	Lapangan Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
-1	-2	-3	-4	-5
1	Pertanian	192,058	115,495	295,078
2	Industri	194,788	63,929	174,552
3	Perdagangan	297,113	189,190	284,264
4	Jasa masyarakat	86,600	39,937	126,537
5	Lain-lain	158,108	5,598	163,706
<b>JUMLAH</b>		<b>677,339</b>	<b>366,798</b>	<b>1,044,137</b>
<b>Persentase</b>		<b>65%</b>	<b>35%</b>	

Sumber: BPS Kabupaten Garut dalam Angka Tahun 2021

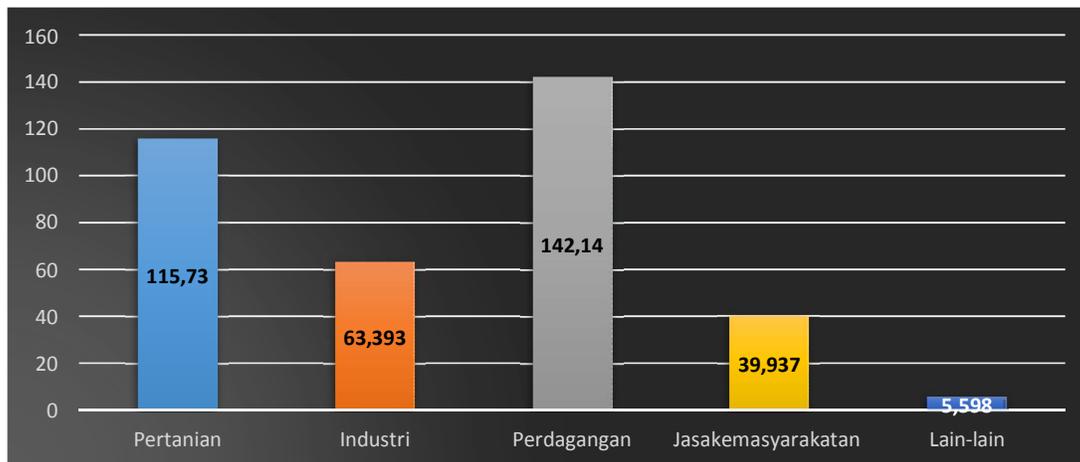
Tenaga Kerja terbanyak di Kabupaten Garut adalah pertanian dan perdagangan. Penduduk Kabupaten Garut yang bekerja pada pertanian pada tahun 2020 sebesar 295.078 jiwa. Sementara pada sektor perdagangan 284,264 jiwa. Hal ini dimungkinkan petani dan pedagang terbantu lahan pegunungan dan pasar tradisional di Kabupaten Garut.



**Gambar 6.7 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut**

Dilihat menurut jenis kelamin persentase penduduk Laki-laki yang bekerja pada pertanian dan perdagangan lebih besar. Begitu juga disektor lainnya, perbandingan laki-laki 65% sedangkan perempuan 35%. Dengan demikian dilihat dari lapangan pekerjaan dan jenis kelamin di Kabupaten Garut tahun 2019 Penduduk Laki-laki lebih besar dibanding penduduk Perempuan.

Sedangkan untuk pekerja perempuan dapat di lihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 6.8 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan menurut Jenis Kelamin Perempuan di Kabupaten Garut**

### 6.3.2 Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha atau kegiatan. Indikator status pekerjaan pada dasarnya terdiri dari empat kategori yang berbeda tentang kelompok

penduduk yang bekerja yaitu tenaga kerja yang berusaha sendiri, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan pekerja keluarga. Berusaha sendiri terdiri dari tenaga kerja yang benar-benar berusaha sendiri tanpa dibantu buruh dibayar maupun tidak dibayar, berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, dan berusaha sendiri dibantu buruh tetap/buruh dibayar, Pekerja bebas terdiri dari pekerja bebas dipertanian dan pekerja bebas di non pertanian. Sementara pekerja keluarga juga dikenal sebagai pekerja tak dibayar. Berikut merupakan jumlah penduduk bekerja menurut status pekerjaan dan jenis kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020:



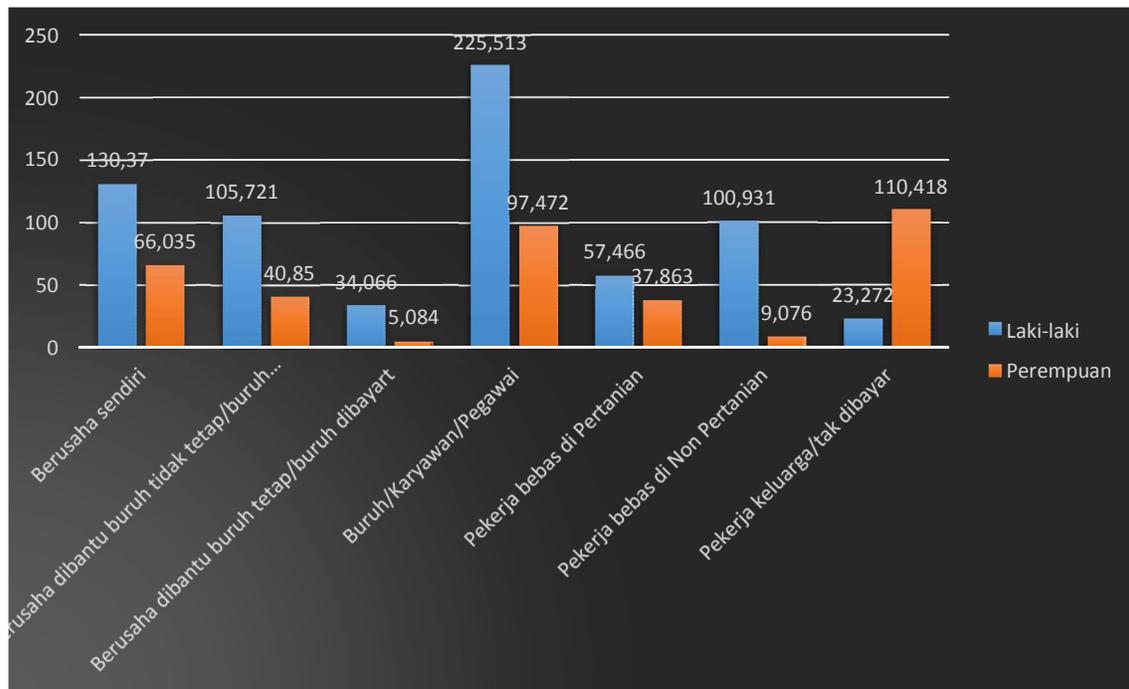
**Tabel 6.7 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020**

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
-1	-2	-3	-4	-5
1	Berusaha sendiri	197,063	75,238	272,301
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak Dibayar	96,396	62,707	159,103
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	17,593	1,941	19,534
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	159,329	83,385	242,714
5	Pekerja bebas di Pertanian	62,040	42,229	104,269
6	Pekerja bebas di Non Pertanian	106,208	22,031	128,239
7	Pekerja keluarga/tak dibayar	45,330	81,083	126,413
<b>JUMLAH</b>		<b>683,959</b>	<b>368,614</b>	<b>1,052,573</b>

Sumber: BPS Kabupaten Garut dalam Angka Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan penduduk menurut status pekerjaan dan jenis kelamin sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan atau pegawai. Sebagian yang lain, pada tahun 2020 adalah berusaha sendiri sejumlah 272.301 jiwa dan 159.103 jiwa adalah sebagai pekerja berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar. Sedangkan yang 126.413 jiwa merupakan pekerja keluarga/tidak dibayar yang mengindikasikan bahwa penduduk usia produktif belum memiliki pekerjaan yang layak secara ekonomi, yaitu mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar pekerja keluarga laki-laki menurut status pekerjaan lebih banyak, yaitu sebesar 65% daripada perempuan sebesar 35%.

Untuk lebih jelasnya kaitannya dengan Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut disajikan dalam gambar di bawah ini:



**Gambar 6.9** Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2019

Dari gambar di atas bahwa status pekerjaan mayoritas perempuan adalah buruh/karyawan/ pegawai.

#### 6.4. Pekerja Menurut Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan

##### 6.4.1. Pekerja menurut Status Modal, Kategori Perusahaan dan Jenis Kelamin

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Garut yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan

yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan. Setiap perusahaan yang tercatat harus menyerahkan status perusahaannya kepada pihak yang berwajib. Jumlah Perusahaan yang tercatat di Dinas Ketenagakerjaan



Kabupaten Garut pada tahun 2019 adalah sebanyak 707 perusahaan. Dengan terdaptarnya perusahaan ini akan mempermudah pemerintah mengetahui tentang kependudukan di Kabupaten Garut termasuk jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut. Mengenai perusahaan Berikut merupakan data perusahaan dilihat dari perusahaan Besar, Sedang dan perusahaan Kecil:

**Tabel 6.8 Perusahaan Berdasarkan Status Modal, Kategori Perusahaan dan Jumlah pekerja berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2019**

No	Status Modal	Kategori Perusahaan			Jenis Kelamin		Jumlah kategori Perusahaan
		Kecil	Sedang	Besar	L	P	
1	Perusahaan Swasta	269	286	84	8,265	20,207	639
2	PMDN(Penanaman Modal DalamNegri)	10	16	17	5,976	2,228	43
3	PMA (Penanaman Modal Asing)	5	4	9	1,295	14,702	18
4	Join Venture	0	5	5	419	319	10
<b>Jumlah</b>		<b>284</b>	<b>311</b>	<b>115</b>	<b>22,512</b>	<b>26,036</b>	<b>710</b>

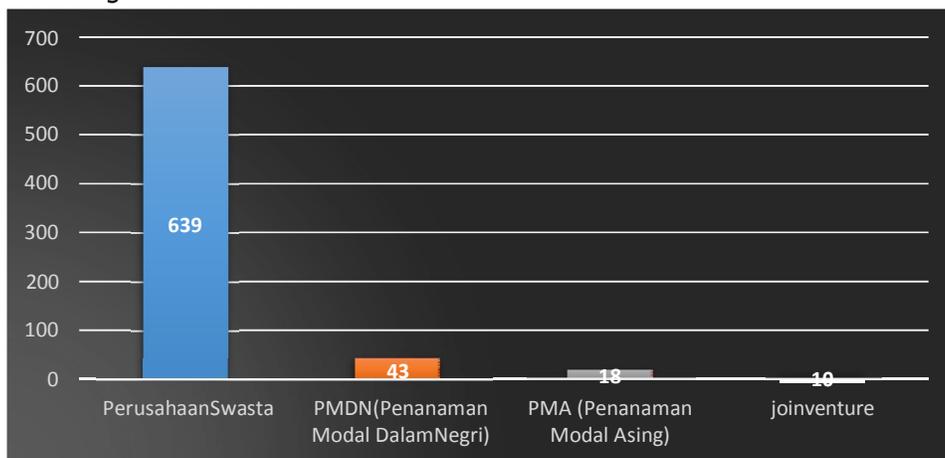
Sumber: Hasil Survey Tim Data Pilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa dikabupaten garut terdapat empat status modal perusahaan yaitu swasta, Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) dan Join Venture. Jumlah kategori perusahaan terbanyak adalah swasta sebanyak 639 perusahaan. Selain itu tiga kategori perusahaan di Kabupaten Garut (Perusahaan kecil, perusahaan sedang dan perusahaan besar), jumlah perusahaan di kabupaten terbanyak adalah perusahaan sedang sebanyak 311 perusahaan, sedangkan perusahaan berkategori besar sebanyak 115 perusahaan. Selanjutnya jumlah tenaga kerja yang tersebar diperusahaan Kabupaten Garut 2019 sebanyak 26,036 jiwa untuk perempuan sedangkan pegawai laki-laki lebih sedikit 22,512 jiwa.



Dari jumlah 710 perusahaan di Kabupaten Garut yang membuka lapangan pekerjaan hanya 48,548 jiwa yang bekerja di perusahaan tersebut. Sisanya berkemungkinan bekerja di pertanian, perkebunan milik pribadi.

Untuk lebih jelas kaitannya dengan Perusahaan Berdasarkan Status Modal, Kategori Perusahaan dan Jumlah pekerja berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2019 disajikan dalam gambar di bawah ini:



**Gambar 6.10 Perusahaan Berdasarkan Status Modal, Kategori Perusahaan dan Jumlah Pekerja berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2019**

Dari data di atas bahwa Perusahaan Berdasarkan Status Modal, Kategori Perusahaan di Kabupaten Garut Tahun 2019 mayoritas adalah dari perusahaan swasta yaitu sebanyak 639 perusahaan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah 43 perusahaan, penanaman modal asing (PMA) adalah 18 perusahaan dan Join Venture adalah 10 perusahaan.

#### 6.4.2 Pekerja menurut Status Modal, Pendidikan dan Jenis Kelamin

Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah. Pada tingkat global tentang hak ekonomi, sosial, budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Di Kabupaten Garut penyerapan tenaga kerja 2019 masih didominasi oleh masyarakat berpendidikan cukup, untuk itu perlu ditingkatkan kembali pendidikan di Kabupaten Garut untuk meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas. Berikut merupakan data pendidikan di perusahaan:

**Tabel 6.9 Penduduk yang Bekerja Menurut Status Modal (Swasta, Asing dan Daerah dan Join Venture) dan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut**

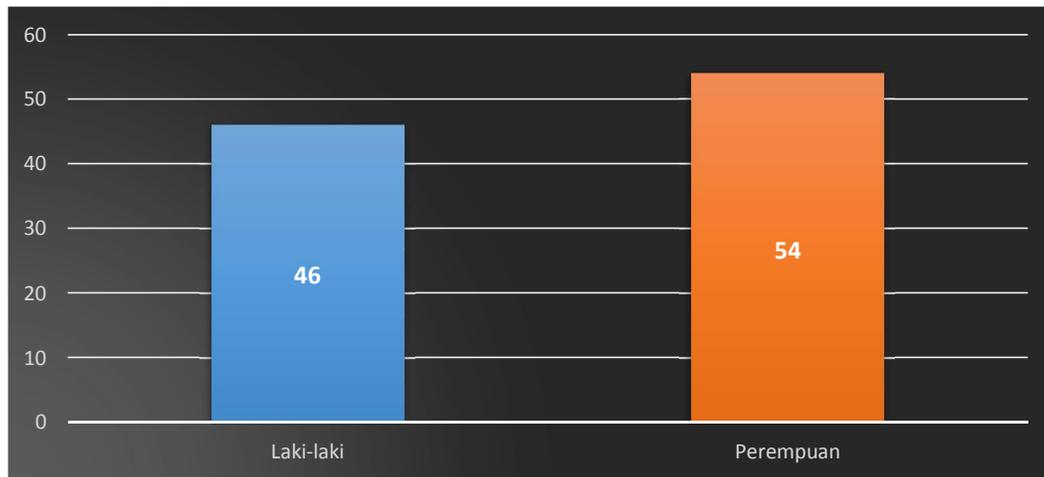
		PENDIDIKAN					Jenis Kelamin	
		SD	SMP	SMA	D3	S1	L	P
1	Perusahaan Swasta	2,346	2,600	11,263	3320	3672	8,265	20,207
2	PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)	2,321	1,899	2,707	895	380	5,976	2,228
3	PMA (Penanaman Modal Asing)	60	1,736	13,731	305	188	1,295	14,702

<b>JUMLAH PENDUDUK</b>	<b>6,235</b>	<b>27,701</b>	<b>4,520</b>	<b>4,240</b>	<b>22,093</b>	<b>25,717</b>
------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Sumber: Hasil Survey Tim Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2019

Pekerja lulusan pendidikan di bidang Swasta, PMDN dan PMA, dan Join Venture di Kabupaten Garut tahun 2019 masih banyak lulusan SMA yaitu 28,098 jiwa, dibandingkan lulusan Diploma 4,707 jiwa dan S1 4,383 jiwa.

Untuk lebih jelasnya kaitannya dengan Penduduk yang Bekerja Menurut Status Modal (Swasta, Asing dan Daerah dan Join Venture) dan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut di sajikan dalam gambar grafik d bawah ini:



**Gambar 6.11 Penduduk yang Bekerja Menurut Status Modal (Swasta, Asing dan Daerah dan Join Venture) dan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut 2019**

Dari gambar di atas bahwa Pekerja lulusan pendidikan di bidang Swasta, PMDN dan PMA, dan jointvent di Kabupaten Garut tahun 2019 masih banyak lulusan SMA, dibandingkan lulusan dan S1. Selanjutnya Dari jenis kelamin yang laki-laki 46 % dan perempuan 54%. Sehingga jumlah terbanyak pekerja swasta, PMDN, dan PMA, dan jointventure di Kabupaten Garut adalah wanita tamatan SMA. Menarik untuk disimak berdasarkan data di atas ternyata kaum perempuan lebih banyak yang mendaftar bekerja di banding kaum laki-laki.



## BAB VII

### PROFIL GENDER BIDANG POLITIK, PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Perempuan cenderung dipandang sebagai masyarakat kelas dua. Peran perempuan dalam pembangunan seringkali diragukan karena dianggap tidak layak dan tidak mampu. Faktor sosial budaya masyarakat dan orang tua yang cenderung menggunakan tenaga anak perempuan untuk membantu urusan rumah tangga sering berakibat pada rendahnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Meskipun pasal 27 UUD RI tahun 1945 menjamin kesamaan hak bagi seluruh warga negara di hadapan hukum, baik laki-laki maupun perempuan, masih banyak dijumpai ketidaksetaraan dan tidak berkeadilan gender termasuk salah satunya ketidaksetaraan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga legislatif.

Salah satu institusi yang memiliki peran krusial dalam upaya menuju kesetaraan gender adalah partai politik. Posisi strategis partai dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan internal. Kebijakan tersebut berkaitan dengan strategi pembinaan yang dilakukan terhadap kader perempuan anggota partai politik, proses rekrutmen yang lebih adil ataupun kebijakan-kebijakan lain yang perlu diambil. Hal ini penting guna



meningkatkan peran serta perempuan dalam politik, terutama dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif adalah tindakan afirmatif (*affirmative action*). Tindakan ini dilakukan oleh pemerintah melalui mekanisme kuota 30% keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislatif di parlemen. *Affirmative action* sering didefinisikan sebagai "langkah strategis" untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan gender dan kesempatan yang lebih bersifat substantif. Walaupun *affirmatif action* pada akhirnya tereliminasi" dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi No.24/PUU-4/2000 yaitu penghapusan nomor urut dan menggunakan suara terbanyak untuk penentuan anggota legislatif.

Perempuan adalah agen perubahan menuju kehidupan yang lebih berkualitas. Oleh sebab itu sangat penting bagi perempuan untuk duduk dalam posisi-posisi penting di wilayah kebijakan publik. Dalam jumlah yang sedikit, suara perempuan tidak akan memiliki kesempatan untuk membawa perubahan yang berarti dalam proses pengambilan keputusan politik. Untuk itu dengan adanya sedikit perempuan di legislatif harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendorong adanya pembaharuan dan perbaikan situasi agar terwujud kesetaraan dan keadilan gender. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender merupakan upaya pemerintah untuk membuka peluang bagi perempuan agar dapat berpartisipasi aktif di dalam pembangunan termasuk pembangunan politik yang berwawasan gender.

## 7.1 Partisipasi di Bidang Politik

### 7.1.1 Anggota DPRD Kabupaten Garut

Upaya peningkatan dan penguatan peran perempuan di lembaga legislatif merupakan upaya menuju kesetaraan gender di bidang politik meskipun persentasenya masih lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Partai politik sebagai salah satu institusi demokrasi memiliki peran strategis dalam melakukan pemberdayaan perempuan di bidang politik. Salah satu peran krusial partai adalah melakukan pembinaan terhadap perempuan kader partai untuk disiapkan menjadi kader perempuan yang berkualitas dan sekaligus mendongkrak keterwakilan perempuan di politik khususnya di lembaga legislatif.



Dewasa ini meskipun ada peluang bagi perempuan untuk berkiprah di bidang politik, khususnya menjadi calon legislatif, tetap saja kesempatan tersebut bergantung kepada pimpinan partai politik yang memiliki kuasa untuk menetapkan nomor urut calon legislatifnya. Di lain pihak, perempuan terjun ke dunia politik harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan laki-laki, dalam hal ini, perempuan harus turut aktif dalam kepengurusan partai politik dan membekali diri dengan memenuhi kapasitas, kompetensi dan kualifikasi sebagai warga politik dengan tetap dalam koridornya sebagai perempuan.

Keterwakilan perempuan di bidang politik khususnya yang menjadi anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

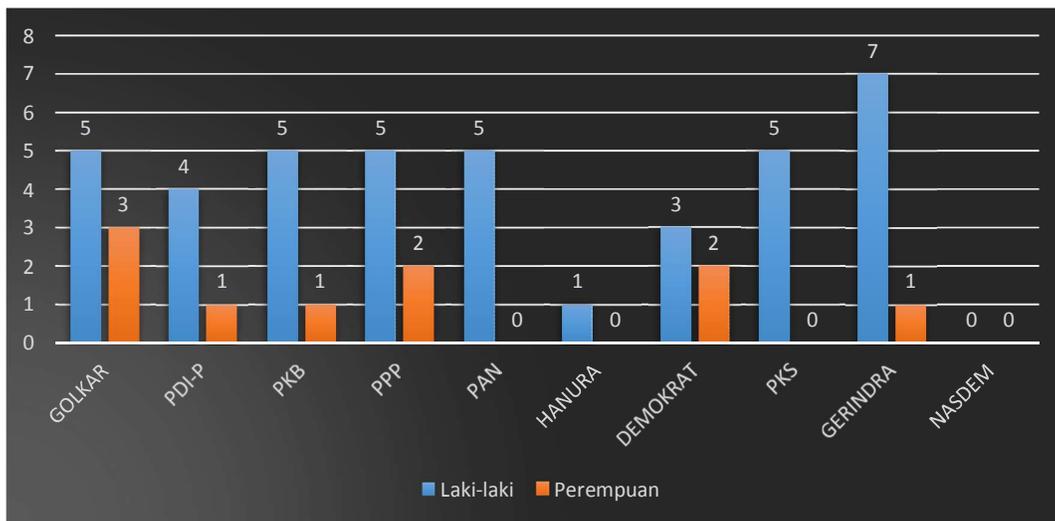
**Tabel 7.1 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Tahun 2020**

No	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	GOLKAR	5	3	8
2.	PDI-P	4	1	5
3.	PKB	5	1	6
4.	PPP	5	2	7
5.	PAN	5	0	5
6.	HANURA	1	0	1
7.	DEMOKRAT	3	2	5
8.	PKS	5	0	5
9.	GERINDRA	7	1	8
10.	NASDEM	0	0	0
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>40</b>	<b>10</b>	<b>50</b>

Sumber : KPU Kabupaten Garut 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dikemukakan bahwa keterwakilan perempuan dalam partai politik yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, bahkan ada beberapa partai politik yang tidak ada keterwakilan perempuannya seperti dari Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasional Demokrat. Dari total anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 50 orang hanya 10 orang anggota legislatif perempuan. Meskipun posisi ketua dewan dijabat perempuan tetap saja keterwakilan perempuan dalam partai politik masih harus ditingkatkan, agar terwujudnya kesetaraan gender.

Untuk lebih jelasnya kaitannya dengan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Tahun 2019 di sajikan dalam gambar grafik di bawah ini :



**Gambar7.1 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

Sedangkan gambaran persentasi anggota dewan dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat di lihat pada gambar di bawah ini :



**Gambar7.2 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

Dari gambar di atas bahwa Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Tahun 2019 berjenis kelamin laki-laki adalah 82 persen dan perempuan hanya 18 persen.

### 7.1.2 Partisipasi di Instansi Pemerintahan

Partisipasi lain dari perempuan adalah keterlibatan dalam bidang pemerintahan, di bawah ini di jelaskan kaitannya keterlibatan perempuan di Instansi Pemerintahan Kabupaten Garut seperti di jelaskan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 7.2 Jumlah Pegawai di Pemerintahan Kabupaten Garut Menurut Jenis Kelamin di Lingkungan Dinas/Badan/Lembaga Tahun 2020**

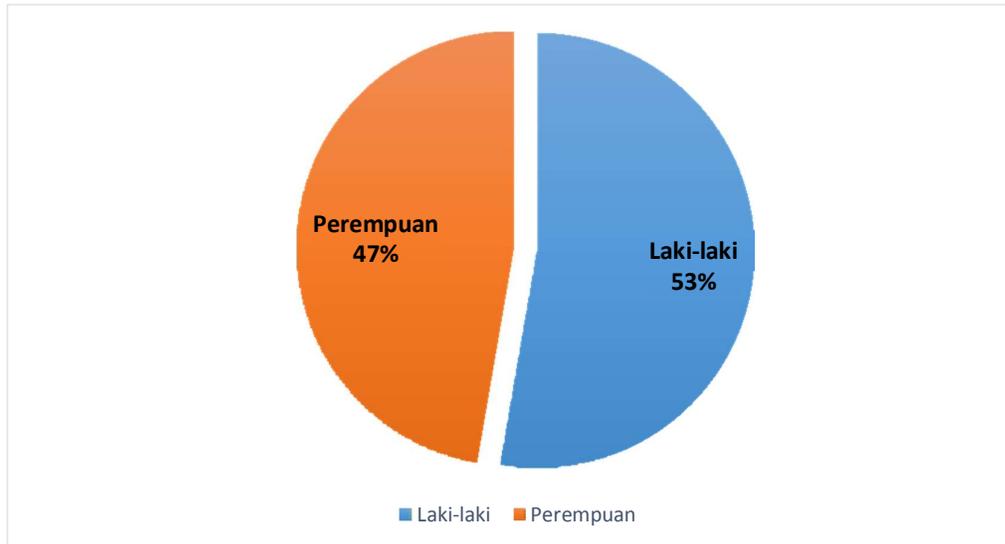
No.	Dinas/Instansi Pemerintahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
-1	-2	-3	-4	-5
1.	Badan Kepegawaian Dan Diklat	35	23	58
2.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	27	5	32
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22	4	26
4.	Badan Pendapatan Daerah	52	28	80
5.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	42	24	66
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	39	19	58
7.	Bp. Rsu Dr Slamet	257	345	602
8.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	25	21	46
9.	Dinas Kesehatan	496	968	1,464
10.	Dinas Ketahanan Pangan	21	21	42
11.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	37	11	48
12.	Dinas Koperasi Dan Ukm	20	16	36
13.	Dinas Lingkungan Hidup	243	31	274
14.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	52	12	64
15.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	247	52	299
16.	Dinas Pemadam Kebakaran	45	9	54
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	31	17	48

<b>No.</b>	<b>Dinas/Instansi Pemerintahan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>
18.	Dinas Pemuda Dan Olahraga	40	7	47
19.	Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu	27	13	40
20.	Dinas Pendidikan	3,680	5,110	8,790
21.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	24	27	51
22.	Dinas Perhubungan	148	8	156
23.	Dinas Perikanan Dan Peternakan	62	26	88
24.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral	121	38	159
25.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	22	20	42
26.	Dinas Pertanian	130	73	203
27.	Dinas Perumahan Dan Permukiman	42	20	62
28.	Dinas Sosial	16	18	34
29.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	29	12	41
30.	Inspektorat Daerah	58	35	93
31.	Kecamatan	622	136	758
32.	Sat Pol PP	44	2	46
33.	Sekretariat Daerah	120	61	181
34.	Sekretariat DPRD	31	17	48
<b>35</b>	Kejaksaan Negeri Garut	29	8	37
<b>36</b>	Pengadilan Negeri Garut	23	14	37
<b>37</b>	Pengadilan Agama Garut	30	7	37
<b>38</b>	KAPOLRES Garut	1,152	45	1,197
<b>JUMLAH</b>		<b>8,141</b>	<b>7,303</b>	<b>15,444</b>

Sumber: Hasil Survey Tim Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dikemukakan bahwa jumlah Pegawai di Pemerintahan Kabupaten Garut menurut Jenis Kelamin di Lingkungan Dinas/Badan/Lembaga Tahun 2019 sebanyak 15.444 orang dengan perincian jumlah pegawai laki-laki sebanyak 8.141 dan pegawai perempuan sebanyak 7.303. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam bidang pemerintahan hampir seimbang dengan laki-laki.

Untuk lebih jelasnya kaitannya dengan Jumlah Pegawai di Pemerintahan Kabupaten Garut Menurut Jenis Kelamin di Lingkungan Dinas/Badan/Lembaga Tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :



**Gambar 7.3 Jumlah Pegawai di Pemerintahan Kabupaten Garut Menurut Jenis Kelamin di Lingkungan Dinas/Badan/Lembaga Tahun 2020**

Dari gambar diatas bahwa Jumlah Pegawai di Pemerintahan Kabupaten Garut Menurut Jenis Kelamin di Lingkungan Dinas/Badan/Lembaga Tahun 2020, perempuan 49 persen dan laki-laki adalah 51persen.

**Tabel 7.3 Jumlah Pegawai Kecamatan termasuk Jumlah Perangkat Desa dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2019**

NO	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
-1	-2	-3	-4	-5
1	Garut Kota	88	25	113
2	Tarogong Kaler	38	13	51
3	Tarogong Kidul	114	18	132
4	Karang Pawitan	192	28	220
5	Sucinaraja	61	15	76
6	Wanaraja	84	14	98

<b>NO</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>
7	Pangatikan	69	19	88
8	Sukawening	100	13	113
9	Karang Tengah	38	7	45
10	Banyuresmi	22	5	27
11	Cibiuk	11	6	17
12	Leuwigoong	23	2	25
13	Limbangan	22	5	27
14	Selaawi	25	4	29
15	Cibatu	23	4	27
16	Kersamanah	18	3	21
17	Malangbong	22	2	24
18	Leles	27	7	34
19	Kadungora	25	9	34
20	Samarang	101	37	138
21	Pasir Wangi	97	30	127
22	Bayongbong	195	3	198
23	Sukaresmi	64	13	77
24	Cigedug	42	14	56
25	Cisurupan	165	23	188
26	Cikajang	99	32	131
27	Cilawu	151	42	193
28	Banjarwangi	20	4	24
29	Singajaya	14	6	20
30	Peundeuy	14	1	15

**DATA TERPILAH GENDER KABUPATEN GARUT 2021**

<b>NO</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>
31	Cihurip	41	5	46
32	Cisompet	104	21	125
33	Pameungpeuk	67	17	84
34	Cibalong	111	10	121
35	Cikelet	124	1	125
36	Pamulihan	16	1	17
37	Pakenjeng	24	4	28
38	Bungbulang	21	3	24
39	Mekar Mukti	22	4	26
40	Cisewu	21	1	22
41	Caringin	68	5	73
42	Talegong	26	1	27
<b>JUMLAH</b>		<b>2,609</b>	<b>477</b>	<b>3,086</b>

Sumber : Hasil Survey Tim Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dikemukakan bahwa jumlah Pegawai Kecamatan dan Perangkat Desa di Kabupaten Garut Tahun 2019 sebanyak 3.088 orang. Pegawai laki-laki sebanyak 2.609 orang (84,54 persen) dan pegawai perempuan sebanyak 477 orang (15,45 persen). Di beberapa Kecamatan terlihat jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai laki-laki lebih mendominasi dari pada pegawai perempuan, hal ini tentu saja perlu adanya peningkatan dimana jumlah perempuan harus bisa seimbang dengan jumlah laki-laki.

Untuk mengetahui lebih jelas kaitannya dengan Jumlah Pegawai Kecamatan termasuk Jumlah Perangkat Desa dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 7.4 Jumlah Pegawai Kecamatan termasuk Jumlah Perangkat Desa dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020**

Dari gambar di atas bahwa Jumlah Pegawai Kecamatan termasuk Jumlah Perangkat Desa dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2019 berjenis kelamin laki-laki adalah 85 persen dan berjenis kelamin perempuan adalah 15 persen.

**Tabel 7.4 Jumlah Pegawai Kecamatan termasuk Perangkat Desa di Kabupaten Garut Menurut Tingkat Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin Tahun 2020**

No.	Kecamatan	PENDIDIKAN													
		SD		SMP		SMA		DIPLOMA		S-1		S-2		S-3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Garut Kota	-	-	-	-	49	10	5	-	29	13	5	2	-	-
2	Tarogong Kaler	-	-	1	-	23	7	-	-	13	4	2	1	-	-
3	Tarogong Kidul	-	-	-	-	87	11	9	1	15	6	3	-	-	-
4	Karang Pawitan	-	-	9	-	146	21	10	1	27	6	-	-	-	-
5	Sucinaraja	-	-	-	-	53	12	-	-	7	3	1	-	-	-
6	Wanaraja	-	-	-	-	75	12	1	1	5	4	-	-	-	-
7	Pangatikan	-	-	5	-	54	12	1	-	12	4	-	-	-	-
8	Sukawening	-	-	-	-	79	11	9	-	12	2	-	-	-	-

9	Karang Tengah	8	2	5	-	22	3	1	-	2	2	-	-	-	-
10	Banyuresmi	-	-	-	-	14	3	1	-	6	2	1	-	-	-
11	Cibiuk	-	-	-	-	7	4	1	1	1	-	2	1	-	-
12	Leuwigoong	-	-	-	-	17	2	-	-	5	-	1	-	-	-
13	Limbangan	-	-	-	-	12	1	1	-	9	4	1	-	-	-
14	Selaawi	-	-	-	-	2	-	10	3	8	3	1	2	-	-
15	Cibatu	-	-	2	-	10	1	-	1	9	2	2	-	-	-
16	Kersamanah	-	-	-	-	9	2	-	-	8	1	1	-	-	-
17	Malangbong	-	-	-	-	10	-	-	-	10	2	2	-	-	-
18	Leles	-	-	-	-	20	4	-	-	5	3	2	-	-	-
19	Kadungora	-	-	-	-	13	-	-	1	11	8	1	-	-	-
20	Samarang	17	-	12	-	65	24	1	3	10	6	-	-	-	-
21	Pasir Wangi	4	-	3	-	78	22	4	2	7	6	1	-	-	-
22	Bayongbong	-	-	14	-	152	2	5	-	24	1	-	-	-	-
23	Sukaesmi	-	-	-	-	52	11	2	-	4	7	1	-	-	-
24	Cigedug	-	-	10	-	27	10	-	2	6	1	-	-	-	-
25	Cisurupan	-	-	11	-	138	15	-	-	16	8	-	-	-	-
26	Cikajang	3	-	2	2	85	21	2	2	8	5	1	-	-	-
27	Cilawu	2	-	2	-	130	36	2	1	14	5	1	-	-	-
28	Banjarwangi	1	-	1	-	8	2	-	-	10	2	-	-	-	-
29	Singajaya	-	-	-	-	9	3	-	-	5	2	-	1	-	-
30	Peundeuy	-	-	-	-	7	-	-	-	7	1	2	-	-	-
31	Cihurip	-	3	2	-	36	5	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cisompet	4	-	6	-	77	16	6	1	11	4	-	-	-	-

33	Pameungpeuk	-	-	-	3	55	12	-	3	9	2	-	-	-	-
34	Cibalong	-	-	12	-	93	6	2	-	7	1	-	-	-	-
35	Cikelet	-	-	10	-	106	1	1	-	7		-	-	-	-
36	Pamulihan	-	-	-	-	7		2	-	7	1	-	-	-	-
37	Pakenjeng	-	-	-	-	15	1	1	1	5	2	3	-	-	-
38	Bungbulang	-	-	-	-	12	1	-	1	10	-	-	-	-	-
39	Mekar Mukti	-	-	-	-	15	3	-	-	5	1	2	-	-	-
40	Cisewu	-	-	-	-	10		1	-	10	1		-	-	-
41	Caringin	-	-	-	-	49	2	-	-	20	2		-	-	-
42	Talegong	-	-	-	-	18		-	-	5	1	3	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>39</b>	<b>5</b>	<b>107</b>	<b>5</b>	<b>1946</b>	<b>309</b>	<b>78</b>	<b>25</b>	<b>401</b>	<b>128</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>44</b>		<b>112</b>		<b>2,255</b>		<b>103</b>		<b>529</b>		<b>46</b>		<b>0</b>	

Sumber: Hasil Survey Tim Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dikemukakan bahwa jumlah Pegawai Kecamatan dan Perangkat Desa di Kabupaten Garut menurut tingkat pendidikan formal tahun 2019 untuk pendidikan formal didominasi oleh pegawai tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebanyak 2.255 orang yang terdiri dari laki-laki 1.946 orang dan perempuan 309 orang, selanjutnya pegawai dengan lulusan Sarjana Strata I sebanyak 529 orang yang terdiri dari laki-laki 401 orang dan perempuan 128 orang. Sedangkan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 112 orang terdiri dari 107 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Pegawai Kecamatan dan Perangkat Desa masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

## 7.2 Organisasi Masyarakat

Keberadaan Organisasi Perempuan di Kabupaten Garut sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Beberapa program kegiatan yang dilaksanakan untuk pembangunan pemberdayaan perempuan terselenggarakan atas kerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat. Potensi organisasi masyarakat di Kabupaten Garut menjadi asset dan pendorong dalam mewujudkan pembangunan yang bekeadilan dan kesetaraan gender.



**Tabel 7.5 Lembaga Organisasi Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020**

No.	KECAMATAN	Lembaga/organisasi									
		Ekonomi		Keagamaan		Sosial budaya		Bidang politik		lainnya	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Garut Kota	1,208	804	399	615	2	4	9	-	3	1
2	Karang Pawitan	8	2	97	50	40	47	20	3	6	4
3	Wanaraja	1,091	658	434	543	312	176	124	36	4	72
4	Tarogong Kaler	396	180	906	764	194	153	23	8	13	18
5	Tarogong Kidul	34	139	31	-	-	-	-	-	-	-
6	Banyuresmi	429	42	3,654	6,204	30	46	3	1	-	-
7	Samarang	281	243	2,748	3,828	977	415	114	60	18	-
8	Pasir Wangi	90	14	111	27	52	35	38	1	18	3
9	Leles	175	616	228	85	99	93	115	20	10	5
10	Kadungora	3,431	2,294	1,261	1,461	340	305	44	29	6	20
11	Leuwigoong	73	40	325	224	56	110	29	8	19	21
12	Cibatu	-	-	-	-	5	4	1	5	-	-
13	Kersamanah	838	517	202	30	15	20	54	24	-	-
14	Malangbong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Sukawening	45	85	192	12	123	230	38	2	7	2
16	Karang Tengah	90	14	111	27	52	35	38	1	18	3
17	Bayongbong	1,091	658	434	543	312	176	124	36	4	72
18	Cigedug	38	44	144	20	117	53	-	-	-	-

No.	KECAMATAN	Lembaga/organisasi									
		Ekonomi		Keagamaan		Sosial budaya		Bidang politik		lainnya	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
19	Cilawu	1,305	741	363	303	560	207	93	31	105	152
20	Cisurupan	168	89	206	102	165	136	29	14	18	6
21	Sukaresmi	246	262	372	259	156	147	86	4	3	1
22	Cikajang	38	42	65	33	28	15	37	20	-	-
23	Banjarwangi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Singajaya	32	2	46	2	28	11	6	-	-	-
25	C I H U R I P	-	6	52	4	8	5	12	-	-	-
26	Peundeuy	45	85	192	12	123	230	38	2	7	2
27	Pameungpeuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Cisompet	67	76	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Cibalong	696	419	238	153	175	205	25	6	79	22
30	Cikelet	193	117	241	110	48	40	41	10	9	20
31	Bungbulang	21	4	13	-	9	6	3	1	18	2
32	Mekar Mukti	32	2	46	2	28	11	6	-	-	-
33	Pakenjeng	128	45	243	25	44	23	29	15	-	-
34	Pamulihan	101	14	290	46	51	18	12	-	-	-
35	Cisewu	45	85	192	12	123	230	38	2	7	2
36	Caringin	55	-	66	-	21	9	10	-	-	-
37	Talegong	101	14	290	46	51	18	12	-	-	-
38	Limbangan	108	69	126	82	105	130	27	11	17	5
39	Selaawi	67	76	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Cibiuk	31	13	39	24	25	18	4	2	17	83
41	Pangatikan	401	223	109	52	320	240	88	63	-	-
42	Sucinaraja	38	44	144	20	117	53	-	-	-	-
<b>J U M L A H</b>		<b>11,828</b>	<b>7,814</b>	<b>13,491</b>	<b>15,104</b>	<b>4,156</b>	<b>2,919</b>	<b>1,126</b>	<b>374</b>	<b>370</b>	<b>437</b>

Sumber: Hasil Survey Tim Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2020

Lembaga organisasi sebagaimana disajikan pada tabel 7.5 lebih banyak partisipasi laki-laki dari pada perempuan seperti pada organisasi sosial budaya dari jumlah 265 orang anggota terdiri dari laki-laki sebanyak 201 orang (75,84 persen) sedangkan perempuan sebanyak 64 orang (24,15persen). Lembaga organisasi dibidang politik dengan jumlah 321 orang terdiri



dari 304 orang (94,70 persen) laki-laki dan sisanya 17 orang (5,29 persen) perempuan. Selanjutnya lembaga ekonomi sebanyak 152 orang terdiri dari 144 orang (94,73 persen) laki-laki dan 8 orang (5,5 persen). Organisasi dibidang lain-lainnya masih terbilang cukup banyak sebesar 107 orang dengan jumlah masing-masing laki-laki sebanyak 81 orang (75,7 persen) dan perempuan sebanyak 26 orang (24,29 persen) dan lembaga organisasi yang memiliki jumlah anggota paling rendah di bidang keagamaan sebanyak 21 orang terdiri dari 17 orang (80,95 persen) laki-laki dan 4 orang (19,04 persen) perempuan hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat di bidang organisasi keagamaan masih rendah dan perlu ditingkatkan kembali. Dari beberapa lembaga di atas, setiap bidang lebih didominasi oleh laki-laki dan jumlah perempuan lebih rendah.

## BAB VIII

### PROFIL GENDER BIDANG SOSIAL BUDAYA

#### 8.1 Penduduk Lanjut Usia(Lansia)

**P**enduduk lansia menurut Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun ke atas. Sebagaimana warga lainnya, para lanjut usia (lansia) mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun hak bagi penduduk lanjut usia diantaranya mendapatkan : (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual; (2) Pelayanan kesehatan;(3) Pelayanan kesempatan kerja; (4) Pelayanan pendidikan dan pelatihan; (5) Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; (6) Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; (7) Perlindungan sosial; dan (8) Bantuan sosial.

Seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan akan mengalami suatu proses yang disebut *Aging Process* atau proses penuaan. Menua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan

kehidupan. Masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir, dimana pada masa ini seseorang akan mengalami kemunduran fisik, mental dan social secara bertahap sehingga tidak dapat melakukan tugasnya sehari-hari (tahap penurunan). Penuaan merupakan

perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk tubuh, jaringan dan sel, yang mengalami penurunan kapasitas fungsional. Pada manusia, penuaan dihubungkan dengan perubahan degeneratif pada kulit, tulang, jantung, pembuluh darah, paru-paru, saraf dan jaringan tubuh lainnya. Dengan kemampuan regeneratif yang terbatas, mereka lebih rentan terhadap berbagai penyakit, sindroma dan kesakitan dibandingkan dengan orang dewasa lain.



Persentase penduduk lansia di Kabupaten Garut dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini:

**Tabel 8.1 Persentase Penduduk Lansia dan Pralansia terhadap Total Penduduk di Kabupaten Garut Menurut Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<b>Age Group</b>			
<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>
0-4	138 568	133 443	272 011
05-Sep	139 742	133 768	273 510
Okt-14	142 668	137 492	280 160
15-19	124 567	119 320	243 887
20-24	102 388	102 248	204 636
25-29	98 298	96 263	194 561
30-34	94 011	92 687	186 698
35-39	93 212	92 001	185 213
40-44	83 028	82 775	165 803
45-49	75 014	73 439	148 453
50-54	60 310	60 638	120 948
55-59	47 735	47 511	95 246
60-64	37 642	37 590	75 232
65-69	26 556	28 886	55 442
70-74	19 561	21 582	41 143
75+	20 338	25 558	45 896
<b>JUMLAH</b>	<b>1,303,638</b>	<b>1,285,201</b>	<b>2,588,839</b>

Sumber: BPS Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat menurut kelompok umur, jumlah penduduk lansia terbagi menjadi lansia muda (usia 60-69 tahun) yang pada tahun 2019 sebesar 5,04 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Garut, lansia menengah (70-74 tahun) 1,58 persen, sedangkan lansia tua (75 tahun ke atas) meliputi 1,77 persen dari seluruh penduduk. Sementara itu, penduduk pra lansia yaitu kelompok umur 45-54 tahun dan 55-59 tahun masing-masing sebesar 16,81 persen dan 3,67 persen dari total penduduk Kabupaten Garut.

Sedangkan untuk mengetahui lebih jelas kaitannya dengan Persentase Penduduk Lansia dan Pralansia terhadap Total Penduduk di Kabupaten Garut Menurut Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin Tahun 2019 dapat di lihat pada gambar di bawah ini :





**Gambar 8.1 Persentase Penduduk Lansia dan Pralansia terhadap Total Penduduk di Kabupaten Garut Menurut Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

Data lansia sebagaimana yang tertera dalam tabel di atas diperlukan untuk penyusunan program penanganan lansia berkaitan dengan masalah kesehatan, ekonomi dan sosial budaya. Beberapa karakteristik tentang lansia di Kabupaten Garut sangat membantu para pengambil kebijakan/instansi terkait agar dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para lansia dan keluarganya mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan memiliki gaya hidup yang baik untuk mencegah penyakit degeneratif serta memperpanjang usia harapan hidup. Lansia dengan kualitas kesehatan yang baik diharapkan tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, juga berpeluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya.

## 8.2 Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan



darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Berkaitan dengan itu, untuk mengoptimalkan pemenuhan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah Kabupaten Garut, beberapa karakteristik penyandang disabilitas di Jawa Barat perlu diketahui, antara lain meliputi jumlah penyandang disabilitas menurut kelompok umur dan jenis kelamin, jumlah penyandang disabilitas menurut tingkat pendidikan dan jenis kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil Survei Tim Data Terpilah Gender Tahun 2019 di Kabupaten Garut, jumlah penyandang disabilitas merupakan 63,35 persen dari total penduduk Kabupaten Garut yang berjumlah 2.235.470 jiwa. Persentase penyandang disabilitas yang melebihi enam persen ini menunjukkan bahwa Kabupaten Garut termasuk daerah yang cukup banyak warga yang memiliki permasalahan sosial yaitu penyandang disabilitas.

**Tabel 8.2 Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas terhadap Total Penduduk di Kabupaten Garut Menurut Kelompok Umur, Klasifikasi Wilayah dan Jenis Kelamin Tahun 2020**

No.	KECAMATAN	Perempuan Disabilitas (> 18 thn )					
		Fisik		Mental		Fisik & Mental	
		L	P	L	P	L	P
1	Garut Kota	48	41	49	23	26	15
2	Karang Pawitan	-	-	-	-	-	-
3	Wanaraja	99	51	26	37	9	12
4	Tarogong Kaler	127	107	101	53	30	14
5	Tarogong Kidul	40	26	4	3	6	8
6	Banyuresmi	133	151	57	45	126	116
7	Samarang	93	80	57	23	25	21
8	Pasir Wangi	76	36	27	18	19	45
9	Leles	94	78	93	45	55	19
10	Kadungora	109	67	95	57	35	22
11	Leuwigoong	57	51	73	40	22	11
12	Cibatu	99	51	26	37	9	12
13	Kersamanah	10	1	18	10	28	11
14	Malangbong	56	36	55	50	35	39
15	Sukawening	22	20	27	11	15	5
16	Karang Tengah	55	36	21	19	0	0
17	Bayongbong	169	123	74	49	98	64
18	Cigedug	79	30	22	9	98	42
19	Cilawu	140	137	44	37	19	22
20	Cisurupan	102	75	60	47	162	122
21	Sukaesmi	22	20	27	11	15	5
22	Cikajang	46	38	18	23	64	61

Perempuan Disabilitas (> 18 thn )							
No.	KECAMATAN	Fisik		Mental		Fisik & Mental	
		L	P	L	P	L	P
23	Banjarwangi	7	2	8	2	0	0
24	Singajaya	23	19	4	4	23	20
25	C I H U R I P	22	14	13	12	1	1
26	Peundeuy	1	0	3	2	4	4
27	Pameungpeuk	55	36	21	19	0	0
28	Cisompet	22	22	5	8	0	2
29	Cibalong	53	41	3	3	0	0
30	Cikelet	57	39	65	42	25	30
31	Bungbulang	6	4	3	2	8	7
32	Mekar Mukti	1	0	3	2	4	4
33	Pakenjeng	87	66	43	49	24	19
34	Pamulihan	11	3	14	5	0	2
35	Cisewu	53	45	31	15	5	5
36	Caringin	23	19	4	4	23	20
37	Talegong	19	8	14	5	0	2
38	Limbangan	91	76	55	33	79	53
39	Selaawi	22	22	5	8	0	2
40	Cibiuk	38	40	33	17	10	8
41	Pangatikan	36	20	35	14	5	4
42	Sucinaraja	7	2	8	2	0	0
<b>J U M L A H</b>		<b>2,081</b>	<b>1,583</b>	<b>1,250</b>	<b>812</b>	<b>1,056</b>	<b>806</b>

Sumber: Hasil Survey Tim Data Pilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2019 disetiap kecamatan berjumlah 63,35 persen dari total penduduk Kabupaten Garut. Jikadilihat menurut kelompok gender danjenis disabilitas, jumlah penyandang disabilitas terbagi menjadi disabilitas fisik (gangguan pada fungsi tubuh) yang pada tahun 2019 sebesar 33,18 persen laki-laki dan sebesar 22,03 persen perempuan dari seluruh penduduk Kabupaten Garut, disabilitas mental (kelainan mental atau tingkah laku) sebesar 17,71 persen laki-laki dan 11,94 persen perempuan, sedangkan disabilitas ganda (kelainan fisik dan mental) sebesar 4,54 persen laki-laki dan 10,57 persen perempuan. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penyandang disabilitas perempuan lebih sedikit jumlahnya dibanding penyandang disabilitas laki-laki.



## BAB IX

### KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

#### 9.1 Kekerasan Terhadap Perempuan

**M**enurut Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan, bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental perempuan, termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi. Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia menanda tangani Deklarasi tersebut bersama dengan negara - Negara ASEAN lainnya dan telah mempersiapkan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, serta program kegiatan pemberdayaan perempuan lainnya.

Fenomena kekerasan yang dialami perempuan terkait dengan konstruksi sosial yang melahirkan relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Konstruksi sosial ini terbentuk dalam budaya masyarakat yang diwarnai nilai-nilai yang cenderung patriarkhis. Strukturbudaya masyarakat seperti ini sering kali mengakibatkan terjadinya dominasi dan diskriminasi terhadap kaum

perempuan oleh kaum laki-laki dan terjadinya hambatan bagi kemajuan kaum perempuan. Kekerasan yang dialami anak dapat menggambarkan secara jelas adanya relasi kekuasaan yang timpang yang menimpa para korban sebab anak tidak berdaya ketika menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang lebih berkuasa.



Kekerasan terhadap perempuan sering mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut. Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi dimanapun termasuk di rumah, tempat kerja dan jalanan. Dimensi kekerasan yang menimpa perempuan juga beragam dari kekerasan fisik, seksual, psikologis, budaya, sosial sampai politik. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Kekerasan yang dialami perempuan dewasa ini bermacam-macam bentuknya seperti yang dikemukakan Luhulima (2000) bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi yaitu:

- 1) Fisik : memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat (senjata), membunuh;
- 2) Psikologis : berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat, dan lain-lain);

- 3) Seksual : melakukan tindakan yang mengarah ajakan atau pemaksaan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban. Memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukaikorbannya;
- 4) Finansial : mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban;
- 5) Spiritual : merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu.

Beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana yang diuraikan di atas juga terjadi di Kabupaten Garut diantaranya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi maupun kekerasan seksual.

## 9.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT)

Dalam Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menurut Undang-undang tersebut meliputi:

- 1) Kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat.
- 2) Kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual, yang meliputi:
  - a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya
  - b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuantertentu.
- 3) Penelantaran rumah tangga meliputi:
  - a) Penelantaran kehidupan orang lain atau tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain dalam lingkup rumahtangganya.
  - b) Membatasi dan atau melarang untuk bekerja sehingga mengakibatkan ketergantungan ekonomi.

KDRT sejauh ini belum dikenal secara luas sebagai kejahatan dalam masyarakat, meskipun terjadi di banyak tempat seperti: pemerkosaan, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap anak, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya namun persepsi yang berkembang di masyarakat masih menganggap masalah KDRT sebagai masalah pribadi yang

tidak perlu di campuri oleh orang lain/pihak lain, sehingga kebanyakan korban tidak berani bicara secara terbuka.

### 9.3 Gambaran Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2018

Menurut data yang didapat dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan bahwa kekerasan terhadap perempuan tercatat dalam data kasus sebagaimana tersaji dalam tabel berikutini:

**Tabel 9.1 Rekapitulasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Tahun 2014 s/d 2020**

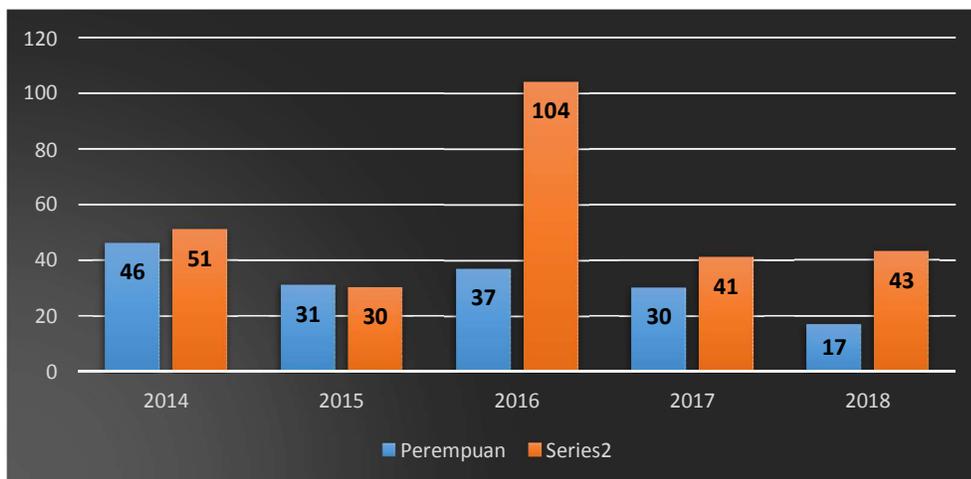
No	Tahun	Katagori		Jumlah
		Perempuan	Anak	
1	2014	46	51	97
2	2015	31	30	61
3	2016	37	104	141
4	2017	30	41	71
5	2018	17	43	60
6	2019	18	20	38
7	2020	9	19	28
<b>JUMLAH</b>		<b>161</b>	<b>269</b>	<b>430</b>

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Garut 2020

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dikemukakan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Garut selama lima tahun terakhir sebanyak 430 kasus di antaranya adalah pada tahun 2014 kekerasan terhadap perempuan yaitu 46 kasus, tahun 2015 sebanyak 31 kasus, tahun 2016 sebanyak 37 kasus, tahun 2017 sebanyak 30 kasus dan tahun 2018 sebanyak 17 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Namun data yang tercatat sepertinya belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengingat bentuk kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi di Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya kaitannya dengan Kekerasan Terhadap Perempuan pada Tahun 2014 sampai dengan 2018 di jelaskan dalam gambar Grafik di bawah ini:





**Gambar9.1 RekapitulasiKekerasanTerhadapPerempuandanAnakpadaTahun 2014 s/d2018**

Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk lainnya masih banyak yang tidak tercatat secara resmi mengingat masih banyak perempuan yang mengalami kekerasan tidak pernah melapor karena malu. Disamping itu persepsi masyarakat yang menganggap masalah KDRT in sebagai masalah pribadi rumah tangga yang tidak perlu ikut campur terhadap urusan rumah tangga orang lain. Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan bukanlah kasus yang mudah terungkap,



banyak kasus yang tidak dilaporkan dan banyak kasus yang dalam perjalanannya dicabut oleh pelapor yang sekaligus juga korban. Hal ini dikarenakan banyaknya beban gender perempuan yang sering kali harus ditanggung sendiri dan kuatnya budaya patriarki, agama, dan adat yang menempatkan perempuan korban KDRT dalam situasi yang sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan yang dialaminya, dan cenderung ragu untuk

mengungkap fakta kekerasannya. Bahkan korban sulit mendapat dukungan dari keluarga maupun komunitas. Keyakinan berdosa jika menceritakan kejelekan, keburukan, atau aib suami membuat banyak perempuan korban KDRT menyimpan dalam-dalam berbagai bentuk kekerasan yang dialaminya.



## **BAB X**

### **PENUTUP**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, akhirnya penyusunan Buku Data Terpilah Gender Kabupaten Garut Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu ketersediaan Data Terpilah Gender sebagai prasyarat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Data Terpilah Gender disusun dengan mengacu pada Indikator yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

Data Terpilah Gender dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi semua SKPD/Instansi/Dinas/Lembaga terkait lainnya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam rangka meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender khususnyadi Kabupaten Garut. Data yang tersusun tentunya sangat bermanfaat untuk membuka wawasan yang memberikan gambaran umum tentang keadaan perempuan dan laki-laki di berbagai aspek kehidupan.

Demikianlah data gender secara terpilah yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pengumpulan dan penyajian datanya. Kritik serta saran yang membangun dari semua pihak akan menjadi pelengkap untuk penyusunan berikutnya. Atas bantuan dan kerja sama seluruh SKPD/Instansi/Lembaga terkait kami ucapkan terima kasih, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin YRA.



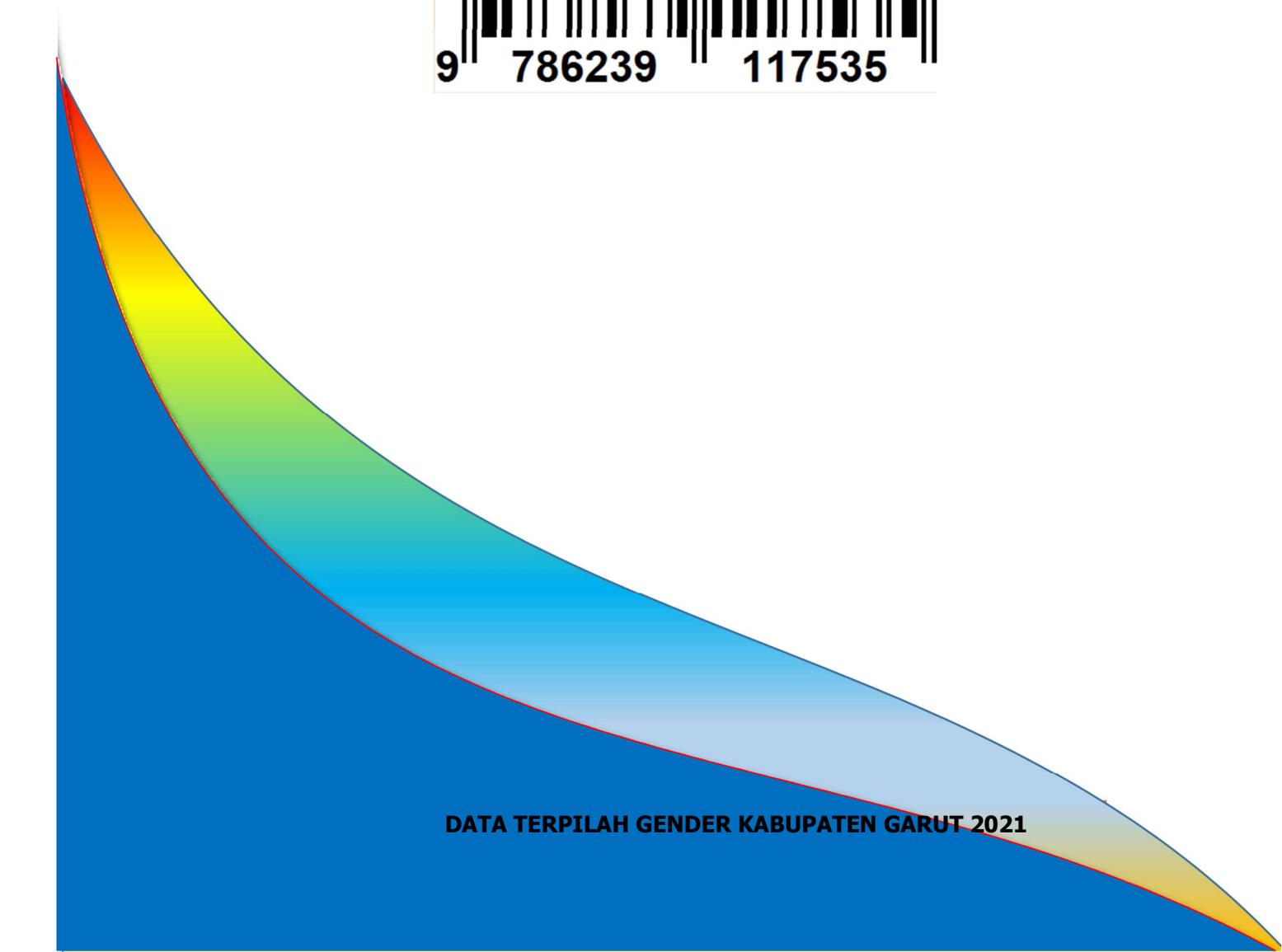
## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Nasional
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak
- Peraturan Menteri Keuangan No 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Keuangan No 119/PMK.02//2009 tentang *Gender Budget Statement (GBS)*
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Kekerasan
- BPS Kabupaten Garut dalam Angka Tahun 2021
-



ISBN : 978-623-91175-3-5

ISBN 978-623-91175-3-5



**DATA TERPILAH GENDER KABUPATEN GARUT 2021**